



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 7
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : inspektorat.sukoharjokab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ini.

Sukoharjo, Maret 2022

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



Drs. DJOKO POERNOMO

Rembina Utama Muda

NIP-19681225 199001 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 dapat kami selesaikan. Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 pasal 11 Ayat (2) dan (3), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati kepada Menteri melalui Gubernur paling lambat 3(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, telah menjadi kewajiban konstitusi bahwa Bupati Sukoharjo juga akan menyampaikan LPPD Akhir Tahun Anggaran.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah merupakan Amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dimana berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Materi penyusunan LPPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD ini memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri dari capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LPPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, baik dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, sampai selesainya penyusunan laporan ini.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini kami susun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sukoharjo, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Sukoharjo, Maret 2022

BUPATI SUKOHARJO


Hj. ETIK SURYANI, S.E. M.M.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
b. Data Geografis Wilayah	5
c. Jumlah Penduduk	12
d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan	15
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Daerah Dan Pegawai Pemerintah	15
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	18
1.1.2 Perencanaan pembangunan Daerah	22
a. Permasalahan Strategis Daerah.....	22
b. Visi Misi Kepala Daerah	34
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	36
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	41
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	42
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	57
2.1 Capaian Indikator Makro	57
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	58
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	58
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	164
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	195

BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
	PEMBANTUAN	295
BAB IV	PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN	
	MINIMAL	296
	A. Urusan Pendidikan	296
	1. Jenis Pelayanan Dasar	296
	2. Target Capaian SPM	296
	3. Realisasi Capaian SPM	301
	4. Alokasi Anggaran	306
	5. Dukungan Personil	306
	6. Program dan Kegiatan	307
	B. Urusan Kesehatan	309
	1. Jenis Pelayanan Dasar	309
	2. Target Capaian SPM	310
	3. Realisasi Capaian SPM	316
	4. Alokasi Anggaran	324
	5. Dukungan Personil	325
	6. Permasalahan dan Solusi	327
	7. Program dan Kegiatan	330
	C. Urusan Pekerjaan Umum	332
	1. Jenis Pelayanan Dasar	332
	2. Target Capaian SPM	333
	3. Realisasi Capaian SPM	334
	4. Alokasi Anggaran	338

5. Dukungan Personil	338
6. Permasalahan dan Solusi	339
7. Program dan Kegiatan	339
D. Urusan Perumahan Rakyat	
1. Jenis Pelayanan Dasar	340
2. Target Capaian SPM	340
3. Realisasi Capaian SPM	342
4. Alokasi Anggaran	342
5. Dukungan Personil	342
6. Permasalahan dan Solusi	342
7. Program dan Kegiatan	344
E. Urusan Ketentraman, ketertiban	
1. Jenis Pelayanan Dasar	345
2. Target Capaian SPM	345
3. Realisasi Capaian SPM	349
4. Alokasi Anggaran	353
5. Dukungan Personil	354
6. Permasalahan dan Solusi	355
7. Program dan Kegiatan	356
F. Urusan Sosial	
1. Jenis Pelayanan Dasar	357
2. Target Capaian SPM	358
3. Realisasi Capaian SPM	360
4. Alokasi Anggaran	362
5. Dukungan Personil	363
6. Permasalahan dan Solusi	363
7. Program dan Kegiatan	364
BAB V PENUTUP	367

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29. Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 38).

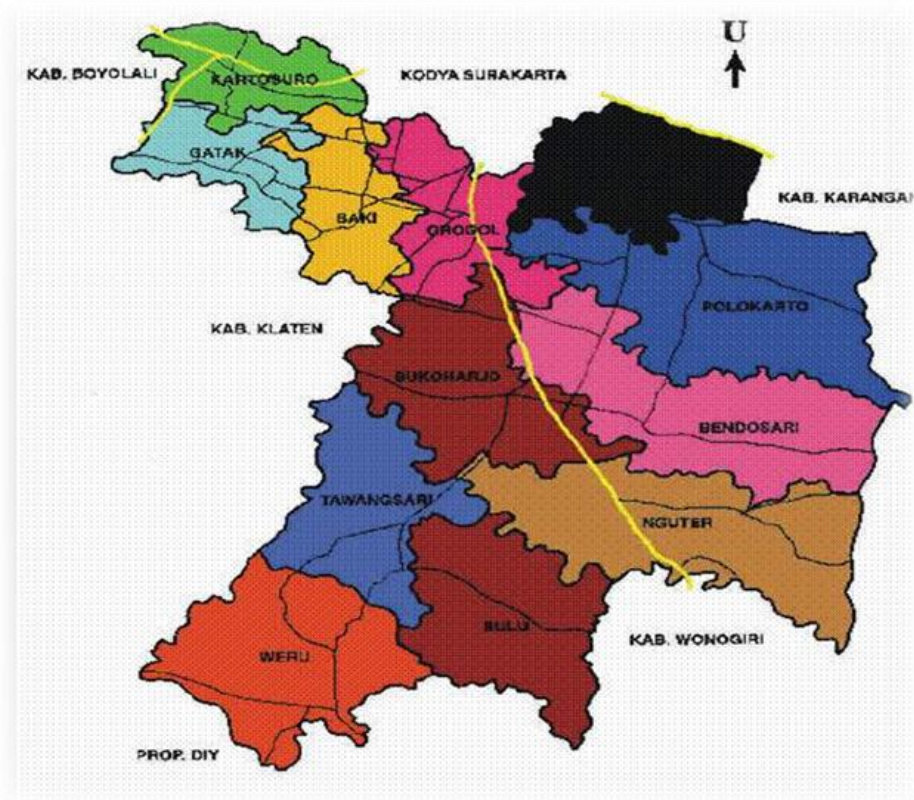
b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Sukoharjo terletak pada posisi 110° 42'06.79" Bujur Timur - 110° 57'33,70" Bujur Timur dan antara 7° 32'17.00" Lintang Selatan - 7° 49'32.00" Lintang Selatan, dengan batas wilayah meliputi :

- Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Kab. Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten

Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 46.666 Ha atau sekitar 1,43% luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. Secara rinci luas kecamatan di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Gambar I.1
peta Kabupaten Sukoharjo



Tabel I.1
Luas Wilayah Per Kecamatan di Kab. Sukoharjo

No	Kecamatan	Luas (km ²)
1	2	3
1	Weru	41,98
2	Bulu	43,86
3	Tawangsari	39,98
4	Sukoharjo	44,58
5	Nguter	54,88
6	Bendosari	52,99
7	Polokarto	62,18
8	Mojolaban	35,54
9	Grogol	30,00
10	Baki	21,97
11	Gatak	19,47
12	Kartasura	19,23
	Total	466,66

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo

Secara administrasi Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri atas 150 desa dan 17 kelurahan, 1.963 Dukuh, 529 Kebayanan, 4.622 Rukun Tetangga dan 1.488 Rukun Warga dengan Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Bendosari yang berjarak 12 km dari Kota Surakarta. Pembagian wilayah administrasi per kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I.2
Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dukuh	Kebayanan	RT	RW
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Weru	13	-	214	48	398	137
2.	Bulu	12	-	138	43	245	102
3.	Tawang Sari	12	-	125	38	320	115
4.	Sukoharjo	-	14	199	52	449	141
5.	Nguter	16	-	172	55	352	122
6.	Bendosari	13	1	187	47	320	110
7.	Polokarto	17	-	194	55	372	124
8.	Mojolaban	15	-	163	52	537	160
9.	Grogol	14	-	38	39	639	145
10.	Baki	14	-	155	35	360	110
11.	Gatak	14	-	161	32	262	92
12.	Kartasura	10	2	217	29	430	115
Jumlah		150	17	1.963	473	4.684	1.473

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan relief, Kabupaten Sukoharjo dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu daerah datar meliputi Kecamatan Kartasura, Baki, Gatak, Grogol, Sukoharjo dan Mojolaban, sedangkan daerah yang miring meliputi Kecamatan Polokarto, Bendosari, Nguter, Tawang Sari, Bulu dan Weru. Tempat tertinggi diatas permukaan air laut adalah Kecamatan Polokarto yaitu 125 m dpl dan yang terendah adalah Kecamatan Grogol yaitu 89 m dpl.

Kelerengan atau kemiringan lahan di Kabupaten Sukoharjo dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) klasifikasi, yaitu;

- 0-2% (datar) seluas 36.443 ha, meliputi seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.
- 2- 15% (bergelombang) seluas 8.609,25 ha, meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Weru, Bulu, Tawang Sari, Nguter, Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Grogol, dan Kartasura.
- 15 – 40 % (curam) seluas 1.088,75 ha, meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Grogol, Polokarto, Nguter, Bendosari, Bulu, Weru, dan Tawang Sari.
- >40% (sangat curam) seluas 525 ha, meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo, yang berada di sebagian Kecamatan Polokarto, Bulu, Weru, dan Tawang Sari.

Kemiringan lahan di Kabupaten Sukoharjo yang memiliki kemiringan datar (0-2%) seluas 36.443 Ha, bergelombang (2-15%) seluas 8.609,25 Ha, curam (15-40%) seluas 1.088,75 dan sangat curam seluas 525 Ha. Sedangkan untuk ketinggian tanah perkecamatan di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.3
Ketinggian Wilayah Per Kecamatan

Kecamatan		Ketinggian dari permukaan air laut
1		2
1.	Weru	97 – 216
2.	Bulu	113 – 693
3.	Tawang Sari	111 – 172
4.	Sukoharjo	95 – 99
5.	Nguter	94 – 137
6.	Bendosari	101 – 107
7.	Polokarto	103 – 118
8.	Mojolaban	94 – 101
9.	Grogol	89 – 96
10.	Baki	89 – 101
11.	Gatak	103 – 117
12.	Kartasura	91 – 144

Sumber: BPN Kab. Sukoharjo

Tata guna lahan di Kabupaten Sukoharjo meliputi sebagai berikut :

a. Lahan Bukan Sawah

Lahan Bukan Sawah di Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2018 seluas 26.049 Ha yang terdiri dari lahan pekarangan seluas 16.881 Ha, lahan tegal/kebun seluas 4.117 Ha, dan lahan lainnya seluas 5.150 Ha.

b. Lahan Persawahan

Lahan persawahan di Kab. Sukoharjo pada Tahun 2018 seluas 21.518 Ha yang terbagi atas sawah teririgasi seluas 18.684 Ha dan sawah tadah hujan seluas 1.834 Ha.

c. Kawasan Industri

Lokasi kawasan peruntukan industri di Kabupaten Sukoharjo yaitu:

- Kawasan industri besar diarahkan ke kawasan industri di Kecamatan Nguter dengan luas kurang lebih 462 hektar.
- Kawasan industri menengah memiliki luas kurang lebih 354 hektar berada di Kecamatan Grogol, Kecamatan Gatak, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Baki, Kecamatan Nguter, Kecamatan Weru, dan Kecamatan Tawang Sari;
- Industri kecil dan mikro berada di Kecamatan Kartasura, Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Sukoharjo.

d. Perairan

Keadaan hidrologi ditunjukkan oleh keberadaan sungai, mata air, dan waduk yang terdapat di Kabupaten Sukoharjo. Keberadaan sungai di Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian dari Daerah Pengembangan Sungai (DPS) Solo Hulu, Samin, dan Dengkeng; yang meliputi Sungai Bengawan Solo, Sungai Dengkeng, Sungai Brambang, Sungai Jlantah, Sungai Samin, Sungai Ranjing, dan Sungai Walikan.

Sumber air di Kabupaten Sukoharjo berasal dari Waduk Gajah Mungkur dan Sungai Bengawan Solo dan anak sungai yang sebagian besar dimanfaatkan untuk pertanian. Dari sumber air tersebut, terbagi dalam 4 daerah irigasi, yaitu: 1).Daerah Irigasi Jumeneng; 2).Daerah Irigasi Colo Timur; 3).Daerah Irigasi Trani dan 4).Daerah Irigasi Colo Barat.

Tabel I.4
Nama dan Volume Air Waduk/Embung di Kab. Sukoharjo

No.	Nama	Volume (m3)	Luas (m2)	Kedalaman (m)
1	2	3	4	5
1	Embung Ponowaren	4,000	2,000	2,00
2	Embung Kenep	4,800	1,600	3,00
3	Embung Penggik	3,200	800	4,00
4	Embung Beji	7,500	2,500	3,00
5	Embung Grogol	7,000	3,500	2,00
6	Embung Kriwen	6,000	2,000	3,00
7	Waduk Mulur	250,000	1.412.600	2,50

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.

c. Jumlah Penduduk

Dengan luas wilayah sebesar 466,66 Km². Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yang berdasarkan Data Semester II sebanyak 898.634 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 449.776 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 448.868 jiwa. Jumlah penduduk dimasing-masing kecamatan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.5
Rekapitulasi Data Kependudukan Per Kecamatan dan
Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2021

No	Nama	Pria		Wanita		Jumlah	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%
1	WERU	28.719	0,06	28.832	6,42	57.551	6,40
2	BULU	18.937	0,04	18.401	4,10	37.338	4,15
3	TAWANGSARI	28.293	0,06	27.896	6,21	56.189	6,25
4	SUKOHARJO	48.702	0,11	48.559	10,82	97.261	10,82
5	NGUTER	27.787	0,06	27.340	6,09	55.127	6,13
6	BENDOSARI	31.830	0,07	31.824	7,09	63.654	7,08
7	POLOKARTO	43.151	0,10	42.786	9,53	85.937	9,56
8	MOJOLABAN	45.721	0,10	45.878	10,22	91.599	10,19
9	GROGOL	60.447	0,13	60.266	13,43	120.713	13,43
10	BAKI	35.402	0,08	35.086	7,82	70.488	7,84
11	GATAK	26.561	0,06	26.616	5,93	53.177	5,92
12	KARTASURA	54.216	0,12	55.384	12,34	109.600	12,20
Jumlah		449.766	1,00	448.868	100,00	898.634	99,97
Jumlah Total		449.766	1,00	448.868	100,00	898.634	99,97

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 yang sebesar 911.966 jiwa sedangkan pada tahun 2021 sebesar 898.634, berarti ada penurunan sebesar 0.99%.

Tabel dibawah ini menunjukkan komposisi penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 berdasarkan usia.

Tabel I.6
Komposisi penduduk Sukoharjo berdasarkan
usia Tahun 2021

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5
1	0 – 4 tahun	29.456	27.643	57.099
2	5 – 9 tahun	34.863	32.699	67.562
3	10 – 14 tahun	37.215	34.897	72.112
4	15 – 19 tahun	34.313	32.468	66.781
5	20 – 24 tahun	34.039	32.719	66.758
6	25 – 29 tahun	33.364	32.495	65.859
7	30 – 34 tahun	31.072	30.123	61.195
8	35 – 39 tahun	34.322	33.974	68.296
9	40 – 44 tahun	35.921	35.857	71.778
10	45 – 49 tahun	32.354	32.855	65.209
11	50 – 54 tahun	29.192	30.906	60.098
12	55 – 59 tahun	25.915	28.373	54.288
13	60 – 64 tahun	21.700	22.349	44.049
14	65 – 69 tahun	15.414	15.732	31.146
15	70 – 74 tahun	9.412	10.648	20.060
16	≥ 75 tahun	11.214	15.130	26.344
TOTAL				898.634

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Tabel I.7 Jumlah Desa/Kelurahan

NO	KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH TOTAL
		DESA	KEL	
1	2	3	4	5
1	WERU	13	-	13
2	BULU	12	-	12
3	TAWANGSARI	12	-	12
4	NGUTER	16	-	16
5	SUKOHARJO	-	14	14
6	BENDOSARI	13	1	14
7	POLOKARTO	17	-	17
8	MOJOLABAN	15	-	15
9	GROGOL	14	-	14
10	BAKI	14	-	14
11	GATAK	14	-	14
12	KARTASURA	10	2	12
JUMLAH				167

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo sebanyak 7.014 PNS. Dengan rincian jumlah PNS laki-laki sebanyak 2.871 PNS dan jumlah PNS perempuan sebanyak 4.143 PNS.

Rincian data PNS di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.8
Data PNS Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Menurut Unit Kerja Tahun 2021

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			L	P
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	120	75	45
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	34	24	10
3	Inspektorat	36	22	14
4	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	39	21	18
5	Badan Keuangan Daerah	73	46	27
6	Badan Perencanaan, Penelitiandan Pengembangan Daerah	29	15	14
7	Dinas Sosial	32	20	12
8	Dinas Pangan	22	11	11
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	32	16	16
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	22	16	6
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.988	1.536	2.452
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	29	15	14
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	130	109	21
14	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	42	30	12
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30	12	18

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			L	P
1	2	3	4	5
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	25	16	9
17	Dinas Kesehatan	1.062	177	885
18	Dinas Perhubungan	47	36	11
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	34	26	8
20	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22	10	12
21	Dinas Lingkungan Hidup	78	65	13
22	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	95	58	37
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	46	25	21
24	Dinas Pertanian dan Perikanan	134	73	61
25	Satuan Polisi Pamong Praja	80	71	9
26	Rumah Sakit Umum Daerah	404	129	275
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	6	2
28	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	17	10	7
29	Kecamatan Sukoharjo	99	62	37
30	Kecamatan Polokarto	19	17	2
31	Kecamatan Nguter	17	11	6
32	Kecamatan Weru	14	10	4
33	Kecamatan Bulu	15	13	2

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			L	P
1	2	3	4	5
34	Kecamatan Tawang Sari	16	13	3
35	Kecamatan Mojolaban	17	13	4
36	Kecamatan Grogol	14	6	8
37	Kecamatan Bendosari	20	14	6
38	Kecamatan Kartasura	15	10	5
39	Kecamatan Baki	17	9	8
40	Kecamatan Gatak	17	9	8
	JUMLAH	7.014	2.871	4.143

Sumber : dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel I.9
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
1	2		3	4	5
I.	PENDAPATAN DAERAH		2.023.068.760.600	2.119.543.415.538	104,77%
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		420.628.098.600	528.264.139.902	125,59%
	a.	Pajak Daerah	194.150.000.000	234.425.731.615	120,74%
	b.	Retribusi Daerah	20.686.733.600	18.274.725.507	88,34%
	c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.782.213.000	34.782.214.740	100,00%
	d.	Lain-lain PAD yang Sah	171.009.152.000	240.781.468.040	140,80%

2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.531.289.862.000	1.520.527.625.636	99,30%
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.349.793.507.000	1.345.610.639.075	99,69%
	b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	181.496.355.000	174.916.986.561	96,37%
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	71.150.800.000	70.751.650.000	99,44%
	a. Pendapatan Hibah	3.000.000.000	2.997.000.000	99,90%
	b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	68.150.800.000	67.754.650.000	99,42%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo

1. Realisasi Belanja menurut jenis Belanja

Tabel I.10
Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	2	3	4	5
A.	BELANJA DAERAH	2.356.534.359.600	2.089.455.558.854	88,67%
I.	BELANJA OPERASI	1.597.968.424.191	1.472.694.410.236	92,16%
	a. Belanja Pegawai	866.264.566.623	830.659.026.029	95,89%
	b. Belanja Barang dan Jasa	657.600.849.904	575.798.113.836	87,56%
	c. Belanja Subsidi	1.478.510.864	624.509.495	42,24%
	d. Belanja Hibah	53.163.101.000	48.541.701.076	91,31%
	e. Belanja Bantuan Sosial	19.461.395.800	17.071.059.800	87,72%

NO	URAIAN		TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	2		3	4	5
II.	BELANJA MODAL		408.337.387.505	283.872.873.485	69,52%
	a.	Belanja Modal Tanah	69.976.000.000	57.390.168.126	82,01%
	b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.021.224.362	66.022.615.391	79,52%
	c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.609.886.790	68.356.082.100	55,30%
	d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	128.013.113.400	88.714.959.040	69,30%
	e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.701.162.953	3.389.048.828	91,57%
	f.	Belanja Modal Aset Lainnya	16.000.000	-	0,00%
III.	BELANJA TIDAK TERDUGA		16.047.746.304	405.163.533	2,52%
	a.	Belanja Tidak Terduga	16.047.746.304	405.163.533	2,52%
IV.	BELANJA TRANSFER		334.180.801.600	332.483.111.600	99,49%
	a.	Belanja Bagi Hasil	21.575.087.000	20.319.837.000	94,18%
	b.	Belanja Bantuan Keuangan	312.605.714.600	312.163.274.600	99,86%
B.	PEMBIAYAAN		383.441.599.000	385.290.056.318	100,48%
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		358.453.599.000	358.453.599.194	100,00%
	a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	358.453.599.000	358.453.599.194	100,00%
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		24.988.000.000	26.836.457.124	107,40%
	a.	Pembentukan Dana Cadangan	-	1.848.466.542	0,00%
	b.	Penyertaan Modal Daerah	24.988.000.000	24.987.990.582	100,00%

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	2	3	4	5

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo

Tabel I.11
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo **Tahun**
2021

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	2	3	4	5
B.	PEMBIAYAAN	383.441.599.000	385.290.056.318	100,48%
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	358.453.599.000	358.453.599.194	100,00%
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	358.453.599.000	358.453.599.194	100,00%
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	24.988.000.000	26.836.457.124	107,40%
	a. Pembentukan Dana Cadangan	-	1.848.466.542	0,00%
	b. Penyertaan Modal Daerah	24.988.000.000	24.987.990.582	100,00%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah;

Beberapa permasalahan strategis dalam pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 yang juga tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan penduduk

Elastisitas terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat. Hal ini terjadi antara lain karena sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi seperti sektor keuangan dan jasa bukan merupakan sektor yang menjadi andalan penghidupan bagi masyarakat miskin dan rentan. Sebagai contoh, sektor pertanian yang menjadi tumpuan penghidupan mayoritas tenaga kerja, khususnya tenaga kerja miskin, memiliki produktivitas yang rendah serta kontribusi terhadap PDRB yang cenderung menurun. Berdasarkan data BPS Tahun 2020 persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 sebesar 7,68 persen, terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 7.14 persen, tahun 2018 sebesar 7,41 persen. Kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 tersebut merupakan salah satu adanya dampak corona virus disease 2019 yang terjadi di Indonesia.

Jumlah pencari kerja terdaftar dalam lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Sampai dengan tahun 2020, pencari kerja yang terdaftar sebanyak 2.977 orang. Di tahun 2020 pencari kerja terbanyak di lulusan SLTA/SMK sebanyak 2006 orang. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk

usia 15 tahun ke atas periode tahun 2016-2019 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 sebesar 63,98 %, rasionya menurun dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 65,85%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama tahun 2016-2020 cenderung menurun, dan mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 66,08 % menjadi 68.74% pada tahun 2020. Penurunan Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2016-2018 dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan dan berubahnya status penduduk yang termasuk dalam kategori angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja.

Perkembangan TPT Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan dari 2,78 pada tahun 2016 sampai dengan 2,27 pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan pada angka 6,93. Kenaikan tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 terjadi kenaikan yang cukup signifikan disebabkan karena corona virus disease di akhir 2020 sehingga banyak terjadi PHK di sektor industri mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran. Meskipun terjadi kenaikan, TPT Kabupaten Sukoharjo Relatif berada di bawah TPT Nasional.

Penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Isu strategis bidang kependudukan adalah pengendalian pertumbuhan penduduk. Hak identitas hukum kependudukan menjadi hak semua penduduk. Tantangan bagi pemerintah kabupaten Sukoharjo adalah bagaimana melayani administrasi bagi semua warga dengan tepat dan cepat. Terkait era dengan pengendalian penduduk adalah pengembangan kualitas

penduduk sejak dari fondasi keluarga. Ketahanan keluarga serta pengendalian perkembangan penduduk sangat strategis untuk dikelola supaya daya dukung ruang dan lingkungan memadai untuk lingkungan layak huni. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menimbulkan beban kesejahteraan jika tidak diikuti kemampuan ekonomi yang baik. Namun jika produktivitas ekonomi penduduk, dan ketahanan keluarga baik, maka dapat menjadi modal pembangunan yang kuat.

2. Ketahanan Pangan

Isu ketahanan pangan merupakan isu strategis yang sangat penting mengingat Indonesia sebagai Negara agraris yang mempunyai potensi pangan yang sangat besar. Pembangunan ketahanan pangan nasional dalam RPJPN 2005–2025, Pemerintah bertumpu pada kemandirian pangan yang diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman dan halal yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya lokal.

Isu ketahanan pangan mencakup produksi pangan, ketersediaan, keterjangkauan baik fisik maupun ekonomi, keamanan pangan, ketahanan pangan berbasis potensi lokal serta pengendalian harga pangan. Konsep ketahanan pangan tersebut belum cukup harus dikaitkan dengan isu kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan adalah hak rakyat sebagai bagian dari NKRI, untuk menentukan sendiri kebijakan dan strategi produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang sehat dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya lokal, dengan tetap memperhatikan metode yang

ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perlindungan serta dukungan terutama untuk mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin yang rawan pangan. Menjaga kontribusi kabupaten Sukoharjo sebagai lumbung pangan provinsi maupun nasional merupakan salah satu prioritas kabupaten Sukoharjo ditengah kondisi tingginya alih status lahan dan menurunnya jumlah petani di Kabupaten Sukoharjo.

3. Ketahanan Energi

Semakin terbatasnya energi fosil dan kelangkaan energi terutama energi listrik di beberapa daerah di Indonesia. Isu ketahanan energi menjadi salah satu kunci kebijakan pemerintah, untuk menemukan terobosan baru dalam pengadaan energi, yang didukung dengan pengembangan teknologi tepat guna sehingga secara berangsur-angsur ketergantungan terhadap energi fosil terutama di Jawa Tengah dapat tereduksi dan menggeser paradigma pemanfaatan energi tak terbarukan menjadi pemanfaatan energi baru terbarukan.

4. Peningkatan Daya Saing

Seiring dengan pemberlakuan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka isu peningkatan daya saing menjadi isu yang sangat strategis untuk diperhatikan. Isu yang berkaitan dengan peningkatan daya adalah isu penguatan sistem inovasi daerah (SIDA), kelembagaan koperasi UMKM dan FEDEP melalui peningkatan kualitas SDM dan kualitas dan kuantitas produksi, kemitraan bapak angkat, pengembangan klaster UMKM, peningkatan

aksesibilitas UMKM terhadap lembaga perbankan, pengembangan jejaring kemitraan. Peningkatan daya saing juga perlu dikaitkan dengan peningkatan produktivitas hasil pertanian, peternakan, perikanan dan pengolahan hasil pertanian berbasis teknologi tepat guna. Kebijakan investasi nyaman, aman dan ramah pasar yang berbasis pada keuangan daerah dan kebijakan investasi juga menjadi isu yang perlu diperhatikan dalam peningkatan daya saing.

5. Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan syarat untuk peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan koneksitas regional dan nasional yang mendukung penguatan posisi Kabupaten Sukoharjo. Infrastruktur tidak terbatas pada infrastruktur fisik namun juga terintegrasi dengan infrastruktur non fisik dan teknologi informasi, sehingga ke depan partisipasi, transparansi dan ketepatan manfaat akan menjadi lebih baik. Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan antar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sektor yang sinergis dengan rencana tata ruang.

Pengembangan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi hal penting dalam mendukung perwujudan desa berdikari, karena melalui teknologi informasi yang mampu menjangkau hingga tingkat desa, maka komunikasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan lebih terbuka dan intensif.

6. Tuntutan Pemerintah yang Baik

Tuntutan akan terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih masih menjadi isu nasional yang mengemuka. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap lingkungan strategis, baik pada skala nasional maupun regional. Tuntutan tersebut meliputi:

a. Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

Tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah menjalin koordinasi lintas sektor terkait yaitu Kesbanglinmas, Kantor Polisi, dan pengaduan masyarakat penyebab gangguan dan ketertiban sebagai upaya mengantisipasi adanya gangguan ketertiban; dan menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk melembagakan rasa peduli keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga bisa mengantisipasi munculnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini mengingat Kabupaten Sukoharjo dianggap sebagai “sarang” teroris dan karena penyebaran ideologi ekstrim tidak mengenal batas administratif, sehingga perlu diwaspadai adanya kehadiran entitas yang potensial menimbulkan keresahan masyarakat.

b. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didukung Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi yang senantiasa mengadopsi perkembangan yang ada, dalam rangka memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang membutuhkan aplikasi teknologi informasi dibutuhkan untuk pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan administrasi ketenagakerjaan, publikasi dan informasi profil pelayanan dan karakteristik daerah. Kondisi penggunaan teknologi informasi menghadapi kendala dalam hal kurangnya perangkat keras, kurangnya tenaga operasional. Jadi, tantangan yang dihadapi pemerintah Sukoharjo adalah bagaimana mampu menyediakan perangkat teknologi informasi, dan mengoptimalkan pemanfaatannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu dari segi kecepatan pelayanan, kelengkapan dan kemudahan informasi diakses pihak pengguna informasi, dan efisiensi biaya. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi tergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang mengoperasikan dan sosialisasi kemanfaatannya pada semua stakeholders yang terkait dengan kebutuhan pelayanan yang disediakan. Tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo terkait dengan teknologi informasi adalah penambahan perangkat keras yang diperlukan, pelatihan sumber daya manusia pengguna, sosialisasi kepada masyarakat dan

stakeholder terkait sistem layanan yang disediakan pemerintah berbasis teknologi informasi.

c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik yang demokratis

Tertanamnya kesadaran masyarakat yang tinggi baik dari sisi pentingnya peran mereka dalam menentukan masa depan arah pembangunan maupun kesadaran untuk mewujudkan situasi yang kondusif dalam rangka mendukung penyelenggaraan kehidupan politik yang demokrasi. Tantangan yang dihadapi pemerintah bagaimana secara substantif memberi ruang partisipatif masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan yang diambil pemerintah. Penyusunan regulasi yang memberi payung bagi keterlibatan masyarakat dalam mekanisme demokrasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo merupakan tantangan yang perlu diperhatikan pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

d. Terwujudnya pelayanan informasi dan komunikasi pemerintah daerah yang optimal

Pemerintah dan masyarakat memerlukan mekanisme komunikasi yang tepat; tepat cara, tepat waktu, dan tepat isi atau tepat pesan informasi. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu bagaimana memfasilitasi mekanisme dan sarana untuk menciptakan budaya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Tantangan bagi pemerintah menyediakan media komunikasi yang beragam sesuai karakteristik kelompok masyarakat yang ada. Media komunikasi dan informasi yang perlu

dioptimalkan sebagai wahana informasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat antara lain melalui web/internet, media koran, radio, TV lokal, papan pengumuman, informasi terstruktur melalui lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dan forum warga yang mungkin akan berkembang dalam kurun waktu kedepan.

Hasil yang diharapkan tidak hanya aparat pemerintah namun masyarakat pun juga mendapat kemudahan untuk memperoleh informasi dengan lengkap dan cepat terhadap kebutuhan mereka akan pelayanan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan peran media massa yang semakin bertambah dan semakin meningkat kualitasnya.

e. Terbangunnya perpustakaan daerah yang modern

Seiring dengan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan lengkap, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mampu mewujudkan sebuah perpustakaan yang representatif, baik secara fisik dalam bentuk pembangunan gedung dan penambahan bahan pustaka, maupun berupa dukungan sarana prasarana perangkat multimedia yang modern dengan memanfaatkan jaringan komunikasi yang telah terbangun.

f. Meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan HAM

Memberikan perlindungan HAM dan hak-hak dasar masyarakat merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah terkait dengan upaya membangun sistem hukum yang adil dan dapat diandalkan bagi semua kelompok masyarakat.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan penataan hukum, pemantapan pelaksanaan hukum dan budaya hukum yang pada akhirnya tertuju pada perlindungan hak asasi manusia (HAM). Tantangan praktis yang perlu dijawab pemerintah adalah meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan disiplin aparatur pemerintah melalui penerapan peraturan dan perundangan-undangan yang menjunjung tinggi azas keadilan dan kebenaran dengan menyiapkan peraturan daerah dan perangkat hukum daerah, yang pada gilirannya akan berdampak pada perwujudan penegakan hukum dan hak asasi manusia, serta mewujudkan aparatur hukum yang profesional.

7. Penurunan Kualitas Lingkungan, Emisi Gas Rumah Kaca serta frekuensi dan intensitas bencana alam

Penurunan kualitas lingkungan dan emisi rumah kaca akibat pengrusakan hutan, pencemaran lingkungan, aktivitas industri. Di samping meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana alam membutuhkan penanganan yang lebih intensif. Ancaman terhadap meningkatnya degradasi lingkungan dapat terjadi karena kesalahan dalam

memformulasikan pengertian otonomi daerah dengan melakukan pembangunan yang berdalih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) apalagi tidak mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Adanya kebijakan yang berorientasi pada peningkatan ekonomi tanpa memperhatikan aspek lingkungan, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan, serta pelanggaran pemanfaatan ruang baik di daerah hulu, tengah, maupun hilir akan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang pada akhirnya akan menurunkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ancaman lainnya yang memperparah kerusakan lingkungan adalah aktivitas pembangunan yang dapat merusak sungai, air tanah, perambahan, dan pembakaran hutan. Alih fungsi lahan menyebabkan rusaknya habitat flora dan fauna sehingga dapat mengancam kelestarian sumberdaya keanekaragaman hayati.

Tantangan yang dihadapi adalah menjaga keseimbangan lingkungan daerah bukit, dataran dan kawasan hutan menjadi satu kesatuan ekologis yang dapat dikelola secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat. Kondisi topografis tersebut berpotensi terhadap permasalahan bahaya tanah longsor. Hal ini perlu diantisipasi sejak dini dan ditetapkan mekanisme pengelolaannya secara tepat. Pertumbuhan lahan kritis harus diupayakan seminimal mungkin.

Peluang pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam tahapan perencanaan bisa dimulai dengan upaya untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan kajian lingkungan hidup yang lebih terfokus pada kajian yang bersifat lebih strategis yakni di tingkat kebijakan, rencana dan program. Penerapan KLHS akan diarahkan pada pemberdayaan rencana pembangunan yang bersifat strategis (RPJP, RPJM, RTRW, dan sebagainya) yang menekankan pada proses kerjasama dan partisipatif dari seluruh komponen terkait/stakeholder secara tripartit (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha). Dengan diterapkannya KLHS ini, juga merupakan landasan didalam mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip berkelanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat sinergis dari proses perencanaan pembangunan. Potensi yang dimiliki kabupaten Sukoharjo adalah sumberdaya alam, budaya, adat istiadat/kearifan lokal yang cukup besar. Apabila potensi-potensi tersebut dimanfaatkan dengan baik melalui implementasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara konsisten, maka akan menjadi peluang untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Sukoharjo yang berwawasan lingkungan.

8. Pengembangan kawasan strategis melalui kerjasama antar wilayah

Dengan keterbatasan sumber daya alam masing-masing daerah, maka kerjasama sinergis pengelolaan potensi wilayah perlu ditingkatkan misalnya dengan pengembangan ekonomi wilayah. Oleh karena itu maka pengembangan kawasan strategis seperti SUBOSUKA WONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten), merupakan

isu strategis yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

9. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Konsistensi dalam penegakan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah sebuah komitmen bersama untuk mengendalikan alih fungsi lahan, disamping perlu adanya pemanfaatan lahan yang belum produktif menjadi lahan sawah dan perkebunan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung. Masih rendahnya ketaatan pelaku pembangunan terhadap rencana tata ruang mengakibatkan konflik pemanfaatan fungsi lindung maupun budidaya sesuai dengan RTRW.

10. Optimalisasi Pengembangan Pariwisata

Potensi Pariwisata yang tidak begitu besar di Kabupaten Sukoharjo berupa obyek wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dan wisata kuliner belum dikembangkan secara maksimal untuk bisa menarik wisatawan dan peningkatan potensi pengembangan ekonomi wilayah.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah;

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Sukoharjo 2016 – 2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2016 – 2021 adalah :

“TERUS MEMBANGUN SUKOHARJO YANG LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur keberhasilannya pada akhir tahun RPJMD tersebut berlangsung, makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut.

SEJAHTERA:

Mengandung makna dalam lima tahun pelaksanaan RPJMD 2016 – 2021 akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;

MAJU :

Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, social, dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia, serta berwawasan ke depan;

BERMARTABAT :

Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika, moral, maupun norma agama, dan norma masyarakat;

PROFESIONAL :

Mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan menerapkan ciri-ciri pemerintahan yang baik (Partisipatif, Akuntabel, Transparan dan Efisien) serta bersih (bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sukoharjo 2016-2021 tersebut, maka dijabarkan dalam 5 (lima) misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Sukoharjo:

- a. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan.
- b. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.
- c. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah
- d. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.
- e. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tentram, Aman dan Dinamis

c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah;

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

Tabel 1.12
Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

No.	IKU	Capaian IKU (%)	Anggaran	Realisasi
1.1.a	Nilai Laporan Evaluasi SAKIP Pemda	100,12	2.381.314.300	2.155.487.849
1.1.b	Nilai EKPPD	93,18	1.365.000.000	1.279.274.100
1.1.c	Opini BPK terhadap LKPD	100	353.698.856.768	186.709.448.613
1.2.a	Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	N/A	31.665.000	31.665.000
1.2.b	Jumlah Pelanggaran dalam Pemilu dan Pilkada	N/A		
2.1.a	Indeks keterbukaan informasi publik	73,25	1.914.650.000	1.856.215.000
2.2.a	Prosentase Aspirasi masyarakat yang diakomodir	100	160.000.000	158.540.000
2.2.b	Prosentase Pengaduan Masyarakat (yang difasilitasi)	125	50.000.000	48.964.000
3.1.a	Angka Melek Huruf	99,36	81.505.362.500	76.113.711.164
3.1.b	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	118,67		
3.2.a	Angka Usia Harapan Hidup	100,16		
3.2.b	Angka Kematian Ibu	30,78	457.295.927.502	393.446.890.319
3.2.c	Angka Kematian Bayi	140,77		
4.1.a	Penurunan Angka Kemiskinan	-375	9.330.365.600	8.962.880.700
4.2.a	Indeks Pembangunan Gender	99,4	740.000.000	618.094.000
4.2.b	Prosentase cakupan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak	100	721.830.000	409.535.200
4.3.a	Tingkat pengangguran terbuka	108,54	1.217.193.700	1.116.820.200
4.3.b	Tingkat partisipasi angkatan kerja	99,61		
5.1.a	Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	206,67	41.064.000.000	41.064.000.000
5.2.a	Cakupan pelayanan air minum	95,09	2.800.184.700	2.758.453.976
5.3.a	Cakupan pelayanan sanitasi	91,73	1.872.949.000	1.786.008.000
5.3.b	Cakupan layanan persampahan	110,95	15.079.238.000	13.907.263.000
6.1.a	Tingkat ketersediaan pangan	108,84	2.882.354.000	2.828.153.253
6.1.b	Tingkat konsumsi pangan (kalori)	100		
7.1.a	Indeks kualitas lingkungan hidup	125,77	284.930.000	260.539.000
7.2.a	Indeks Resiko Bencana	98,91	1.441.500.000	1.268.892.999
7.2.b	Tingkat Kecepatan Penanganan Bencana (respon time)	93,33	1.289.920.000	1.203.324.000
8.1.a	Realisasi investasi PMA/ PMDN	141,72	1.144.396.000	1.064.834.000
9.1.a	Prosentasi kontribusi sektor industri pengolahan, makanan dan minuman dalam PDRB	93,34	538.000.000	454.775.000
9.1.b	Prosentase kontribusi sektor pertanian dalam PDRB	87,02	14.024.759.000	13.897.462.778
9.1.c	Prosentase kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB		20.569.804.000	10.018.136.992
10.1.a	Prosentase ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik	111	72.763.423.400	44.019.952.200
10.1.b	Prosentase jembatan dalam kondisi baik	101,84	16.674.898.200	9.203.260.140
10.1.c	Angka fatalitas korban kecelakaan	132,86	31.037.836.000	30.244.652.294

Strategi Pembangunan Daerah

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan;

Strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a. Lembaga minim struktur kaya fungsi;
- b. Peningkatan kualitas aparatur dan kesesuaian dengan bidang keahlian;
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan daerah;
- d. Meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi kinerja pembangunan;
- e. Mengaktifkan Perangkat Daerah untuk melaksanakan keterbukaan informasi kinerja;
- f. Penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan secara terbuka;

2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.

Strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a. Peningkatan aksesibilitas dan peran aktif untuk pencapaian kualitas keluarga;
- b. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas yang berkarakter;
- c. Peningkatan jumlah fasilitas dan jenis layanan kesehatan;
- d. Intervensi langsung kepada PMKS;
- e. Melaksanakan intervensi langsung terhadap kebutuhan dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat miskin;
- f. Penguatan kapasitas perempuan;
- g. Pemberian pelatihan yang cepat dan tersertifikasi;
- h. Pemerataan pembangunan pemukiman yang berkualitas dan berkeadilan;
- i. Penyediaan air minum secara komunal;
- j. Peningkatan pengelolaan sanitasi dan persampahan

3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah;

Strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas;
- b. Menjaga ketersediaan bahan utama pangan yang terjangkau;
- c. Meningkatkan ketersediaan pada level kelompok tani;
- d. Intervensi langsung dalam proses di baik pra maupun pasca panen;
- e. Mengurangi penurunan kualitas lingkungan hidup;
- f. Meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana;

- g. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan informasi investasi;
- h. Meningkatkan kinerja industri baik dalam kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan;
- i. Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan Koperasi dan UMKM serta akses permodalan;
- j. Peningkatan kualitas tradisional dengan standar tinggi;
- k. Peningkatan kualitas dan kuantitas pada jalur utama dan penghubung strategis.

4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat;

Strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a. Peningkatan kualitas sarpras ibadah melalui stimulan keswadayaan masyarakat;
- b. Komunikasi antar umat beragama dan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan;
- c. Inventarisasi benda, situs, kawasan budaya yang dilestarikan;
- d. Optimalisasi ruang publik untuk seni dan budaya; Pengembangan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur sosial dan budaya;
- e. Meningkatkan kualitas kelembagaan pemuda dalam rangka menuju kemandirian;
- f. Meningkatkan kualitas Sumber Daya dalam bidang keolahragaan.

5. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tentram, Aman dan Dinamis

Strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a. Meningkatkan komunikasi diantara seluruh *stakeholder*; Mempercepat penyelesaian permasalahan dalam koridor kebijakan lokal dan hukum secara komprehensif;
- b. Optimalisasi kesepatakan-kesepatan yang ada dalam rangka penciptaan sinergitas dan peningkatan kualitas pembangunan daerah.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki 139 Program, 304 kegiatan dan 1.075 kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan pada tahun 2021, tindak lanjut yang diharapkan untuk pelaksanaan kedepannya adalah:

1. Mengoptimalkan capaian kinerja program yang ada;
2. Program prioritas daerah menjadi program prioritas/unggulan Perangkat Daerah, sehingga dalam pelaksanaannya harus lebih dimaksimalkan dibanding program yang lainnya (termasuk dari sisi penganggaran);
3. Dalam mengoptimalkan capaian kinerja, Perangkat Daerah perlu mengembangkan inovasi baru dalam aktivitas/kegiatan/sub kegiatannya.
4. Memaksimalkan koordinasi dan kerjasama antar OPD untuk lebih mensinergikan pelaksanaan program-program yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran daerah .

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 298 disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM.

Selanjutnya di dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan Rakyat
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
dan
6. Sosial.

Untuk dapat mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar, berdasarkan standar hidup minimal yang ditetapkan sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mengintegrasikan SPM ke dalam Dokumen Perencanaan yaitu dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021; Renstra, RKPD, Renja Perangkat Daerah dan Dokumen Penganggaran. Sedangkan untuk melaksanakan koordinasi dalam penerapan SPM sesuai amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 130/64 Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sukoharjo.

Muatan Standar Pelayanan Minimal telah terintegrasi dalam kebijakan umum Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tertuang dalam RPMJD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2021.

1. Bidang Pendidikan

Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan telah terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan
SPM Bidang pendidikan Tahun 2021

Misi ke	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Target Capaian Tahun 2021 (%)
1	2	3	4	5
Misi 2 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Mewujudkan Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya akses Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	45%
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatnya akses Pelayanan Pendidikan Dasar Sembilan tahun	100%
		Program Pendidikan Kesetaraan	Meningkatnya Akses Pelayanan Pendidikan Kesetaraan	100%
		Program Pendidikan Menengah Pertama	Meningkatnya Akses Pelayanan Pendidikan Menengah Pertama	100%

2. Bidang Kesehatan

Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan telah terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan
SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020

Misi ke	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Target Capaian Tahun 2020 (%)
1	2	3	4	5
Misi 2 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan Komplikasi Kebidanan ditangani, Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	100%
			Menurunnya Angka Kematian Ibu di Th, 2020 menjadi 102/100.000 KH	1 tahun
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan Komplikasi Kebidanan ditangani, Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	100%
			Menurunnya Angka Kematian Ibu di Th, 2020 menjadi 102/100.000 KH	1 tahun
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Presentasi Kunjungan Neonatal Pertama (KN1), Pelayanan Bayi Baru Lahir, Kesehatan Balita, Pra Sekolah dan Kesehatan Usia dasar	100%

			Presentasi SDIDTK	100%
			Presentasi MTBS	100%
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Presentasi Kunjungan Neonatal Pertama (KN1), Pelayanan Bayi Baru Lahir, Kesehatan Balita, Pra Sekolah dan Kesehatan Usia dasar	100%
			Presentasi SDIDTK	100%
			Presentasi MTBS	100%
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Cakupan Desa dengan dengan Pelayanan Pencegahan Penyakit Tidak Menular terpadu (Posbindu)	35 Pelayanan pada usia Produktif, Penderita hipertensi, DM dan ODGJ
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	100%
			Meningkatnya cakupan Posyandu Lansia aktif	62%
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Cakupan Desa dengan dengan Pelayanan Pencegahan Penyakit Tidak Menular terpadu (Posbindu)	35 Pelayanan pada usia Produktif, Penderita hipertensi, DM dan ODGJ
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Cakupan Desa dengan dengan Pelayanan Pencegahan Penyakit Tidak Menular terpadu (Posbindu)	35 Pelayanan pada usia Produktif, Penderita hipertensi, D M dan ODGJ

		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Cakupan Desa dengan dengan Pelayanan Pencegahan Penyakit Tidak Menular terpadu (Posbindu)	35 Pelayanan pada usia Produktif, Penderita hipertensi, DM dan ODGJ
		Program Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular	Angka Sukses rate TB	85%
			Penemuan terduga TB	35%
			ODHA on ART	20%
		Program Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular	Angka Sukses rate TB	85%
			Penemuan terduga TB	35%
			ODHA on ART	20%

3. Bidang Pekerjaan Umum

Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum telah terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021

Misi ke	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Target Capaian Tahun 2021 (%)
1	2	3	4	5
Misi 2 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah	Tersedianya sarana dan prasarana air minum dan air limbah	93

4. Bidang Perumahan Rakyat

Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat telah terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.14
Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung
Pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat Tahun 2021

Misi ke	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Target Capaian Tahun 2021 (%)
1	2	3	4	5
Misi 4 Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Program Pengembangan Perumahan	Prosentase pelayanan SPM Perumahan Rakyat	100 %

5. Bidang Trantibumlinmas

Pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas Rakyat telah terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.5
Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan
SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2021

Misi ke	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Target Capaian Tahun 2020 (%)
1	2	3	4	5
Misi 2 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Prosentase Desa Tangguh Bencana yang telah dibentuk di daerah rawan Bencana	100 %
			Prosentase Korban yang tertangani secara Cepat	100 %
			Jumlah Rekomendasi Pembangunan Fasilitas Umum dan Rumah terdampak Bencana	85 %
Misi 5 Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenram dan Dinamis	Menciptakan situasi yang kondusif di antara para penegak hukum dan masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	98,10 %
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	97,20 %
			Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	95,20 %

6. Bidang Sosial

Pelaksanaan SPM Bidang Sosial Rakyat telah terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.6
Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan
SPM Bidang Sosial Tahun 2021

Misi ke	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Target Capaian Tahun 2021 (%)
Misi 2 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Peningkatan kemandirian dan kualitas hidup PMKS	1. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.	1. Persentase terfasilitasi manajemen usaha bagi penyandang cacat. 2. Persentase pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma yang tertangani. 3. Persentase terfasilitasinya prasarana kehidupan bagi penyandang cacat.	100 %
		Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar.	100 %
		Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan daerah.	Persentase pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasaran publik bagi penyandang cacat dan lansia.	100 %
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial.	Persentase pendidikan dan pelatihan keterampilan	100 %

			berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.	
		Program Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	Prsentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	100 %

Adapun Arah kebijakan Tahun 2021 yang menjadi prioritas pembangunan untuk Urusan wajib Pelayanan dasar, khususnya yang terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi :

1. Urusan Pendidikan

Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan OPD	KUA 2021 (Rp)
Peningkatan Indeks Pembangunan Daerah (IPM)	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah Pertama	24.482.992.000 81.568.694.000 68.722.398.000
Peningkatan Angka Melek Huruf (Iteracy Rate)	Program Pendidikan Non Formal	2.669.159.000

2. Urusan Kesehatan

Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
1	2	3
Menurunnya Angka Kematian Ibu	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Menurunnya Angka Kematian Ibu	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Menurunnya Angka Kematian Neonatal	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Menurunnya Angka Kematian Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Balita
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Meningkatnya Cakupan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Meningkatnya Cakupan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Meningkatnya Cakupan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
Meningkatnya Cakupan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Meningkatnya Cakupan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

3. Urusan Pekerjaan Umum

Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan OPD	KUA 2020 (Rp)
1	2	3
Penyediaan air minum secara komunal	Peningkatan kuantitas air minum dengan akses umum	269.924.000
Peningkatan Pengelolaan sanitasi dan persampahan	Peningkatan tata kelola lingkungan pemukiman	180.189.000

4. Urusan Perumahan Rakyat

Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan OPD	KUA 2021 (Rp)
1	2	3
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan relokasi.	40.000.000

5. Urusan Trantibumlinmas

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perundang - undangan Daerah - Persentase Penyelesaian gangguan tibum tranmas 	Memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penanganan gangguan dan Tibumtranmas

		Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran
Terwujudnya lingkungan sehat, aman, tangguh, berkelanjutan	Meningkatnya Kapasitas masyarakat dalam Mitigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam menghadapi Bencana melalui Pelayanan Informasi Kebencanaan, - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistic dan peralatan penanganan bencana. - Mewujudkan dan meningkatnya Sistem peringatan dini serta layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan - Mendorong pelibatan Pemangku kepentingan dalam tatakelola penanggulangan bencana

6. Urusan Sosial

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Peningkatan kemandirian dan kualitas hidup PMKS	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS Penyandang Cacat dan Trauma.	1. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma di luar panti sosial
	2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	2. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS khusus Anak Terlantar di luar panti.	2. Pembinaan Para Anak Terlantar

	3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS khususnya bagi anak lanjut usia di luar panti sosial.	3. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan daerah bagi lanjut usia terlantar di luar panti sosial.
	4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS khususnya bagi gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Sosial.	4. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan daerah bagi gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti Sosial.
	5. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota	5. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang memerlukan pelayanan kagawatdaruratan yang berada di daerah yang rawan bencana, baik bencana sosial maupun bencana alam.	5. Pelayanan dan pembinaan kualitas pelayanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang memerlukan pelayanan kagawatdaruratan yang berada di daerah yang rawan bencana, baik bencana sosial maupun bencana alam.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	76,98	77,13	0,15
2	Angka Kemiskinan	7,68	8,23	0,55
3	Angka Pengangguran	6,93	3,32	-3,61
4	Pertumbuhan Ekonomi	-1.70	3,82	5,52
5	PDRB perkapita	40.700.000	42.770.000	2.070.000
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	17,87	17,87	0

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD		
						Elemen Data	Capaian	
		PENDIDIKAN PAUD						
1	Pendidikan	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)		Unit	217		
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	0		
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan		Orang	0		
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	0		
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	1.639		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini		Orang	1.139	
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	644	
		PENDIDIKAN DASAR					
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		Unit	622	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	0	
		3	Jumlah Peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	0	3
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	75.937	4
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah Menengah (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	37.894	5
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	3.972	6
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	1.825	7
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		Orang	4.167	8

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	1.942	
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	3.972	
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	1.825	
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	790	
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	517	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	2.469	
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	1.362	
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	394	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	50	
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	0	
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	0	
		PENDIDIKAN KESETARAAN					
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)		Unit	3	

		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	368	
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	368	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	147	
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	112	
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		Orang	112	
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	4	
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		Orang	4	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD		
						Elemen Data	Capaian	
2	Kesehatan	Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan						
		1	Jumlah RS Rujukan Kab/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		Unit	90		
		2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		Unit	10		
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		buku	14.000		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk antenatal pelayanan		Orang	536		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan Tersedia		buku	14.000		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar		Orang	734		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		lembar	7.500	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuaistandar		Orang	763	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia		lembar	22.575	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Orang	763	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		1	Jumlah dukungan logistik Kesehatan yang tersedia		Jenis	2	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		Orang	238	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Jenis	5	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	68	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia		jenis	4	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	763	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		KIT	167	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	203	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	2	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	201	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	167	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	21	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia		jenis	12	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	88	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar					

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia		jenis	6	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	35	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir					
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/kota (ha)	46.666 Ha	Ha	1.279,2	
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjirdi WS kewenangan Kab/kota (m)	0 Km	M	4.109,50	
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kab/kota (ha)	0 Ha	Ha	0	
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kab/kota (m)	0 ha	M	0	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kab/kota		Ada/Tidak	1	
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kab/kota		Ada/Tidak	1	
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kab/kota		m	5.449	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota					
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/kota (ha)		Ha	1.279,2	
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kab/kota (m)		M	4.109,50	
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kab/kota (ha)		Ha	0	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kab/kota (m)		M	0	
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WSKewenangan kab/kota		Ada/Tidak	1	
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kab/kota		Ada/Tidak	1	
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kab/kota		m	5.449	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi					
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)	m	1.533	
				Panjang jaringan irigasi primer (m)			

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD		
						Elemen Data	Capaian	
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi Sekunder dalam kondisi baik (m)	m	51.330		
				Panjang jaringan irigasi Sekunder (m)				
		3	Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik (m)	m	19		
				Panjang jaringan irigasi Tersier (m)				
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/kota						
		1	Penetapan dokumen RISPAM Kab/Kota		dok	1		
2	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) Kab/kota		Perbup	1				

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/kota penyelenggaraan SPAM		BUMD / UPTD	1	
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		Izin	1	
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.		Kerjasama	1	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic					
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		SR	3.417	
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		SR	656	
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan		SR	4.073	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
			dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T				
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		Rumah	50	
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		Rumah	50	
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		Rumah	790.210	
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atautanki septik	%	87,35	
				rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha			
		8	Kinerja penyediaan pelayanan IPLT akses aman	rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	%	1,96	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
				rumah di wilayah pengembangan IPLT			
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di SPALD T	%	0,35	
				rumah di wilayah pengembangan SPALD T			
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat	%	87,65	
				jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S			
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	jumlah sarana pengangkutan yang tersedia	%	100	
				jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota			

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	jumlah kapasits pengolahan lumpur tinja yang tersedia	%	100	
				jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota			
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD	%	100	
				jumlah rumah yang dilayani @dengan SPALD-T pada kab/kota			
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot	%	100	
				jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S			
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota					

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana yang laik fungsi yang berlaku	%	0	
				Jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana			
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting		Izin	727	
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung		Perda	1	
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung		SK	0	
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		Bangunan	0	
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah Kab/kota		Bangunan	0	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/kota		Bangunan	3443	
		8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah Kab/kota yang dipelihara/dirawat		Bangunan	3443	
		Tingkat kemantapan jalan Kabupaten/Kota					
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/kota		KM	605.120	
		2	Panjang jalan yang dibangun		KM	3.165	
		3	Panjang jembatan yg dibangun		KM	0.16	
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan		KM	12.026	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		KM	0	
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		KM	14.2889	
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi		KM	0.3517	
		8	Panjang jalan yang dipelihara		KM	13.7811	
		9	Panjang jembatan yang dipelihara		KM	0	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi					
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah Kab/kota		kali	0	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah Kab/kota		Orang	998	
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah Kab/kota		Orang	298	
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kota yang aktif dengan data termutakhir		Ada/Tidak	tidak	
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kab/kota yang bersumber dari APBD Kab/kota		aplikasi	1	
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kab/kota yang bersumber dari APBN		aplikasi	1	
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kab/kota yang bersumber dari pendanaan lainnya		aplikasi	1	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		aplikasi	1	
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kab/kota		data	0	
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		data	0	
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		data	0	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/ analis di wilayah kab/kota		data	0	
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kota		data	0	
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		data	0	
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		data	0	
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		data	0	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Pengawasannya		data	0	
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		data	0	
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah Kab/kota		data	0	
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/kota		data	0	
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kota		data	0	
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		data	0	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Pengawasannya		data	0	
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		data	0	
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		data	0	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/kota					
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		Unit	0	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Unit	0	
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		Orang	0	
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		Unit	8	
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		Unit	0	
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/ relokasi sesuai dengan rencana aksi		Unit	0	
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		Unit	0	
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		Unit	8	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		Unit	0	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kab/kota					
		1	Jumlah rumah tanggapenerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi gantikerugian asset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Unit	0	
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Unit	0	
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Unit	0	
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Unit	7.116	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		5	Jumlah rumah tanggapenerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Unit	0	
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		Ha	0	
		Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten yang ditangani					
		1	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh < 10 Ha		Ha	68.69	
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		Unit	2230	
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		Ha	68.69	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)					
		1	Jumlah rumah di kab/kota		Unit	242.819	
		2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH		Unit	2.230	
		3	Jumlah rumah tidak layak huni		Unit	11.524	
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni		Unit	5.855	
		5	Rasio rumah dan KK	Jumlah KK	%	80	
				Jumlah total unit rumah			
		6	Jumlah rumah pembangunan baru		Unit	1.900	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)					
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		Perumahan	231	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		Rumah	0	
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		Rumah	0	
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)		Rumah	0	
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		Perumahan	0	
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		Unit	0	
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		Pengembang	0	
		8	Jumlah pengembang yang terregistrasi		Pengembang	0	
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		Pengembang	0	
5	Ketentraman Ketertiban	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan					

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
	Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang ditangani		pelanggaran	5247	
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		Orang	167	
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		Perda/p erkada	22	
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		orang	5	
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum		SOP	11	
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal		dokumen	3	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana					
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	dokumen	1	
				Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan			

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD		
						Elemen Data	Capaian	
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	desa	3		
				Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana				
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						
		1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	Dokume m	0		
				Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan				
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	dokumen	1		
				Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah				

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negarayang ikut pelatihan	orang	90	
				Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan			
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	orang	100	
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana			
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops	%	100	
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana			
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan	%	100	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana			
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	%	100	
				Jumlah seluruh penetapan status KLB			
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	%	100	
				Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana			
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD		
						Elemen Data	Capaian	
				Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat				
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari,ditolong dan dievakuasi	%	100		
				Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana				
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran						
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kab/kota		Layanan	-		
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		Pos	-		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		3	Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		Orang	-	
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		Pos	-	
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		jenis	5	
		6	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		Orang	9	
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan Kebakaran		Orang	-	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran		Kegiatan	-	
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti					
		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		layanan	6	
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM		orang	7.516	
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		Tim	2	
		4	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, lanjut usia yang terlantar dan gepeng dan gepeng yang dijangkau.		Orang	7.516	
		5	jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki.		unit	4	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket pemakaman sesuai standar gizi.		orang	0	
		7	Jumlah rumah singgah, shelter, tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar.		unit	1	
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang.		orang	0	
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu,		orang	60	
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter.		Unit	2	
		11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia.		Unit	0	
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan.		orang	709	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah.		orang	0	
		14	Jumlah pekerja social professional dan/atau TKS dan/atau relawan social yang disediakan.		orang	128	
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial.		orang	1.522	
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		Orang	80	
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan.		orang	41	
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlangtar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.		orang	865	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga.		orang	2	
		20	jumlah penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang diidentifikasi dengan keluarga.		orang	2	
		21	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk.		orang	338	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/kota					
		1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan Makanan		paket	64	
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		paket	25	
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang Dimiliki		Penampungan	2	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		Paket	10	
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		orang	10	
		6	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia		Relawan	21	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja					
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja Kab/kota		dokumen	3	
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		%	90	
		3	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga Kerja		Perusahaan	20	
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi					
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun 2020	%	-0-	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
				keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun 2020		-	
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2020 jumlah instruktur seluruhnya pada tahun 2020	%	60	
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun 2020 jumlah peserta pelatihan pada tahun 2020	%	-	
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2020 Jumlah seluruh LPK pada tahun 2020	%	3	
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2020 jumlah LPK yang terdata pada tahun 2020	%	100	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		6	Jumah penganggur yang dilatih		Orang	3746	
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan	%	100	
				Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun 2020			
		8	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2020	%	81	
				jumlah lulusan pada tahun 2020			
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat Kompetensi	%	3.746	
				Jumlah lulusan bersertifikat Kompetensi pada tahun 2020			
		10	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	\sum CPMI dilatih	orang	98	
				\sum CPMI terdaftar			
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)		orang	20	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja					
		1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun 2020	%	35	-
				jumlah perusahaan pada tahun 2020			
		2	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal + pertumbuhan tenaga kerja).	dokumen	2	
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)					
		1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun 2020	%	46	-
				Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih			
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2020	%	58	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
				Jumlah perusahaan yg memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh			
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		SP/SB	56	
		4	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah	%	27	
				Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PPatau PKB)			
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	100	
				Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor			

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih	%	1	
				Jumlah perusahaan pada tahun 2020			
		7	Jumlah mogok kerja		Mogok	0	
		8	Jumlah penutupan perusahaan		Perusahaan	0	
		9	Jumlah perselisihan kepentingan		Perselisihan	0	
		10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) Perusahaan		Perselisihan	0	
		11	Jumlah perselisihan PHK		Perselisihan	8	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD		
						Elemen Data	Capaian	
		12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		pekerja	150		
		13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit		Perselisihan	1		
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan		LKS	1		
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perjanjian Bersama	%	12		
				Jumlah kasus perselisihan				
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota						
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kab/Kota		Lowongan Kerja	7.560		

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		Orang	6626	
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		BKK	26	
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kab/kota		Orang	18	
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		Orang	1-	
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		Lembaga	1	
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/kota		Perjanjian	0	
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		orang	22	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi		Orang	0	
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		Orang	98	
		11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi	Σ fasilitasi PMI yang dipulangkan	%	0	
				Σ PMI yang pulang			
		12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Σ PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	%	20	
				Σ PMI/TKI			
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarga	Σ PMIatau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan	%	0	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
				\sum PMI/TKI purna dan keluarganya			
		14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	\sum LTSA yang terbentuk	%	0	
		Jumlah daerah kantong PMI/TKI					
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD					
		1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kab/kota yang telah dilatih PUG		OPD	40	
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kab/kota		Prog/Ke g	0	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten					

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab (dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		Media Massa	15	
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		Lembaga	12	
		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani	%	100	
				jumlah korban kekerasan anak di tingkat kab/kota			
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		Lembaga	12	
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kab/kota (APBD Kab/kota)		Lembaga	12	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)					

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat Kab/kota yang mendapatkan pelatihan		Organisasi	24	
		2	Jumlah kader perempuan tingkat Kab/kota yang sudah Dilatih		Kader	64	
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		Lembaga	2	
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah Kab/kota		Lembaga	26	
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		Kebijakan/Program	0	
		6	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi		Lembaga	3	
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan	%	12	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
				Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan			
			Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)				
9	Pangan	1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya	Ada/Tidak	ada	
		2	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/Tidak	ada	
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Ada/Tidak	tidak	
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada/Tidak	ada	
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan Pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/Tidak	ada	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak	ada	
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak	ada	
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada/Tidak	ada	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan					
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum					
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.					
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee					
		Tersedianya tanah untuk masyarakat.					
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi					

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses ditolak seluruhnya	%	0	
				Jumlah permohonan izin lokasidalam 1 tahun			
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumberdari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimumabsentee	SK	1	
				Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek			
		3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee	%	0	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
				Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek			
		4	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang diproses penerbitannya	SK	0	
				Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun			
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kab/kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik	%	0	
				Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun			
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota					
		1	Hasil Perhitungan Kab/Kota terhadap :				

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
			a) Indeks Kualitas Air,(IKA)		indeks	55,83	
			b) Indeks Kualitas Udara (IKU)		indeks	89,44	
			c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		indeks	30,18	
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota					
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kab/kota		dokumen	1	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/kota	Izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/kota	dokumen	4	
				jumlah usulan permohonan yang teregestrasi			
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kota terhadap usaha yang izin	Jumlah PPLHD yang ada	orang	1	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
			lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Kab/kota	Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin ingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/kota			
		3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 Kab/kota	Jumlah MHA (masyarakat hukum adat) yg diakui dgn perda	lembaga	0	
				Jumlah usulan MHA			
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg mendapatkan pelatihan	lembaga	0	
				Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg ada			
		5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat/rencana	%	0	
				target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat			
		6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU	Pengaduan masyarakat yang ditangani	aduan	11	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
			LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kab/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kab/kota yang ditangani	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi			
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik					
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA					
		Kepemilikan akta kelahiran					
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama					
		1	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	akta	384	
				Peristiwa perkawinan yang diterbitkan			
		2	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta Percerian yang diterbitkan	akta	87	
				Peristiwa Perceraian yang diterbitkan			
		3	Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	akta	13.031	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
				Peristiwa kematian yang diterbitkan			
		4	Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kab/kota dalam satu tahun	buku	2	
				2 dalam 1 tahun			
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal					
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		Desa	4	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		Desa	4	
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		Lembaga	2	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Data penambahan BUMDes tahun 2020	Desa	131	
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri					
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		Desa	0	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		Desa	0	
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		Lembaga	0	
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Data penambahan BUMDes tahun 2020	Desa	0	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elem en Data	Capaian
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)					
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Ada/Tidak	0	
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	Nilai Tengah	0	
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	orang	115	
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK advokasi dan KIE	%	70	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
				Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK advokasi dan KIE			
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		orang	0	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)					
		1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP	%	87	
				Jumlah faskes			
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)	Jumlah Peserta KB Aktif	%	16	
				Jumlah PUS			
		3	Pemerintah Daerah Kab/kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		upps dan tribina	16	
		4	Persentase pelayanan KBPasca Persalinan	jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern)	%	16	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD			
						Elemen Data	Capaian		
				jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan					
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)							
		1	Persentase kesertaan KB di Kab dan kota dengan kesertaan rendah	Jumlah Kec yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten	%	43			
				Jumlah Kec dalam Kabupaten					
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI	%	43			
				Jumlah Keluarga PBI					
15	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota							
			Kinerja lalu lintas kabupaten						
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia	%	50,03			
				Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan					

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun	kendaraan	10.439	
				Jumlah kendaraan wajib uji			
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angutan perotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan	%	0	
				Jumlah lintas penyeberangan dalam Kab atau kota			
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kab/kota	%	93,3	
				Target kebutuhan perlengkapan jalan Kab/kota			
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo					
		1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	
				Jumlah Perangkat Daerah			

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo	%	100	
				Jumlah Perangkat Daerah			
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		sistem	4	
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi					

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah @yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015)	%	80	
				Jumlah Kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah			
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	100	
				Jumlah Perangkat Daerah			
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	100	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
				Jumlah Perangkat Daerah			
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik Jumlah layanan	%	100	
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan sertifikat elektronik Jumlah layanan	%	56	
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Jumlah sistem elektronik	%	0	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan Pemerintah	%	37,5	
				Jumlah layanan publik dan layanan administrasi			
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	100	
				Jumlah perangkat daerah			
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat	%	100	
				Jumlah perangkat daerah			
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstrakominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya	%	100	
				Jumlah perangkat daerah			

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagipakai	%	100	
				Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah			
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	100	
				Jumlah perangkat daerah			
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo	%	27	
				Jumlah ASN Pengelola TIK			
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		Peraturan	10	
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota					

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten / kota	Σ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Kab/Kota yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	%	100	
				Σ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah Kab/kota			
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten / kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	100	
				Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/kota			
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM)dan SOP	%	100	
				Σ Diseminasi dan layanan informasi Publik			
17	Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas					

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan	%	100	
				Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam			
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	%	100	
				Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan			
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	%	27.80	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
			keanggotaan dalam daerah Kabupaten / kota	Jumlah koperasi yang ada			
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten /kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	%	12,77	
				Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada			
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten /kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	52,69	
				Jumlah koperasi yang ada			
		6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten /kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	%	0,55	
				Jumlah anggota koperasi yang ada			

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten /kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	%	2.27	
				Jumlah koperasi yang ada			
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan			0,25	
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten /kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasinya	%	62.04	
				Jumlah koperasi yang ada			
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah Kabupaten /kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	%	0.25	
				Jumlah koperasi yang ada			

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah Kabupaten /kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	%	0	
				Jumlah koperasi yang ada			
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah Kabupaten /kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	%	17.47	
				Jumlah koperasi yang ada			
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	%	7.38	
				Jumlah koperasi yang ada			
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha					

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	%	1.10	
				Jumlah wirausaha yang ada			
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)	%	6.72	
				Jumlah usaha mikro yang ada			
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra	%	0,30	
				Jumlah usaha mikro yang ada			
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	%	0,06	
				Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk			

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	0,06	
				Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran			
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	0,23	
				Jumlah usaha mikro yang ada			
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	%	0,20	
				Jumlah usaha mikro yang ada			
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten / Kota					
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/kota		Ada/Tidak	Tidak ada	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Ada/Tidak	Tidak ada	
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Jumlah Laporan	0	
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting		Jumlah Kegiatan	0	
		5	Kegiatan pameran penanaman modal		Jumlah Kegiatan	1	
		6	Kegiatan misi penanaman modal		Jumlah Kegiatan	0	
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		Jumlah Konsultasi	2	
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		ijin	3067	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		9	Laporan realisasi penanaman modal		rupiah	Rp. 9.561.654.680.139;	
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota		kali	1	
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		kali	13	
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/Kota		jenis	2	
19	Pemuda dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri					
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		Orang	212.297	
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		Orang	195.429	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan					

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		Orang	5.200	
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		Orang	120	
		Peningkatan Prestasi Olahraga					
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		Orang	57	
		2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		Event	0	
20	Statistik	1	Tersedianya buku profil daerah		buku	4	4
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		Jumlah Survey	0	
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		buah	14	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		Jumlah Survey	0	
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		buah	14	
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik		%	100	
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistic		%	100	
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah					
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan		%	100	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah		%	87	
		3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah		%	15	
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlahseluruh titik pada pemerintah Daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi sandi (PHKS) yang ditetapkan	%	42		
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya					
		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		Obyek	1	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)		Obyek	1	
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)		Obyek	1	
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		Orang	50	
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		Cagar Budaya	146	
		6	Perlindungan cagar budaya Kab/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)		Cagar Budaya	3	
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya Kab/kota ke luar Kab/kota dengan dukungan data		Cagar Budaya	0	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		8	Pengembangan cagar budaya Kab/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi),		Cagar Budaya	2	
		9	Pemanfaatan cagar budaya Kab/kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)		Cagar Budaya	2	
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		Koleksi	0	
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum		Orang	1	
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.			0	
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya		orang	11	
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya Kab/kota		orang	11	
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		orang	7	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman		Orang	10	
		17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman		Orang	0	
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		berkas	1	
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		Kegiatan	0	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat					
		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersediadi berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)	rasio	1.02	
				Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)			
		2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite	%	36.9	
				Jumlah penduduk di wilayahnya			

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya	rasio	0.00047	
				Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)			
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	0.17	
				Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya			
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		orang	2000	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat					
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya		Naskah Kuno	0	
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		Naskah Kuno	0	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		eksemplar	600	
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan					
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	7.5	5
				Jumlah seluruh arsip aktif			
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	7.5	5
				Jumlah seluruh arsip inaktif			
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	17.5	12,5

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD		
						Elemen Data	Capaian	
				Jumlah seluruh arsip Statis				
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	0	0	
				Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan Kab/kota				
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat						
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	5		
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	0		
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kota yang sesuai NSPK di Kab/kota		Jumlah Arsip	0		

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kab/kota yang sesuai NSPK		%	5	
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kab/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		%	17.5	
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/kota yang sesuai NSPK		%	0	
Urusan Pilihan							
25	Kelautan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kab/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)					
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)			805	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar operasional	%	0	
				Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kab/kota			
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kab/ kota yang diterbitkan		Izin	20	
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)		Pembudidaya	50	
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi		Benih	3393,43	
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan					
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten					

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		Tingkat hunian akomodasi					
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku					
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD					
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		Pengelola	2	
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		Obyek	2	
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kab/kota		TDUP	18	
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		orang	0	
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		Kegiatan	11	
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota		Kegiatan	0	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri		paket wisata	10	
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	%	0	
				Jumlah tenaga kerja pariwisata			
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	380	
				Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan			
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		Desa Wisata	4	
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun					
		1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan		Unit	75	
		2	Prasaran pertanian yang digunakan		Prasarna	75	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD		
						Elemen Data	Capaian	
		3	Penerbitan izin usaha pertanian		Dokumen			
		4	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	%	100		
				Jumlah prasarana yang dibangun				
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian Kab/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi	%	0		
				Jumlah usulan usaha pertanian				
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular						
		1.	Persentase Fasilitas penanggulangan Bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi	%	100		
				Jumlah area yang terkena bencana				
28	Kehutanan							
	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura		Dokumen	0			

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	kelompok	0	
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	Ha	0	
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	kejadian	0	
29	ESDM	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kab/kota					
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota		ada/tidak	0	
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)					
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan < 5 hari kerja Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	%	100	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
				Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan < 5 hari kerja	%	0	
				Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar		0	
		2.	Persentase Penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja	%	10	
				Jumlah permohonan penerbitan TDG			
		3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG	%	82%	
				Jumlah gudang yang ada di Kab kota			
		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :		%	0	
			a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerjasejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%	0	

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
				Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri			
			b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan@waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%	0	
				Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri			
			c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralabaluar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%	0	
				Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab/kota	%	0	
				Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer			
		6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja 1 x 24 jam	%	100	
				Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar			
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$	%	76,9	
				K = Persentase pengembangandan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan			

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
				telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)			
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		%	4	
		Persentase kinerja realisasi pupuk					
		1	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan	$X = a / (b \times c) \times 100\%$ <p> X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Kab/kota sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) </p>	ton	18145.05	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku					

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan	%	80.3	80.3
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab kota			
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	%	0.15	0.15
				Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan			
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota					
		1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kab/kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	%	0	0
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yaasung mk		0	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP					

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi perda		%	0	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlahIzin Usaha Industri (IUI) Kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		1	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	%	75	
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk			
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlahIzin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		1	Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI) bagi industri kecil yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	%	15	
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk			

No	Urusan	NO IK K	IKK Output	Rumus	Satuan	Data LPPD	
						Elemen Data	Capaian
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini					
		1	Persentase data perusahaan indusri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di Kab/kota	Jumlah data perusahaan industri kecil dan perusahaan kawasan industri di Kab/kota di SIINas	%	0	0
				Total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di Kab/kota		0	
31	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya		lokasi	1	
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		lokasi	1	
		3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya		lokasi	1	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		KET.
						Elemen data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	%	20.497	75,83	
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		27.029		
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	%	67.861	97,10	
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		69.891		
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	%	27.948	79,39	
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		35.204		
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	%	1.047	0	

			pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan		0		
2	Kesehatan	5	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten	bed	1.433	0,16	
				Jumlah Penduduk kabupaten	orang	898.634		
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan kabupaten yang terakreditasi (minimal Tingkat Utama)	RS	8	80,00	
				Jumlah RS kabupaten	RS	10		
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	bumil	12.514	100	
				Jumlah ibu hamil di kabupaten	bumil	12.514		
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	orang	11.589	100,00	
				Jumlah ibu bersalin di kabupaten	nakes	11.589		
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	bayi	11.587	100,00	

			peayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir di kabupaten	bayi	11.587		
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	balita	54.027	89,64	
				Jumlah balita di kabupaten	balita	60.271		
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	orang	23.891	92,54	
				Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten	orang	25.818		
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	orang	466.714	79,07	
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten	orang	590.228		
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	orang	97.790	77.7	
				Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten	orang	126.176		
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	115.801	43	

			elayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi di kabupaten	orang	269.296		
		15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	17.349	96.87	
				Jumlah penderita DM di kabupaten	orang	17.910		
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	1.326	58.16	
				Jumlah penderita ODGJ di kabupaten	orang	2.280		
		17	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	675	34,09	
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi TBC di kabupaten/kota	orang	1980		
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	orang	10.347	70,44	
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten	orang	14.689		

3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten (ha)	Ha	46666	100.534	
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan kabupaten(ha)		46417.9		
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS)Kewenangan kabupaten (ha)	ha	-	0	
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten (ha)	ha	-		
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting	ha	1915.32	43.99	
				Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten	ha	4355		

		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.	jiwa	836.648	93.18	
				Jumlah proyeksi rumah tangga diseluruh kabupaten tersebut.	jiwa	897.916		
		23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	SR	267.857	100	
				Jumlah rumah di Kabupaten (menggunakan data KK yang memiliki akses ke air limbah domestik)	SR	267.857		
		24	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	Izin	59.549	100	
				Jumlah IMB yang berlaku	izin	59.549		
		25	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang jalan dalam kondisi mantap (baik+sedang)	Km	531.3	87.77	
				Jumlah total panjang jalan Kabupaten/Kota	Km	605.12		

		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang berlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	orang	298	29.86	
				orangJumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di Wilayah Kabupaten/Kota	orang	998		
		27	rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	lokasi	0	0	
				jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	lokasi	0		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020	unit	8	100.00	
				Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2020	unit	8		
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	unit	0	0	
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	unit	0		

		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	ha	68.69	93.15	
				Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha	ha	73.06		
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	unit	11.524	4.55	
				Jumlah total unit rumah Kabupaten	unit	242.819		
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU (termasuk yang sudah terbangun)	unit	9.127	37.58	
				Jumlah unit rumah kab/kota	unit	242.819		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	Pelanggaran	4233	100	
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang Masuk	Pelanggaran	4233		
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	Perda	22	78.57	
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	Perda	28		
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	0		

		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	100		
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	100		
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	%	115	100,00	
				Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten		115		
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan Kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung darimpelaporan penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakarabn	Menit	44.73		44.73

6	Sosial	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	orang	7.093	94.37	
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	orang	7.516		
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	Orang	99	99	
				Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Orang	100		
		42	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	%	2	64,706	
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten		2		
7	Tenaga Kerja	43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	2.166	0	
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan		476.867		

		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	%	39	5857,36	
				Jumlah tenaga kerja		476		
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	296	100	
				Jumlah Perusahaan		296		
		46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan	%	3.612	54.51	
				Jumlah pencari kerja yang terdaftar		6.626		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	Rupiah	1.109.930.000	96,76	
				Jumlah seluruh belanja langsung APBD	Rupiah	1.137.220.600		

		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi	orang	38	0,01	
				Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	orang	269.415		
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	orang	26	5,73	
				Jumlah penduduk perempuan	orang	454		
9	Pangan	50	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan kabupaten	ton	268.535	210,97	
				Jumlah kebutuhan pangan kabupaten	ton	127.286		
10	Pertanahan	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang Diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi	%	0	0,00	
				Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi		0		
		52	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	sk	1	100	

			fasilitas umum	Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	sk	1		
		53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	%	28.8916	100	
				Luas izin lokasi yang diterbitkan		28.916		
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha	%	0	0	
				Jumlah penerima tanah obyek landreform		0		
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah	%	0	0	
				Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan		0		
		56	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	%		0	
				Jumlah pengaduan sengketa tanah Garapan				
11	Lingkungan Hidup	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	63.83		

		58	Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah Kabupaten	Total Vol sampah yang dapat ditangani	Kg/hari	1.394.942	2.11	
				Total vol timbunan sampah Kabupaten	kg/hari	66.225.287		
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	perusahaan	4	66,67	
				Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	perusahaan	10		
	12	60	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	orang	580.215	86,11	
				Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	orang	673.835		
		61	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	Anak	142.223	66,31	
				Jumlah anak usia 0-17 tahun	Anak	214.490		
		62	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0 — 18 Tahun tahnyang sudah memiliki akte lahir	Orang	235.343	96.3	
				Jumlah anak k usia 0 – 18 tahun	orang	244.389		

		63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	opd	4	14.81	
				Jumlah OPD	opd	27		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	desa	0	0,00	
				Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	desa	0		
		65	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri pertahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	desa	5	5,56	
				Jumlah desa berkembang (per - awal tahun)	desa	90		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	5 Σ ASFR	%	1,29		
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern	Akseptor	78.160	54.62	
				Jumlah Pasangan Usia Subur	PUS	143.093		
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	PUS	39.796	27.81	
				Jumlah Pasangan Usia Subur	PUS	143.093		

15	Perhubungan	69	Rasio konektivitas kabupaten	<p>Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$</p> <ul style="list-style-type: none"> • IK1 (angkutan jalan) = $(\text{Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota} \times \text{bobot trayek}) \div \text{jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kotatersebut}$ • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = $\text{jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb} \times \text{bobot lintas} \div \text{jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut}$ <p>Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) § Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP § Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu</p> <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) § Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil</p>	%	77,25		
----	-------------	----	------------------------------	--	---	-------	--	--

				<p>Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktutertentu</p> <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:</p> <p>1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkandibandingkandenganangkut anjalan(bobotangkutanSDP=70,bobot angkutan jalan =30)</p> <p>2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkandenganangkutanjalan(bobot angkutanSDP50,bobotangkutanjalan = 50)</p> <p>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan =70)</p> <p>4. Wilayahyangtidakmemilikiangkutanpenye berangandanlaut(bobotangkutanSDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas:</p> <p>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot =1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5				
		70	Kinerja lalu lintas kabupaten	V/C ratio di jalan kabupaten	nilai	0,53		
16	Komunikasi dan Informatika	71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	40	100,00	
				Jumlah OPD		40		
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	10	66.67	
				Jumlah Layanan Publik		15		
		73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	100	100	
				Jumlah penduduk (diatas 17 tahun)		100		

			pemerintah daerah kabupaten					
17	Koperasi dan UKM	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset	%	102	23,45	
				Jumlah seluruh koperasi		435		
		75	Meningkatnya Usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	2500	1.1	
				Jumlah usaha mikro keseluruhan		227.405		
18	Penanaman Modal	76	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	(Jumlah investasi tahun 2021 - jumlah investasi tahun 2020) di kabupaten dikali 100%	rupiah	9.561.654.680.139	105.71	
				jumlah investasi tahun 2020		9.045.557.869.330		
19	Kepemudaan dan Olahraga	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten	Orang	99.798	38.3	
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	Orang	260.593		
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan orgaisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten	unit	24	0,01	
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	orang	260.593		

		79	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	event	8		
20	Statistik	80	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	40	100,00	
				Jumlah OPD		40		
		81	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	40	100,00	
				Jumlah OPD		40		
21	Persandian	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	%	277	5540	
				Jumlah area penilaian		5		
22	Kebudayaan	83	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	%	5	2,5	
				Jumlah cagar budaya yang terdata		194		

23	Perpustakaan	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat			50		
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			19.95		
24	Kearsipan	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$	%		50,00	
				T = tingkat ketersediaan arsip				
				a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip				
				i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip				
				s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik				
				j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN				
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$				
				T = tingkat keberandaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban				

			kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	<p>m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK</p> <p>b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK</p> <p>g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab/kota dengan NSPK</p> <p>a= tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK</p> <p>c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK</p> <p>i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>	%		50,00	
25	Kelautan Perikanan	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	Ton	14.609		

26	Pariwisata	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun 2021 — Jumlah wisatawan tahun 2020) dibagi jumlah wisatawan tahun 2020 dikali 100%	orang	0	0	
				(Jumlah wisatawan tahun 2021— Jumlah wisatawan tahun 2020)	orang	0		
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	(Jumlah wisatawan tahun 2020 — Jumlah wisatawan tahun 2019) dibagi jumlah wisatawan tahun 2019 dikali 100%	masa pandemi DTW tutup	0	0	
				(Jumlah wisatawan tahun 2020 — Jumlah wisatawan tahun 2019)	orang	19.696		
		91	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	kamar	0	0	
				Jumlah kamar yang tersedia	kamar	0		
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Rupiah	0	0	
				Jumlah total PDRB (dalam satuan rupiah)	Rupiah	0		
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	Rupiah	0	0	
					Rupiah	0		

27	Pertanian	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (ton)	%	384.788	745.89	
				Luas Panen (ha)		51.588		
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus hewan menular tahun berjalan (2021) — jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (2020) dibagi jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (2020 dikali 100%	%	0	0	
				Jumlah kejadian penyakit/kasus hewan menular tahun berjalan (2020) — jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (2019)		1		
				Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2020	%	0	0	
				Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2019		1		
28	Kehutanan							

29	ESDM	96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kab/ Kabupaten	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin	%	0	0	
				Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi		0		
30	Perdagangan	97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	%	25	100,00	
				Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten		25		
		98	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	ton	18145.05	53.52	
				RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)		33906.43		
		99	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	%	10033	80.25	
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten		12502		

31	Perindustrian	100	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	(Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun 2021 - Jumlah industri Kecil dan Menengah tahun 2019) dibagi Jumlah industri Kecil dan Menengah tahun 2020 dikali 100%	%	7	2,15	
				(Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun 2020 - Jumlah industri Kecil dan Menengah tahun 2019)		325		
		101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	Rata-Rata Capaian sasaran dalam RPIK	%	0		

		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan		26	173,33	
				Jumlah izin yang dikeluarkan	%	15		
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	%	26	173,33	
				Jumlah izin yang dikeluarkan		15		
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	.%	26	173,33	
				Jumlah izin yang dikeluarkan		15		
		105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini			0	

32	Transmigrasi							
33	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	1	Rasioe Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar gurudan tenaga kesehatan (realisasi)	%	1.096.100.199.629	63,44	
				Jumlah APBD (realisasi)		2.356.534.359.600		
		2	Rasio PAD	Jumlah PAD	%	528.264.139.902	0,022	
				Jumlah PDRB non migas		38.990.460.000.000 – (163.260.000.000 + 15.198.040.000.000)= 23.629.160.000.000		
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) Yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3		
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	level	3		
		5	Rasio Belanja Urusan pemerintahan	Jumlah belanja urusan pemerintahan –transfer expenditures (realiasi)	%	1.794.144.815.096	0.76	

			Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja APBD (realisasi)		2.356.534.359.600		
		6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	WTP	6		
					WDP	4		
					TW	-		
					TMP	-		
34	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	%	0	0	
				Jumlah kontrak keseluruhan tahun n		0		
		8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	100	11,66	
				Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif		909		
		9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	%	331394705256	33,27	
				Total belanja langsung		995962237409		

35	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)	10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan Pendidikan Tinggi ke atas (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	388	4850	
				Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		8		
		11	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	396	18.31	
				Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		2163		
		12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	%	18	0.83	
				Seluruh jumlah pegawai fungsional(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		2.163-		
36	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)	13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	%	2.089.455.558.854	(99,11)	
				Total belanja APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)		2.356.534.359.600		
		14	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	%	528.264.139.902	25,59	
				Total PAD dalam APBD dikurangi satu		420.628.098.600		

		15	Manajemen asset	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya		
				Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya		
				Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)		Ya		
				Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		Ya		
		16	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA	%	30.087.856.684	1.45	
				Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya (realisasi)		2.073.080.966.909		
37	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)	17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	%	100	100,00	
				Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda		100		
		18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	%	8	100,00	
				Total jumlah dokumen yang telah dirinci		8		

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

2.3.1. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja, sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sebagai dasar dalam melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka setiap indikator kinerja sasaran akan dinilai dengan pengukuran skala ordinal, sebagai berikut :

Tabel II.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA ORDINAL	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74%	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dan RPJMD Tahun 2016-2021, setidaknya terdapat 10 Tujuan dan 18 Sasaran Strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

1. Tujuan pertama : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 2 sasaran strategis, yaitu :

a. Sasaran 1.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel II.A.1.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 1.1
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

No.	Indikator	Satuan	Target	2021			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
				Realisasi	Capaian	Capaian 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	Level	B (60)	B (60,07)	100,12%	CC (57,84)	100,12%
2.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Level	3,5	3,2613	93,18%	3,1332	93,18%
3.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	WTP	100,00%	WTP	100,00%
Rata-rata capaian Sasaran T1.S1					97,77%		97,77%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran 1.1**, yaitu : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana tabel di atas untuk indikator kinerja Nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah untuk tahun 2020 capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, dari target B (60) realisasi B (60,07). Dalam laporan LKjIP ini LHE SAKIP menggunakan data LHE SAKIP tahun 2020, mengingat sampai laporan ini disusun Kementerian PANRB belum menyampaikan LHE SAKIP Kabupaten Sukoharjo tahun 2021. Sedangkan indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), sebagai acuan adalah hasil penilaian pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2018 yang dikeluarkan pada tanggal 25 April 2020; sedangkan hasil penilaian LPPD dari tahun 2019 sampai tahun 2021 belum dikeluarkan. Pada tahun 2018 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memperoleh skor 3,2613 dengan status kinerja **Sangat Tinggi**. Capaian skor tersebut juga belum mencapai target, dari target 3,5 terealisasi 3,2613. Sedangkan untuk indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Perkecualian). Untuk tahun anggaran 2021 hingga laporan kinerja ini disusun proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah masih berlangsung.

Sebagaimana tersebut di atas bahwa realisasi Nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah adalah 60,07 (B) dari target angka 60 (B). Terdapat kondisi tertentu yang mempengaruhi realisasi Nilai LHE SAKIP, beberapa hal yang diamati menyangkut unsur :

1. Dokumen perencanaan pada beberapa OPD masih perlu penyempurnaan indikator kinerja tujuan dan sasaran terkait dengan relevansi dan kecukupan indikator;
2. Penjabaran kinerja telah dilakukan secara berjenjang, walau belum seluruhnya didasarkan pada kinerja organisasi dan level di atasnya;

3. Analisis capaian kinerja dan efisiensi yang disampaikan pada LKjIP masih belum memadai dan mekanisme pengumpulan data kinerja juga masih belum dapat diandalkan;
4. Evaluasi atas program yang dilaksanakan belum berfokus pada efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan;
5. Pencapaian sasaran strategis beberapa OPD masih belum sepenuhnya didukung dengan pemilihan program dan kegiatan yang relevan.

Solusi untuk memperbaiki kondisi tersebut di atas adalah:

1. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dengan memperbaiki indikator kinerja yang berorientasi hasil, relevan dan cukup untuk mengukur capaian sasaran strategis;
2. Melakukan penyempurnaan pada Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja tahunan yang mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah mulai dari level Pemda, OPD sampai dengan indikator kinerja dibawahnya;
3. Mengembangkan dan menyempurnakan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja dalam rangka peningkatan kualitas penerapan tata kelola pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
4. Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam LKjIP;
5. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Adapun perbandingan realisasi target tahun sebelumnya menunjukkan capaian kinerja untuk nilai laporan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah yakni level CC 57,84 (tahun 2019) dan level B 60,07 (tahun 2020). Untuk Indikator Nilai EKPPD menunjukkan peningkatan dari nilai 3,1332 meningkat pada nilai 3,2613. Indikator Nilai EKPPD tersebut menggunakan nilai pada tahun 2017 dan tahun 2018. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpredikat WTP, pencapaian yang sama dengan tahun sebelumnya. Perbandingan tersebut sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel II.A.1.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021
Sasaran 1.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

No.	Indikator	Satuan	2020		2021		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	Level	CC (57,84)	96,4%	B (60)	B (60,07)	100,12%
2.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Level	3,1332	89,25%	3,5	3,2613	93,18%
3.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	100%	WTP	WTP	100,00%

Untuk gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2021 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.A.1.1.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD
Sasaran 1.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d 2021	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
1	2	3	4	5	6
1.	Nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	level	B (60,07)	B (60)	100,12%
2.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	level	3,2613	3,5	93,18%
3.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Predikat	WTP	WTP	100,00%
Rata-rata Capaian					97,77%

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka capaian sasaran 1.1 capaiannya 97,77%.

Nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah untuk tahun 2020 realisasi B (60,07) dari target akhir RPJMD B (60). Sedangkan score EKPPD dari target akhir RPJMD 3,5 realisasi 3,2613; untuk opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pencapaiannya telah memenuhi target akhir RPJMD dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Perkecualian).

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 1.1 bersumber dari:

1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.365.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.279.274.100,- (tingkat capaian 93,71%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 85.725.900,- atau 6,29%.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 353.698.856.768,- dan terealisasi sebesar Rp. 186.709.448.613,- (tingkat capaian 52,79%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 166.989.408.155,- atau 47,21%.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.381.314.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.155.487.849,- (tingkat capaian 90,52%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 225.826.451,- atau 4,48%.

b. Sasaran 1.2 Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif.

Pencapaian kinerja, perbandingan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, dan Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD, untuk **sasaran 1.2**, yaitu Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif, tercermin pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.A.1.2.1

Capaian Kinerja Sasaran 1.2 Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif.

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Capaian 2020	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	%	70	NA	NA	78,46	NA
2	Jumlah Pelanggaran dalam Pemilu dan Pilkada	Kasus	10	NA	NA	22	NA

Tabel II.A.1.2.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021 Sasaran 1.2 Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif

No.	Indikator	Satuan	2020		2021		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	%	78,46	112%	70	NA	NA
2.	Jumlah Pelanggaran dalam Pemilu dan Pilkada	Kasus	22	-20%	10	NA	NA

Tabel II.A.1.2.3

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 1.2 : Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2021	Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
1	2	3	4	5	6
1.	Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	%	NA	75	NA
2.	Jumlah pelanggaran dalam Pemilu dan Pilkada	Kasus	NA	-	-

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran-1.2**, yaitu: Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif, dari 2 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya, yaitu prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada; serta jumlah pelanggaran dalam pemilu dan pilkada tidak dapat diukur capaiannya karena tidak adanya pemilu dan pilkada yang diselenggarakan pada tahun 2021.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 untuk prosentase partisipasi pemilih apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 75%, maka tidak dapat diperbandingkan disebabkan karena tidak adanya pemilu dan pilkada yang diselenggarakan pada tahun 2021. Untuk capaian kinerja indikator jumlah pelanggaran dalam Pemilu dan Pilkada dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD tidak dapat diperbandingkan disebabkan perubahan indikator kinerja utama (Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten).

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 1.2, melalui pelaksanaan :

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, anggaran Rp. 31.665.000,- realisasi Rp. 31.665.000,- atau 100%. Adapun kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi menuju pemilu tahun 2024 dengan peserta dari tokoh masyarakat dan tokoh agama.

2. Tujuan kedua : Meningkatnya partisipasi publik dalam pembangunan.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2021, pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

a. Sasaran 2.1 Meningkatnya Aksesibilitas terhadap informasi publik dan pemanfaatannya.

Pencapaian kinerja pada sasaran 2.1, yaitu Meningkatnya aksesibilitas terhadap informasi publik dan pemanfaatannya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.A.2.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 2.1
Meningkatnya Aksesibilitas terhadap Informasi Publik dan Pemanfaatannya

No.	Indikator	Satuan	Target	Tahun 2021			% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
				Realisasi	Capaian	Capaian 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Score	80	73,25	91,56%	93	-

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran 2.1**, yaitu: Meningkatnya aksesibilitas terhadap informasi publik dan pemanfaatannya dengan indikator kinerja yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik; kinerjanya tercapai **91,56%** dari target, sehingga dapat dikategorikan **Baik**.

Adapun perbandingan realisasi dan prosentase capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel II.A.2.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021
Sasaran 2.1 Meningkatnya Aksesibilitas terhadap Informasi Publik dan Pemanfaatannya

No.	Indikator	Satuan	2020		2021		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Score	93	116,25%	80	73,25	91,56%

Pada tahun 2020 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Sukoharjo memperoleh nilai 93 sedangkan pada tahun 2021 memperoleh nilai 73,25 sehingga mengalami penurunan nilai sebesar 19,75 poin namun masih dalam kategori Menuju Informatif. Penurunan ini dikarenakan terdapat standar penilaian baru yang belum disosialisasikan yaitu penilaian 5 Organisasi Perangkat Daerah terpilih yaitu Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPBD dan Badan Keuangan Daerah. Pada tahun 2022, Tim Pengelola Informasi dan Pelayanan Informasi Publik akan lebih awal dalam mempersiapkan penilaian Keterbukaan Informasi Publik.

Capaian kinerja Indikator Keterbukaan Informasi publik tidak dapat diperbandingkan dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD disebabkan *perubahan indikator kinerja utama* (Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten), *indikator keterbukaan informasi publik tidak dirumuskan dalam RPJMD* sehingga tidak diperoleh gambaran perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.A.2.1.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2021 dengan Target Akhir
RPJMD Sasaran 2.1 Meningkatnya aksesibilitas terhadap informasi
publik dan pemanfaatannya

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2021	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	score	73,25	-	-

Untuk melihat perbandingan Indeks Keterbukaan Informasi Publik pada Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota lain, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.A.2.1.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Kabupaten/Kota Lain

No.	Badan Publik	Jumlah	Status
1	Kab. Kebumen	97.50	Informatif
2	Kab. Demak	97.49	Informatif
3	Kota Surakarta	96.33	Informatif
4	Kab. Karanganyar	95.63	Informatif
5	Kab. Wonogiri	94.07	Informatif
6	Kab. Banyumas	93.81	Informatif
7	Kab. Batang	92.81	Informatif
8	Kab. Temanggung	91.64	Informatif
9	Kota Semarang	90.03	Informatif
10	Kab. Klaten	88.89	Informatif
11	Kab. Kudus	87.57	Informatif
12	Kab. Wonosobo	82.63	Informatif
13	Kab. Kendal	81.40	Informatif
14	Kab. Purbalingga	80.74	Informatif
15	Kab. Cilacap	80.01	Informatif
16	Kab. Rembang	79.79	Masih Menuju Informatif
17	Kab. Pekalongan	76.92	Masih Menuju Informatif
18	Kab. Purworejo	76.57	Masih Menuju Informatif
19	Kab. Brebes	74.55	Masih Menuju Informatif
20	Kab. Sukoharjo	73.25	Masih Menuju Informatif
21	Kab. Pekalongan	71.07	Masih Menuju Informatif
22	Kab. Blora	70.28	Masih Menuju Informatif
23	Kab. Semarang	67.72	Masih Menuju Informatif

24	Kab. Pati	44.72	Masih Menuju Informatif
25	Kab. Sragen	42.41	Masih Menuju Informatif
26	Kab. Jepara	41.14	Masih Menuju Informatif
27	Kab. Tegal	39.18	Masih Menuju Informatif
28	Kota Magelang	38.17	Masih Menuju Informatif
29	Kab. Magelang	36.83	Masih Menuju Informatif
30	Kab. Grobogan	35.68	Masih Menuju Informatif
31	Kota Salatiga	30.37	Masih Menuju Informatif
32	Kota Tegal	27.17	Masih Menuju Informatif
33	Kab. Pemalang	26.87	Masih Menuju Informatif
34	Kab. Boyolali	23.77	Masih Menuju Informatif
35	Kab. Banjarnegara	3.60	Masih Menuju Informatif

Berdasarkan tabel di atas bahwa hasil penilaian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi dua, yaitu Informatif dan Masih Menuju Informatif. Diantara Kabupaten/Kota yang mendapat status Masih Menuju Informatif, Kabupaten Sukoharjo mendapat nilai sebesar 73.25 atau lebih tinggi dari lima belas Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah.

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.1, melalui kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan anggaran Rp. 1.914.650.000 dengan realisasi Rp. 1.856.215.000 atau 96,79%.

b. Sasaran 2.2 Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

Selanjutnya untuk pencapaian kinerja pelayanan dengan sasaran 2.2 Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan tercermin pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.A.2.2.1
Capaian Kinerja Sasaran 2.2
Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan
dalam proses pembangunan

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021				% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
			Target	Realisasi	Capaian	Capaian 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prosentase Aspirasi masyarakat yang diakomodir (Musrenbang)	%	2	2	100%	2	100%
2.	Prosentase Pengaduan - Masyarakat	%	80	100	125%	97,87	-
Rata-rata Capaian Sasaran 2,2					112,5%		

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 2.2 Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan, 1 (satu) indikator kinerja menunjukkan realisasi sesuai target yakni prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dari target 2% realisasinya 2%, angka capaian 100%. Indikator Prosentase Aspirasi masyarakat yang diakomodir (Musrenbang) merupakan indikator kumulatif dimana capaian sampai dengan tahun 2020 berjumlah 8% sehingga jika ditambahkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 2% maka capaian sampai dengan tahun 2021 adalah 10%. Hal tersebut sesuai dengan target akhir RPJMD sebesar 10% dengan prosentase capaian 100%.

Terdapat 1 (satu) indikator melebihi target yakni pengaduan masyarakat dari target 80% pengaduan masyarakat yang terselesaikan terealisasi 100% dengan angka capaiannya 125%. Media pengaduan masyarakat ini difasilitasi dalam aplikasi **Lapor.go.id**. Aplikasi Lapor.go.id (SP4N-LAPOR) diberlakukan di tahun 2019 namun efektif dilaksanakan mulai tahun 2020. Peningkatan jumlah aduan disebabkan aduan di SP4N-LAPOR lebih fleksibel dalam penggunaan; dapat diakses lewat android, website serta lebih diketahui oleh masyarakat

karena dikembangkan oleh pemerintah pusat. Terdapat 196 aduan melalui aplikasi SP4N-LAPOR dan seluruhnya telah tertangani.

Adapun perbandingan realisasi dan prosentase pencapaian dengan tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.A.2.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021
Sasaran 2.2 Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku
kepentingan dalam proses pembangunan

No.	Indikator	Satuan	2020		2021		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir	%	2	100,00%	2	2	100,00%
2.	Prosentase pengaduan masyarakat	%	97,87	122,33%	80	100	125%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi prosentase aspirasi masyarakat yang terakomodir capaiannya sama jika dibanding tahun sebelumnya, yang mencapai 100%. Sedangkan realisasi prosentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan meningkat dibandingkan tahun 2020. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2021 dari 196 jumlah pengaduan masyarakat yang masuk, 196 telah diselesaikan. Sementara pada tahun 2020 dari 94 jumlah pengaduan yang masuk, 92 telah diselesaikan.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2021 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.A.2.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2021 dengan Target Akhir
RPJMD Sasaran 2.2 : Meningkatnya peran serta masyarakat dan
pemangku kepentingan dalam proses pembangunan

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2021	Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
1	2	3	4	5	6
1.	Prosentase Aspirasi masyarakat yang diakomodir	%	10	10	100%
2.	Prosentase Pengaduan Masyarakat	%	100	-	-

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka capaian sasaran 2.3 ini dapat mencapai target. Hal ini diindikasikan dari capaian kinerja indikator prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir yang mencapai 10% dari target sebesar 10% atau dengan prosentase capaian 100%. Sedangkan indikator prosentase pengaduan masyarakat *tidak dirumuskan dalam RPJMD* sehingga tidak diperoleh gambaran perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD. Tidak terumuskan dalam RPJMD disebabkan *perubahan indikator kinerja utama* (Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten).

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 2.3 telah dialokasikan melalui Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Kota dengan Anggaran Rp. 160.000.000,- terealisasi Rp. 158.540.000,- atau 99,10%, dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp. 1.460.000,- atau 0,9% dari pagu yang ditetapkan. Untuk mengakomodasi pengaduan masyarakat didukung dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota, Sub Kegiatan Monitoring Opini dan

Aspirasi Publik dengan Anggaran Rp. 50.000.000,- realisasi Rp. 48.964.000,- atau 97,93% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.036.000,- atau 2,07% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

3. Tujuan ketiga : Meningkatnya kualitas pendidikan.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2021, maka pencapaian kinerja pada setiap sasaran adalah sebagai berikut :

a. Sasaran 3.1 Meningkatkan kualitas pendidikan.

Pencapaian kinerja pada sasaran 3.1, yaitu : Meningkatkan kualitas pendidikan tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.A.3.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 3.1
Meningkatkan Kualitas Pendidikan

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Capaian 2020	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Angka Melek Huruf	%	99,98	99,34	99,36%	99,33	99,36%
2	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	9	10,68	118,67%	9,88	118,67%
Rata-rata Capaian Sasaran 3-1					109,02%		109,02%

Berdasar hasil pengukuran kinerja **sasaran 3.1**, yaitu : Meningkatkan kualitas pendidikan, dari 2 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai **109,02%**, sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa pada indikator angka melek huruf dari target sebesar 99,98% realisasinya mencapai 99,34% atau capaiannya sebesar 99,36%, angka rata-rata lama sekolah dari target 9 tahun dapat terealisasi 10,68 tahun atau mencapai 118,67%.

Adapun perbandingan realisasi dan prosentase realisasi tahun 2020 dengan Tahun 2021 untuk masing-masing indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel II.A.3.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan 2021
Sasaran 3.1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan

No.	Indikator	Satuan	2020		2021		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Angka Melek Huruf	%	99,33	99,35%	99,98	99,34	99,36%
2.	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,88	111,01%	9	10,68	118,67%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa untuk indikator angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2020, angka melek huruf Kabupaten Sukoharjo adalah 99,33 kemudian naik menjadi 99,34 dengan capaian 99,36%. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah 9,88 naik menjadi 10,68 dengan capaian 118,68%.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2021, maka di bawah ini disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.A.3.1.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 3.1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2021	Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
1	2	3	4	5	6
1	Angka Melek Huruf	%	99,34	99,98	99,36%
2	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	10,68	9	118,67%
Rata-rata capaian kinerja					109,02%

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka capaian untuk masing-masing indikator sebagai berikut: angka melek huruf dengan capaian 99,34% dari target akhir sebesar 99,98% atau dengan capaian 99,36%. Sedangkan untuk indikator rata-rata lama sekolah telah mencapai angka 10,68 tahun dari target 9 tahun atau dengan capaian 118,67%.

Angka melek Huruf hanya tercapai 99,34% berada di bawah target yang diharapkan sebesar 99,98% disebabkan karena usia penduduk buta huruf sebagian besar berusia lanjut yang sudah tidak berkeinginan untuk meningkatkan kualitas diri agar bisa membaca dan menulis dan faktor fisik yang sudah tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan yang berada jauh dari kediamannya.

Angka lama rata-rata sekolah tercapai 10,68 tahun sudah berada di atas target yang ditetapkan yaitu sebesar 9 tahun yang artinya secara rata-rata penduduk kabupaten Sukoharjo yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,68 tahun atau berada di kelas X dan hampir naik ke kelas XI pendidikan setingkat SMA. Berikut akan ditampilkan data perbandingan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Sukoharjo :

Tabel II.A.3.1.4
Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Sukoharjo

No.	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah Penduduk (Tahun 2020)	Jumlah Penduduk (Tahun 2021)
1.	Tidak / belum pernah sekolah	165.162	170.435
2.	Tidak / belum tamat SD	95.947	96.836
3.	Tamat SD	202.799	198.534
4.	Tamat SMP	152.960	154.206
5.	Tamat SMA/SMK/MA	217.391	218.459
6.	Tamat Diploma I/II	4.283	4.210
7.	Tamat Diploma III/Sarmud	19.067	19.357
8.	Tamat Sarjana	45.265	46.305
9.	Tamat S2	3.326	3.414
10.	Tamat S3	203	210
Jumlah		906.403	911.966

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas yang meningkatkan taraf pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2020 penduduk yang menamatkan pendidikan di jenjang S3 sebanyak 203, sedangkan di tahun 2021 sebanyak 210. Pada tahun 2020 penduduk yang menamatkan pendidikan di jenjang S2 sebanyak 3.326, sedangkan di tahun 2021 sebanyak 3.414. Pada tahun 2020 penduduk yang menamatkan pendidikan di jenjang S1 sebanyak 45.265, sedangkan di tahun 2021 sebanyak 46.305. Pada tahun 2020 penduduk yang menamatkan pendidikan di jenjang Diploma III/ Sarjana muda sebanyak 19.067, sedangkan tahun 2021 sebanyak 19.357. Pada tahun 2020 penduduk yang menamatkan pendidikan di jenjang Diploma I/II sebanyak 4.283, sedangkan di tahun 2021 sebanyak 4.210. Sementara pada tahun 2020 penduduk yang menamatkan pendidikan di jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 217.391, sedangkan di tahun 2021 sebanyak 218.459.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah yang cukup signifikan dari tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Sukoharjo yang menempuh pendidikan yang lebih tinggi sehingga ikut menaikkan nilai indikator angka rata-rata lama bersekolah.

Indikator kinerja sasaran ini jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.A.3.1.5
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Angka Melek Huruf dengan
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

No.	Indikator	Satuan	Kabupaten Sukoharjo	Prov. Jawa Tengah	Nasional
1	2	3	4	5	6
1	Angka Melek Huruf	%	99,34	99,97	99,78

Untuk indikator angka melek huruf, capaian kinerja Kabupaten Sukoharjo sebesar 99,34 sedikit di bawah dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,97 dan nasional sebesar 99,78. Sedangkan untuk indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.A.3.1.6
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah
dengan Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

No	Indikator	Satuan	Sukoharjo	Surakarta	Wonogiri	Karanganyar	Klaten	Boyolali	Sragen	Prov. Jawa Tengah	Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	10,68	10,90	7,34	8,57	8,81	7,85	7,66	7,75	8,54

Berdasarkan tabel di atas untuk indikator angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sukoharjo capaiannya 10,68 tahun lebih rendah dari Kota Surakarta dengan capaian 10,90 tahun. Namun demikian angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Sukoharjo sebesar 10,68 tahun masih lebih tinggi dari Kabupaten Wonogiri sebesar 7,34 tahun; Kabupaten Karanganyar sebesar 8,57 tahun; Kabupaten Klaten sebesar 8,81 tahun; Kabupaten Boyolali sebesar 7,85 tahun dan Kabupaten Sragen sebesar 7,66 tahun. Apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka capaian Kabupaten Sukoharjo 10,68 tahun masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang hanya 7,75 tahun dan Nasional sebesar 8,54 tahun.

Keberhasilan pencapaian sasaran 3.1 sebagaimana diuraikan di atas tidak terlepas dari dukungan program /kegiatan penunjang, antara lain:

1. Program pengelolaan Pendidikan yang memiliki kegiatan antara lain:
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - d. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2. Program Pengembangan Kurikulum yang memiliki kegiatan antara lain:
 - a. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
 - b. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan Nonformal
3. Program Pendidik dan Tenaga kependidikan yang memiliki kegiatan antara lain:
 - a. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Adapun anggaran untuk mendukung Sasaran Strategis tersebut sebesar Rp. 81.505.362.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 76.113.711.164,- dengan persentase serapan anggaran sebesar 93,38%.

b. Sasaran 3.2 Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pencapaian kinerja pelayanan dengan sasaran 3.2 Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.A.3.2.1
Capaian Kinerja Sasaran 3.2
Terwujudnya Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Capaian 2020	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	77,6	77,73	100,16%	77,65	100,16%
2	Angka Kematian Ibu	100.000/KH	102	172,60	30,78%	57,08	30,78%
3	Angka Kematian Bayi	1.000/KH	9,32	5,52	140,77%	7,42	140,77%
Rata-rata Capaian Sasaran 3.2					90,57%		90,57%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **Sasaran 3.2**, yaitu: Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dari 3 indikator kinerja yang ada, indikator yang pertama yakni Angka Usia Harapan Hidup terealisasi 77,73 tahun dengan capaian kinerja sebesar 100,16%. Sedangkan untuk 2 (dua) indikator kinerja lainnya, yakni Angka Kematian Ibu masih terjadi 20 kasus atau realisasinya 172,60/100.000 Kelahiran Hidup. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja rendah karena terjadi kasus kematian melebihi target 102/100.000 KH. Tetapi untuk indikator angka kematian bayi dapat ditekan dari target sebanyak 9,32/1000 KH menjadi 5,52/1000 KH atau hanya terjadi 64 kasus di tahun 2021. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 90,57% sehingga dapat dikategorikan Baik.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, maka capaian kinerja 2021 untuk Angka Kematian Ibu mengalami penurunan namun Angka Kematian Bayi realisasi di bawah target. Adapun perbandingan realisasi dan capaian untuk masing-masing indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel II.A.3.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021
Sasaran 3.2 Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat

No.	Indikator	Satuan	2020		2021		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	77,65	100%	77,6	77,73	100,16%
2.	Angka Kematian Ibu	100.000 /KH	57,08	144,04%	102	172,60	30,78%
3.	Angka Kematian Bayi	1.000/KH	7,42	119,35%	9,32	5,52	140,77%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran 3.2				121,13%			90,57%

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator kinerja tahun 2020 Angka kematian ibu adalah 57,08/100.000 KH menjadi 172,60/100.000 KH di tahun 2021, sedangkan angka kematian bayi tahun 2020 yaitu 7,42/ KH sedangkan capaian tahun 2021 sebesar 5,52/1.000 KH.

Kasus tahun 2021 terjadi 20 kasus kematian ibu melahirkan sedangkan tahun 2020 ada 7 kasus kematian ibu melahirkan sehingga ada peningkatan kasus yang sangat tinggi. Sedangkan kematian bayi terdapat 64 kasus tahun 2021 dan tahun 2020 terdapat 91 kasus kematian bayi sehingga terjadi penurunan kasus.

Pada kasus kematian Ibu di tahun 2021 sejumlah 20 kasus disebabkan antara lain : Covid 19 (15 kasus), Pre eklamsi (2 kasus), Jantung (2 kasus), Autoimun (1 Kasus). Kasus kematian ibu diatas sudah ditangani oleh Dokter spesialis Obsgyn dan Dokter Internis, namun karena kondisi penyakit COVID dengan komplikasi penyakit paru dan penyakit metabolic, hal ini akan menjadi penyulit bagi ibu dengan adanya kehamilan sehingga menyebabkan kondisi kesehatan ibu sulit dipertahankan, dan mengalami komplikasi lainnya, sehingga pada kasus ini benar-benar sulit ditangani walaupun sudah dirujuk ke Rumah Sakit.

Pada kasus kematian Bayi usia 0-11 bulan menurun ditahun 2021. Kasus kematian Bayi diatas sudah ditangani oleh Dokter spesialis Anak dan meninggal di RS. Pada kematian bayi usia 0-28 hari ada 45 kasus penyebabnya antara lain adalah kelainan Kongenital 16 kasus, BBLR 13 kasus, Asfiksia 8 kasus, sepsis 1 kasus, BBLSR 4 kasus, infeksi paru 1 kasus, respirasi distres sindrom 1 kasus, Anemia 1 kasus.

Kematian bayi usia 29 hari – 11 bulan terdapat 19 kasus terdiri dari kelainan jantung 8, Pnemonia 2 kasus, DHF 2 kasus, Diare dan syok hipovolemik 2 kasus, Infeksi paru 2 kasus, perdarahan otak 1 kasus, Atresia bilirubi 1 kasus, Suspeck bronkopnemonia dan diare 1 kasus.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2021 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.A.3.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 3.2 Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

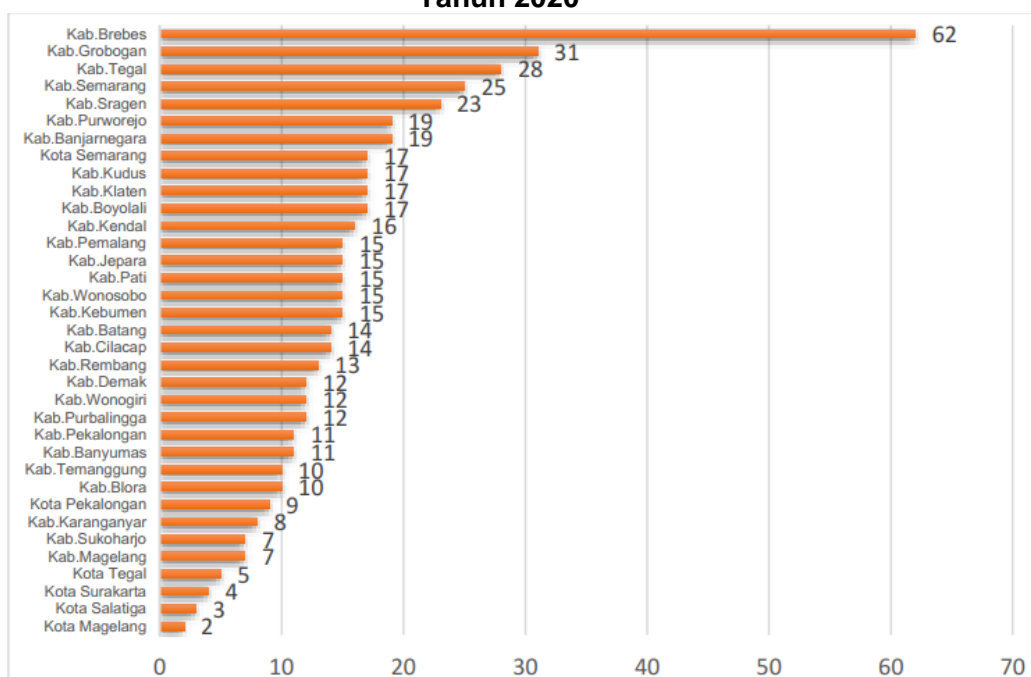
No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2021	Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
1	2	3	4	5	6
1	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	77,73	77,60	100,16%
2	Angka Kematian Ibu	100.000/ KH	172,60	100	30,78%
3	Angka Kematian Bayi	1.000/ KH	5,52	9,32	140,77%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran 3.2					90,57%

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD dari 2 indikator yang sudah dapat terealisasi melampaui target adalah : Angka Harapan Hidup 77,73 tahun dan indikator angka kematian bayi (AKB) 5,52. Sedangkan indikator yang belum memenuhi

target adalah Angka kematian ibu 172,6. Jika dibandingkan terhadap capaian kinerja akhir tahun RPJMD (tahun 2021) rata-rata capaian kinerja 90,57%, hal tersebut menunjukkan kinerja pencapaian sasaran ini termasuk dikategorikan Baik.

Sebagai perbandingan capaian realisasi indikator kinerja sasaran 3.2 di tingkat regional dapat terlihat dalam grafik berikut :

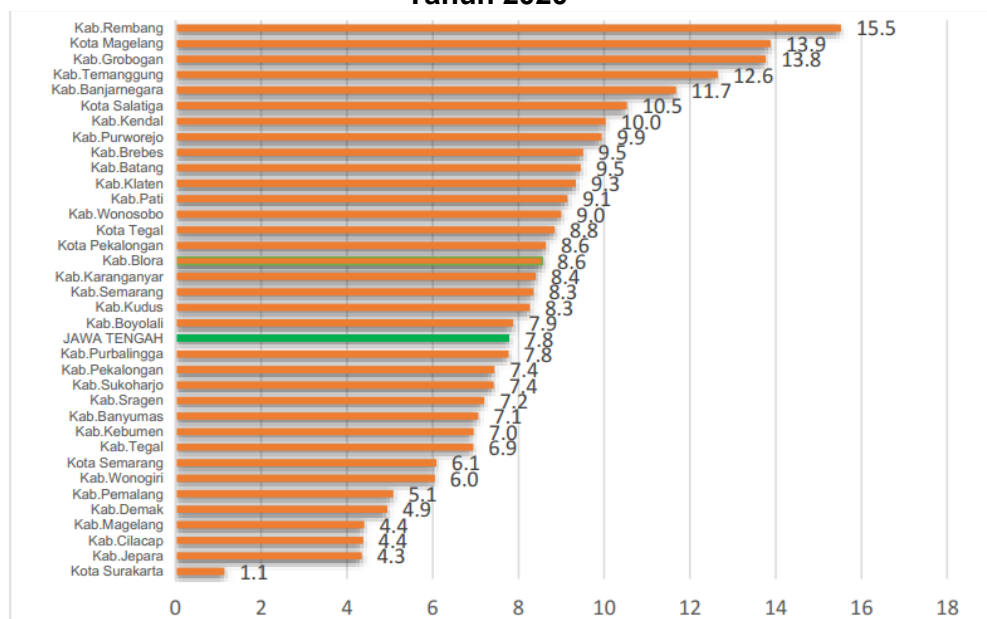
Gambar D.4
Jumlah Kasus Kematian Ibu Menurut kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2020



Sumber : Data Program Kesga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Berdasarkan data di atas, kasus kematian ibu menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo berada pada urutan ke 6 (enam) dari bawah dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak tujuh kasus.

Gambar D.5
Angka Kematian Bayi Menurut kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020



Sumber : Data Program Kesga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Berdasarkan data di atas, angka kematian bayi menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo berada pada urutan ke 13 (tigabelas) dari bawah.

Sedangkan realisasi indikator kinerja tahun 2021 yang dapat dibandingkan dengan target nasional, yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel II.A.3.2.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3.2 dengan Target Nasional

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Nasional (SPM)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH.	172,60	306	Angka Kematian Ibu di bawah target nasional.
2.	Angka Kematian Bayi	/1000 KH	5,52	24	Angka kematian bayi dibawah target nasioal.

Berdasarkan tabel tersebut, jika dibandingkan dengan target nasional baik SPM, maka pencapaian target indikator tahun 2021 untuk kedua indikator tersebut di bawah target nasional, artinya angka

kematian ibu dan angka kematian bayi sudah dapat ditekan sehingga sudah lebih baik dari target nasional.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran ini adalah:

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian Ibu sebanyak 20 kasus di tahun 2021 yang disebabkan antara lain : Covid 19 (15 kasus), Pre eklamsi (2 kasus), Jantung (2 kasus), Autoimun (1 Kasus) 20 kasus kematian ibu diatas sudah ditangani oleh Dokter spesialis Obsgyn dan Dokter Internis/Jantung di Rumah Sakit, namun karena kondisi penyebab kematian seperti PEB, atau penyakit metabolik ini akan menjadi penyulit bagi ibu dengan adanya kehamilan sehingga menyebabkan ibu sulit dipertahankan,sehingga pada kasus ini benar-benar sulit ditangani walaupun sudah dirujuk ke Rumah Sakit,demikian juga dengan COVID 19 akan memperberat kondisi ibu hamil sehingga penanganan yang sudah dilaksanakan di Rumah Sakit akan mengalami kesulitan karena adanya komplikasi pada paru yang berakibat pada gagal nafas.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian Bayi Umur 0-11 bulan sebanyak 64 kasus yang disebabkan antara lain kelainan kongenital 24 kasus, BBLR 13 kasus, Asfiksia 8 kasus, Sepsis 1 kasus, BLSR 4 kasus, Anemia 1 kasus, Infeksi paru 3 kasus, Respiratori Distres sindrom 1 kasus, DHF 2 kasus, syock hipovolemik 1 kasus, perdarahan otak 1 kasus, atresia bilirubin 1 kasus , susp bronkopnemonia 1 kasus, pnemonia 2 kasus, diare 1 kasus. Penyebab kematian bayi tertinggi adalah kelainan konginetal dan BBLR. Bayi yang mempunyai kelainan kongenital mengalami gangguan tumbuh kembang sehingga tidak dapat bertahan hidup karena kondisi kelainan organ,sehingga bayi tidak dapat menerima asupan nutrisi

dan kematangan organ belum sempurna dengan baik di banding bayi normal.

Bayi dengan BBLR kecenderungan untuk bertahan hidup rendah karena berat badan bayi yang kurang dari 2500 gram yang menyebabkan bayi tidak dapat bertahan hidup ,pada Bayi Baru Lahir Rendah (BBLR) dengan berat kurang dari 2500 juga sering mengalami gangguan tumbuh kembang yang akan menambah komplikasi karena tubuh bayi rentan terhadap infeksi sehingga menjadikan sakit bahkan sampai pada kematian.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka solusi yang akan ditempuh beberapa strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan melalui FKTP Puskesmas dan swasta yang terakreditasi.
2. Peningkatan mutu pelayanan pada jejaring (BPM, RB, Klinik Pratama, dan RS).
3. Peningkatan Kualitas ANC terintegrasi Standar 10 T (GIZI, IMUNISASI, PTM, PROMKES, KESLING).
4. Peningkatan Kunjungan Rumah dengan kegiatan : pendataan keluarga sehat, deteksi dan pengawasan resiko tinggi, Kunjungan KF, Kunjungan KN sesuai standar.
5. Pemberian PMT pada Bumil KEK dan Balita Gizi Kurang.
6. Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita serta Sanggar Difabel di masing-masing wilayah Puskesmas.
7. Penyuluhan reproduksi remaja, Posyandu Remaja, Penundaan Usia Nikah, Kelas Caten.
8. Peningkatan Audit Maternal Perinatal (AMP) melalui Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi melibatkan Lintas Program, Lintas sektoral dan Organisasi Profesi.
9. Peningkatan Peran Stake Holders dalam hal ini Pemerintah melalui Lintas Sektoral dan Lintas Program terkait dalam Program

KIA-KB berupa dukungan kebijakan, program dan penganggaran kegiatan.

10. Penguatan pada Sistem Rujukan/ Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).

11. Pemberdayaan Masyarakat untuk :

- Perubahan Perilaku Paradigma Sehat.
- Perubahan Perilaku / Asuhan Sayang Ibu dan Bayi oleh Keluarga dan Masyarakat pada saat hamil, bersalin dan pasca persalinan/nifas.
- Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam Perilaku Hidup Sehat pada Masyarakat.
- Peningkatan Kesadaran dan Peran Aktif dari keluarga (suami, orang tua & anggota lain) dan kader, Toma, Karang Taruna, LSM dan swasta dalam penanggulangan masalah kesehatan yang ada diwilayahnya terutama masalah kesehatan KIA-KB termasuk pendampingan dan pengawasan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas baik normal maupun resiko tinggi.
- Peningkatan Desa Siaga Aktif Mandiri (PKD Aktif, Suami Siaga, Donor darah, Stiker P4K, dll).
- Vaksinasi COVID 19 pada ibu hamil Trimester 3.
- Menyusun Regulasi Perbup Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

Keberhasilan pencapaian sasaran di atas tidak terlepas dari dilaksanakannya Program dan kegiatan/ Sub Kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan yaitu:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 107.175.383.809,- dan terealisasi sebesar Rp. 80.875.904.537,- atau tercapai 75,45% dengan sisa anggaran Rp. 26.299.479.272,- atau 24,54%.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.845.802.750,- terealisasi sebesar Rp. 7.231.284.258,- atau tercapai 66,67% dengan sisa anggaran Rp. 3.614.518.492,- atau 33,33%.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 279.862.800,- terealisasi sebesar Rp. 207.946.900,- tercapai 74,30% dengan sisa anggaran Rp. 71.915.900,- atau 25,7%.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.371.609.400,- terealisasi sebesar Rp. 5.074.811.400,- atau tercapai 94,47% dengan sisa anggaran Rp. 296.798.000,- atau 5,53%.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 333.623.268.743,- terealisasi sebesar Rp. 300.056.943.224,- atau tercapai 89,94% dengan sisa anggaran Rp. 33.566.325.519,- atau 10,06%.

4. Tujuan keempat : Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2021, maka pencapaian kinerja untuk masing-masing sasarannya adalah sebagai berikut :

a. Sasaran 4.1 Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.

Pencapaian kinerja sasaran 4.1 Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, tercermin pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.A.4.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 4.1
Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang
komprehensif

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Capaian 2020	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penurunan Angka Kemiskinan	%	0,20	-0,75	-375%	-0,7	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **Sasaran-4.1** Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Penurunan Angka kemiskinan dari target 0,20% terealisasi -0,75% atau dengan capaian kinerja -375%, sehingga dapat dikategorikan Kurang atau dapat diartikan kemiskinan meningkat jumlahnya.

Sedangkan untuk perbandingan pencapaian Sasaran 4.1 tahun 2020 dan tahun 2021 tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.A.4.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021
Sasaran 4.1 Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang
komprehensif

No.	Indikator	Satuan	2020		2021		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penurunan Angka Kemiskinan	%	-0,7	-350	0,20	-0,75	-375

Meningkatnya angka kemiskinan pada tahun 2021 disebabkan Pandemi Covid 19 yang melanda tingkat lokal, nasional bahkan internasional serta berdampak terhadap lingkungan sosial ekonomi masyarakat. Kehilangan mata pencaharian yang menimpa sebagian masyarakat di masa Pandemi berakibat terhadap daya beli masyarakat

yang menurun dan membawa pada kondisi masyarakat ke dalam kelompok kategori miskin.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2021 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.A.4.1.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 4.1 Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d 2021	Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
1	2	3	4	5	6
1.	Penurunan Angka Kemiskinan	%	8,23	7,6	91,71%

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan indikator prosentase penurunan angka kemiskinan apabila diperbandingkan dengan target jangka menengah (RPJMD) capaiannya tidak memenuhi target, dari target 7,6% realisasinya 8,23%. Prosentase angka kemiskinan tahun 2021 tersebut diatas bersumber data BPS Kabupaten Sukoharjo.

Pencapaian Sasaran Strategis 4.1 ini didukung dengan pelaksanaan:

1. Program Penanggulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 74.734.000,- (tingkat capaian 99,65%) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 266.000,- atau 0,35% dari total anggaran.

2. Program Rehabilitasi Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.173.787.600,- dan realisasi sebesar Rp. 867.502.200,- (tingkat capaian 73,91%) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 306.285.400,- atau 26,09% dari total anggaran.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.966.578.000,- dan realisasi sebesar Rp. 7.918.063.000,- (tingkat capaian 99,39%) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 44.515.000,- atau 0,61% dari total anggaran.
4. Program Penanganan Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 115.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 102.581.500,- (tingkat capaian 89,20%) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 12.418.500,- atau 10,8% dari total anggaran.

b. Sasaran 4.2 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pencapaian kinerja sasaran 4.2 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tercermin pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.A.4.2.1
Capaian Kinerja Sasaran 4.2
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Capaian 2020	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pembangunan Gender		97,07	96,52	99,43%	96,49	99,40%
2	Prosentase cakupan Penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak	%	100	100	100%	100	100,00%
Rata-rata Capaian Sasaran 4.2					99,72%		99,7%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran 4.2**, yaitu Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan indikator kinerja indeks pembangunan gender dan prosentase cakupan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak; menunjukkan bahwa kinerjanya mencapai angka 96,72 dan **100%** dari target awal, hal tersebut termasuk dalam kategori **Baik**.

Jenis kasus kekerasan pada perempuan dan anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabell.A.4.2.2
Kasus Kekerasan Perempuan Tahun 2021

No	Jenis Kasus Kekerasan	Jumlah Kasus
1	KDRT	7
2	Pornografi	5
3	Kekerasan Fisik	4
4	Perbuatan Cabul	3
5	Pelecehan Seksual	1
6	Penelantaran	1
7	Perbuatan Zina	1
8	Keterangan Palsu	1
9	Penipuan	1
10	Penganiayaan	1
Jumlah		25

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus KDRT menjadi kasus teratas dengan jumlah 7 kasus, salah satu faktor KDRT adalah factor ekonomi rumah tangga. Kemudian disusul pornografi dengan jumlah 5 kasus, kekerasan fisik 4 kasus dan perbuatan cabul 3 kasus. Sementara kasus pelecehan seksual, penelantaran, perbuatan zina, keterangan palsu, penipuan dan penganiayaan masing-masing terdapat 1 kasus. Terkait kasus kekerasan anak tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.A.4.2.3
Kasus Kekerasan Anak Tahun 2021

No	Jenis Kasus Kekerasan	Jumlah Kasus
1	Pelecehan seksual	20
2	Hak asuh anak	5
3	Kekerasan Phykis	8
4	Postingan di HP	1
5	Pencurian	1
6	Terbakar	1
7	Bencana (rumah roboh)	1
8	Penelantaran	1
Jumlah		38

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo

Pada tabel di atas kasus kekerasan anak memiliki jumlah kasus sebanyak 38 didominasi oleh kasus pelecehan seksual sebanyak 20 kasus. Salah satu penyebab pelecehan seksual adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan sebagian pelaku adalah orang terdekat.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun 2021, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel II.A.4.2.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021
Sasaran 4.2 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No.	Indikator	Satuan	2020		2021		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pembangunan Gender	%	96,49	99,40%	97,07	96,52	99,43%
2.	Prosentase cakupan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak	%	100	100,00%	100	100	100,00%

Berdasarkan tabel di atas, indeks pembangunan gender keadaannya masih belum memenuhi target yang ditetapkan baik pada tahun 2020 dan 2021. Untuk penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak capaian tahun 2021 sama dengan tahun 2020 yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kasus perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan penanganan yang semestinya.

Sebagaimana tersebut di atas bahwa pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 sebesar 96,52 dari target 97,07%. Tahun 2020 IPG Kabupaten Sukoharjo adalah 96,49. Walaupun dibandingkan dengan IPG tahun 2020 ada kenaikan sebesar 0,03 akan tetapi ada faktor yang menyebabkan target IPG Tahun 2021 belum tercapai sesuai target, yaitu masih adanya pandemi yang berpengaruh terhadap pendapatan sebagian masyarakat menurun, sehingga pengeluaran perkapita juga turun. Kaum perempuan lebih banyak berhemat untuk menyesuaikan pendapatan.

Alternatif solusi yang ditempuh dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Gender adalah pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kegiatan worksop, pelatihan dan pameran pembangunan hasil karya perempuan.

Sedangkan untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2021 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.A.4.2.5
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 4.2 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2021	Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Pembangunan Gender	%	96,52	97,10	99,40%
2.	Prosentase cakupan penanganan Kasus kekerasan perempuan dan anak	%	100	100	100,00%
Rata-rata Capaian Sasaran 4.3					99,7%

Indeks Pembangunan Gender pada tabel di atas belum memenuhi target akhir pada RPJMD. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah dan IPG Nasional tahun 2021 maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.A.4.2.6
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Pembangunan Gender	%	96,52	92,48	91,27

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 dengan nilai 96,52 melebihi Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dengan masing–masing nilai 92,48 dan 91,27.

Jika melihat capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 yang sudah mencapai 100% adalah prosentase cakupan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Apabila dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010, maka capaian indikator persentase cakupan penanganan kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada sasaran ini sudah melampaui target SPM yang ditetapkan yakni 50%.

Tabel II.A.4.2.7
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target SPM

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target SPM	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Prosentase cakupan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak	%	100%	50%	Sudah Melampaui target SPM

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 4.2 untuk indikator Indeks Pembangunan Gender bersumber dari:

1. Program Pengarusutamaan Gender dengan anggaran sebesar Rp. 454.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 347.459.000,- atau 76,46%.
2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 105.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 95.805.000,- atau 91,24%.
3. Program Pengelolaan Sistem data gender dan anak dengan anggaran sebesar Rp. 35.550.000,- terealisasi sebesar Rp. 33.230.000,- atau 90,66%.
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan anggaran sebesar Rp. 145.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 141.600.000,- atau 97,66%.

Sedangkan indikator Prosentase cakupan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak bersumber dari:

1. Program Perlindungan Perempuan (APBD dan DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 391.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 173.095.200,- atau 44,27%
2. Program Perlindungan Khusus Anak (APBD dan DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 330.830.000,- terealisasi sebesar Rp. 236.440.000,- atau 71,47%.

Dari beberapa program yang telah dilaksanakan tersebut terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan anggaran program yaitu:

1. Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus terlambat turun (triwulan III).

2. Alokasi dana ada yang tidak bisa disalurkan karena keterbatasan kasus kekerasan perempuan dan anak.
3. Realitas kegiatan yang ada tidak terakomodir pada petunjuk teknis. Alternatif solusi yang dilakukan berkaitan kendala tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Aktif berkomunikasi dengan instansi teknis terkait dengan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis.
 2. Antisipasi apabila terjadi lonjakan kasus kekerasan.
 3. Mengajukan ke Badan Keuangan Daerah untuk usulan indeks.

c. Sasaran 4.3 Meningkatnya kesempatan kerja.

Pencapaian kinerja Sasaran 4.3 Meningkatnya Kesempatan Kerja, tercermin pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel II.A.4.3.1
Capaian Kinerja Sasaran 4.3
Meningkatnya kesempatan kerja

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Capaian 2020	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,63	3,32	108,54%	6,93	98,78%
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,05	68,78	99,61%	68,74	99,05%
Rata-rata capaian Sasaran 4.3					104,08%		98,92%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-4.3 Meningkatnya kesempatan kerja, dengan indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka realisasi sebesar 3,32 dari target sebesar 3,63. Kemudian indikator tingkat partisipasi angkatan kerja realisasi sebesar 68,78 dari target awal 69,05.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel II.A.4.3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021
Sasaran 4.3 Meningkatnya kesempatan kerja

No.	Indikator	Satuan	2020		2021		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tingkat Pengangguran terbuka	%	6,93	9,1%	3,63	3,32	108,54%
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,74	99,55%	69,05	68,78	99,61%

Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, maka pencapaian kinerja **Sasaran 4.3** pada tahun 2021 untuk indikator tingkat pengangguran terbuka terjadi penurunan sebesar 3,61%. Angka prosentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,32% tersebut juga lebih rendah dari Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,95%. Penurunan jumlah tingkat pengangguran di tahun 2021 dikarenakan masyarakat telah mampu beradaptasi dengan kondisi Covid-19 dan mampu bekerja untuk menghasilkan pendapatan.

Di sisi lain menurunnya angka tingkat pengangguran terbuka juga disebabkan karena tuntutan ekonomi dimana masyarakat tetap harus bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar, selain itu tidak terdapat kompensasi yang diberikan pemerintah kepada penganggur.

Kemudian Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari target 69,05 terealisasi 68,78 atau sebesar 99,61%, sedangkan TPAK Provinsi Jawa Tengah sebesar 69,58. Kenaikan TPAK Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2020 sebesar 68,74 menjadi 68,78 disebabkan peningkatan jumlah angkatan kerja. Solusi atau upaya yang ditempuh dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja di waktu mendatang adalah menjaga iklim investasi dan kondusivitas ketenagakerjaan di Kabupaten Sukoharjo, disamping itu peningkatan UMK (Upah Minimum Kabupaten) juga salah satu factor meningkatnya partisipasi angkatan kerja.

Sedangkan untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2021 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.A.4.3.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2021 dengan Target Akhir
RPJMD Sasaran 4.3 Meningkatkan kesempatan kerja

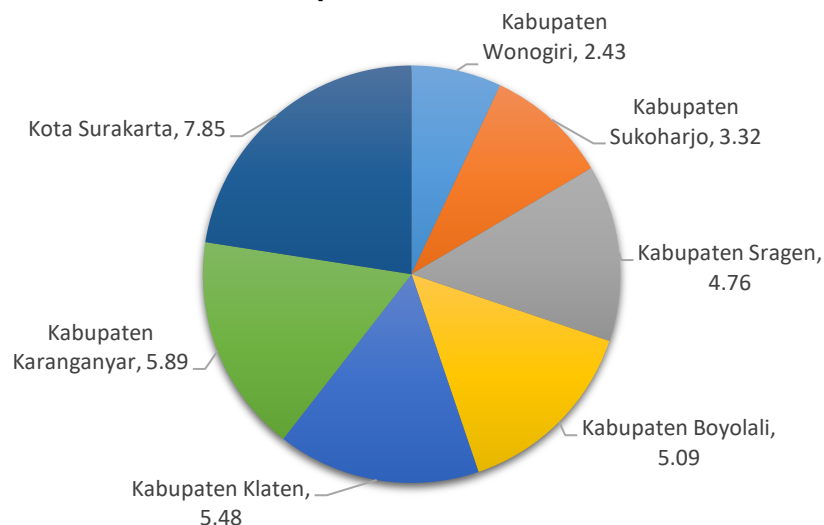
No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2021	Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,32	3,28	98,78%
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,78	69,44	99,05%
Rata-rata capaian Sasaran 4,4					98,92%

Pencapaian Sasaran 4.3 sampai dengan Tahun 2021 ini jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan hasil realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,32 dari target 3,28 atau dengan capaian prosentase capaian sebesar 98,78%. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) realisasi 68,78% dari target 69,44% atau dengan capaian 99,05%.

Untuk melihat perbandingan indikator tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota sekitar, maka dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar D.6

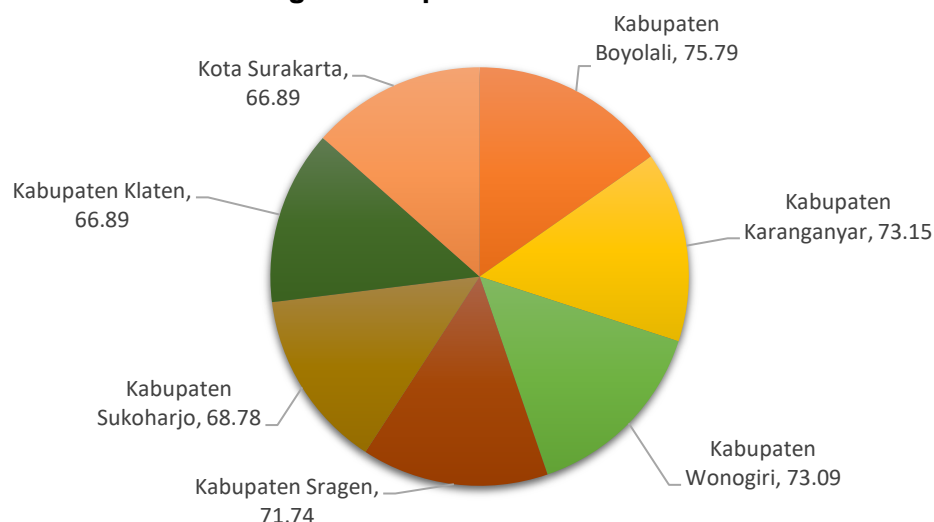
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa capaian tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sukoharjo sebesar 3,32 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Wonogiri dengan capaian sebesar 2,43. Namun demikian capaian kabupaten Sukoharjo sebesar 3,32 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Sragen sebesar 4,76; Kabupaten Boyolali sebesar 5,09; Kabupaten Klaten sebesar 5,48; Kabupaten Karanganyar sebesar 5,89; dan Kota Surakarta sebesar 7,85.

Untuk melihat perbandingan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja pada Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota sekitar, maka dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar D.7
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota Sekitar



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa capaian tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Sukoharjo sebesar 68,78% hanya lebih tinggi dari Kota Surakarta sebesar 66,89% dan Kabupaten Klaten sebesar 66,89%.

Untuk melihat capaian kinerja tahun 2021 antara Kabupaten Sukoharjo dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.A.4.3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 antara Kabupaten Sukoharjo Dengan Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

No.	Indikator	Satuan	Kabupaten Sukoharjo	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,32	5,95	6,49
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,78	69,58	-

Apabila dibandingkan dengan capaian target dengan Provinsi Jawa Tengah, maka tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Sukoharjo sebesar 3,32% relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 5,95% dan Nasional sebesar 6,49%. Sedangkan untuk indikator tingkat partisipasi angkatan kerja jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah maka capaian Kabupaten Sukoharjo sebesar 68,78% lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 69,58%.

Anggaran Pendukung pencapaian sasaran Strategis 4.3 bersumber dari Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja dan program Hubungan Industrial dengan Jumlah Alokasi Anggaran sebesar Rp.1.217.193.700,- terealisasi sebesar Rp. 1.116.820.200,- atau (91,75%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 100.373.500,- (8,25%).

5. Tujuan kelima : Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik (barang).

Dalam mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2021, maka pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

a. Sasaran 5.1 Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Pencapaian kinerja pada sasaran 5.1 Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tercermin pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.A.5.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 5.1 Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Capaian 2020	% Capaian thd.Target Akhir RPJMD (2021)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	6%	12,40%	206,67%	10,09%	157%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **Sasaran 5.1**, yaitu : Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan indikator kinerja prosentase penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat terealisasi 12,40% dari target 6%, dengan prosentase capaian sebesar 206,67% sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Indikator Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan indikator kumulatif dimana realisasi sampai dengan tahun 2020 berjumlah 39,57% sehingga jika ditambahkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 12,40% maka realisasi sampai dengan tahun 2021 sebesar 51,97% dari target akhir RPJMD sebesar 33% maka capaiannya adalah 157%.

Tingginya capaian target kinerja pada sasaran ini disebabkan karena adanya sinergitas dalam program penurunan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari berbagai pihak baik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun pihak swasta. Jumlah penanganan RTLH Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2016 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.A.5.1.2
Penanganan RTLH Kabupaten Sukoharjo

No.	Tahun	Jumlah Penanganan RTLH
1	2016	1.254
2	2017	1.222
3	2018	1.356
4	2019	1.469
5	2020	1.815
6	2021	2.230
Jumlah		9.346

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa penanganan RTLH Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2017 sampai tahun 2021 selalu mengalami kenaikan. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2021 dengan kenaikan sebesar 415 unit.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian untuk indikator ini sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel II.A.5.1.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan 2021
Sasaran 5.1 Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat
berpenghasilan rendah

No.	Indikator	Satuan	2020		2021		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	10,09%	167%	6%	12,40%	206,67%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2021 ini mengalami peningkatan dari 10,09% pada tahun sebelumnya menjadi 12,40%.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2021 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.A.5.1.4
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD
Sasaran 5.1 Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2021	Target Akhir RPJMD	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
1	2	3	4	5	6
1.	Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	51,97%	33%	157%

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 ini melebihi dari target akhir yang ditetapkan RPJMD. Prosentase penurunan rumah tidak layak huni ditargetkan 33% pada akhir RPJMD, namun sampai dengan tahun 2021 telah tercapai 51,97%.

Untuk diketahui sampai tahun 2020 telah terbangun 7.116 unit dan tahun 2021 telah terbangun 2.230 sehingga total telah terbangun 9.346 unit dari target akhir RPJMD tahun 2021 sejumlah 6.000 rumah tidak layak huni.

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 5.1 ini adalah Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha, Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan alokasi anggaran Rp. 41.064.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 41.064.000.000,- atau (100%). Adapun sumber dana dari APBD sebesar 6.000.000.000,- untuk 400 penerima, DAK sebesar Rp. 2.760.000.000,- untuk 138 penerima, bantuan keuangan Provinsi sebesar Rp. 2.304.000.000,- untuk 192 penerima, dan BSPS sebesar Rp. 30.000.000.000,- untuk 1.500 penerima. Total anggaran

pembangunan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2021 mencapai Rp. 41.064.000.000,- untuk 2.230 penerima dengan RTLH yang terbangun sebanyak 2.230 unit.

b. Sasaran 5.2 Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk

Pencapaian kinerja pelayanan dengan sasaran 5.2 Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk, tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.A.5.2.1
Capaian Kinerja Sasaran 5.2
Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Capaian 2020	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cakupan pelayanan air minum	%	100	95,09	95,09%	92,26	95,09%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran 5.2**, yaitu : Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk, dengan indikator kinerja berupa Cakupan pelayanan air minum, dari target yang ditetapkan 100% dapat terealisasi 95,09% atau dengan capaian kinerja 95,09%, sehingga termasuk kategori **Baik**.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian untuk indikator ini sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel III.A.5.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021
Sasaran 5.2 Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cakupan pelayanan air minum	%	92,26	104,8%	100	95,09	95,09%

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa realisasi target untuk indikator Cakupan pelayanan air minum telah naik dibanding tahun sebelumnya dimana sampai tahun 2021 capaiannya 95,09%.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2021 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.A.5.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD
Sasaran 5.2 Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2021	Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
1	2	3	4	5	6
1.	Cakupan pelayanan air minum	%	95,09	100%	95,09%

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD masih belum mencapai target dengan prosentase pada tahun 2021 mencapai 95,09%.

Untuk melihat perbandingan cakupan pelayanan air minum pada Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Jawa tengah dan Nasional maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.A.5.2.4
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2021 dengan Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

No	Indikator	Satuan	Sukoharjo	Sura karta	Wonogiri	Karang anyar	Klaten	Boyo lali	Sragen	Prov. Jawa Tengah	Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cakupan pelayanan air minum	%	95,09	99,82	98,01	98,65	97,84	93,42	98,33	93,62	90,78

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Kabupaten Sukoharjo pada indikator cakupan pelayanan air minum lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Tengah yang tercapai 93,62%. Capaian Kabupaten Sukoharjo pada indikator ini juga lebih tinggi dari nasional yang memiliki capaian 90,78%.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, tingkat capaian cakupan pelayanan air minum Kabupaten Sukoharjo lebih rendah dari lima Kabupaten/Kota yakni Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sragen. Meskipun demikian, capaian Kabupaten Sukoharjo masih lebih tinggi dari Kabupaten Boyolali.

Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak mendapatkan program terkait air minum dari Kementerian Pekerjaan Umum disebabkan Kabupaten Sukoharjo dianggap capaian dalam penyediaan air minum sudah cukup tinggi yaitu kurang lebih 90%. Pada tahun 2020 Kabupaten Sukoharjo kembali mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Air Minum, sebagai Belanja Hibah dengan total sebesar Rp. 2.600.000.000,-. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan barang/ Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun anggaran 2020. Untuk selanjutnya dianggarkan lagi dan dapat dilaksanakan di tahun anggaran 2021 yang dikerjakan secara swakelola, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.A.5.2.5
Dana Alokasi Khusus Belanja Hibah

No	Desa	Kecamatan	Nama LKM	Jumlah Hibah
1	Karangtengah	Weru	Sendang Wening 3	Rp. 325.000.000,-
2	Karanganyar	Weru	Wareh aji	Rp. 330.000.000,-
3	Alasombo	Weru	Tirta Wening	Rp. 325.000.000,-
4	Tawang	Weru	Tirtomijoyo 4	Rp. 325.000.000,-
5	Ngreco	Weru	Manunggal	Rp. 320.000.000,-
6	Kamal	Bulu	Gemah Ripah	Rp. 330.000.000,-
7	Puron	Bulu	Tirto Langgeng	Rp. 325.000.000,-
8	Puhgogor	Bendosari	Tirta Sari	Rp. 319.086.976,-
Jumlah				Rp. 2.599.086.976,-

Sumber : DPUPR Kabupaten Sukoharjo

Selain DAK Belanja Hibah tersebut, terdapat Program Hibah Insentif Daerah (HID) Pamsimas III yang dikerjakan secara swakelola. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum tersebut untuk desa yang telah memiliki capaian akses air minum mendekati 100% (sebagai *reward* terhadap capaian air minum tersebut) dan pernah mendapat Program Pamsimas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.A.5.2.6
Hibah Insentif Daerah Tahun 2021

No.	Desa	Kecamatan	Jumlah Hibah
REGULER HID 2021			
1	Juron	Nguter	Rp. 245.000.000,-
2	Kadokan	Grogol	Rp. 245.000.000,-
3	Kagokan	Gatak	Rp. 245.000.000,-
4	Gentan	Bulu	Rp. 245.000.000,-
5	Tepisari	Polokarto	Rp. 245.000.000,-
6	Rejosari	Polokarto	Rp. 245.000.000,-
7	Karanganyar	Weru	Rp. 245.000.000,-
8	Paluhombo	Bendosari	Rp. 245.000.000,-
9	Sanggang	Bulu	Rp. 245.000.000,-
Jumlah			Rp. 2.205.000.000,-
HID MAMA 2021			
1	Kayuapak	Polokarto	Rp. 300.000.000,-
Jumlah			Rp. 300.000.000,-
Jumlah Total			Rp. 2.505.000.000,-

Sumber : Pamsimas 2021

Sedangkan kondisi cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Sukoharjo bersumber dari data BPS, PDAM, DPUPR dan Dinas Kesehatan sebagai berikut :

Tabel II.A.5.2.7
Cakupan Pelayanan Air Minum Kabupaten Sukoharjo

NO	KEC/PUSK	DESA/KEL	JUMLAH KK	SUMBER AIR MINUM											
				SGL TERLINDUN GI	JML KK AKSES SGL	SUMUR BOR	JML KK AKSES SUMUR BOR	SR PAMSIMAS	JML KK AKSES SR PAMSIMAS	SR PDAM	JML KK AKSES SR PDAM	JML AIR MINUM	JML KK AKSES AIR MINUM	% KK AKSES AIR MINUM	
1	2	3	4	6	7	7	8	9	10	11	12				
1	WERU		13	15.756	13.375	13.375	0	0	1.893	1.893	0	0	15.268	15.268	96,90
2	BULU		12	12.545	3.736	6.039	0	0	5.183	5.235	150	236	9.069	11.510	91,75
3	TAWANGSARI		12	18.246	4.960	6.228	3.151	4.006	2.907	3.670	2.294	4.045	13.312	17.949	98,37
4	NGUTER		16	18.472	11.501	11.501	1.452	1.452	2.808	2.808	180	180	15.941	15.941	86,30
5	SUKOHARJO		14	24.516	21.937	22.851	0	0	1	100	1.516	1.516	23.454	24.467	99,80
6	BENDOSARI		14	19.797	6.929	8.243	6.282	7.428	1.425	1.792	2.085	2.334	16.721	19.797	100,00
7	POLOKARTO		17	23.065	7.572	10.032	160	160	4.526	12.873	0	0	12.258	23.065	100,00
8	MOJOLABAN		15	31.026	14.126	20.985	3.233	3.443	0	0	1.737	1.737	19.096	26.165	84,33
9	GROGOL		14	39.579	9.154	9.205	3.151	4.659	4	748	23.894	23.894	36.203	38.506	97,29
10	BAKI		14	23.758	10.969	15.136	4.751	6.000	186	198	2.417	2.425	18.323	23.759	100,00
11	GATAK		14	17.882	184	522	13.489	13.489	272	458	0	0	13.945	14.469	80,91
12	KARTASURA		12	35.051	9.600	11.575	15.628	18.293	0	0	5.035	5.183	30.263	35.051	100,00
JUMLAH (KAB/KOTA)			167	279.693	114.043	135.692	51.297	58.930	19.205	29.775	39.308	41.550	223.853	265.947	95,09

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan data tersebut diatas termasuk kategori baik, hal tersebut mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel II.A.5.2.8
Standar Pelayanan Minimal Jenis Layanan Dasar Air Minum

No.	Jenis Layanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
			Indikator	Nilai		
1.	Air minum	Cluster Pelayanan	Tersedianya akses air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60/liter/orang/hari		2014	Termasuk Dalam Cluster Pelayanan "Baik"
		Sangat buruk		40%		
		Buruk		50%		
		Sedang		70%		
		Baik		80%		
		Sangat Baik		100%		

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 5.2 diatas adalah program Pengelolaan dan Pengembangan

Sistem Penyediaan Air Minum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.800.184.700,- terealisasi sebesar Rp. 2.758.453.976,- atau tercapai 98,55% dengan sisa anggaran Rp. 41.730.724,- atau 1,45%.

c. Sasaran 5.3 Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan).

Sedangkan untuk pencapaian kinerja pelayanan dengan sasaran 5.3 Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan), tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.A.5.3.1
Capaian Kinerja Sasaran 5.3
Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan)

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Capaian 2020	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan pelayanan sanitasi	%	100	91,73	91,73%	97,91	91,73%
2	Cakupan Layanan Persampahan	%	40	44,38	110,95%	47,01	110,95%
Rata-rata Capaian Sasaran 5.3					101,34%		101,34%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **Sasaran-5.3**, yaitu: Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan), dari 2 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa rata-rata capaian kinerjanya mencapai 101,34% sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa, indikator kinerja cakupan pelayanan sanitasi pada Sasaran-5.3, realisasi mencapai 91,73% dari target sebesar 100% atau pencapaian targetnya

mencapai 91,73%. *Terhitung mulai tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak mendapatkan alokasi dana dari Pemerintah Pusat dengan pertimbangan ketersediaan jamban dan IPAL Komunal di Kabupaten Sukoharjo mencapai angka sekitar 75%. Alokasi dana yang diperoleh hanya untuk belanja Pemeliharaan 2 IPAL (Instalasi Pengelola Air Limbah) berlokasi di Kelurahan Jombor Bendosari dan desa Gumpang Kartasura dan 1 IPLT (Instalasi Pengolah Lumpur Tinja) di Mojorejo Bendosari.*

Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo mendapatkan pengalihan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo untuk kegiatan fisik berupa pembangunan IPAL skala Permukiman minimal 50 KK dan pembangunan TPS 3R yang dilakukan secara swakelola berikut dengan Kegiatan Penunjang berupa Jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (penugasan) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.A.5.3.2
DAK Fisik Pembangunan IPAL dan Pembangunan TPS3R
secara Swakelola

Secara Swakelola					
No.	Kegiatan	Desa	Kecamatan	Nama KSM	Jumlah Hibah
A	KEGIATAN FISIK				
1	Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK	Trangsan	Gatak	Garuda	Rp. 500.000.000,-
2		Gumpang	Kartasura	Krida Mandiri	Rp. 500.000.000,-
3		Wirogunan	Kartasura	Tisanan Sehat	Rp. 500.000.000,-
4	Pembangunan TPS 3R	Gedangan	Weru	Tirtomijoyo 4	Rp. 512.957.000,-
B	KEGIATAN PENUNJANG				
1	Jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (penugasan)				Rp. 72.800.000,-
Jumlah					Rp. 2.085.7757.000,-

Sumber: Bidang Cipta Karya DPUPR

Cakupan pelayanan sanitasi sebagaimana tersebut diatas berdasar data ketersediaan jamban mencakup jumlah KK/ rumah tangga yang mengakses jamban di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Akses jamban terdiri dari: Jamban Sehat Permanen (JSP), Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) dan Sharing (penggunaan jamban secara bersama/ menumpang rumah tangga lain), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.A.5.3.3
Data Ketersediaan Jamban Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah KK	DATA KEPEMILIKAN JAMBAN		
				JML JAMBAN SEHAT PERMANEN (JSP)	JML JAMBAN SEHAT SEMI PERMANEN (JSSP)	JML SHARING/ KOMUNAL
1	WERU	13	15.756	14.581	495	4
2	BULU	12	12.545	10.237	0	204
3	TAWANGSARI	12	18.246	17.418	79	0
4	NGUTER	16	18.472	17.009	31	227
5	SUKOHARJO	14	24.516	24.347	85	84
6	BENDOSARI	14	19.797	15.753	18	248
7	POLOKARTO	17	23.065	20.881	648	1.151
8	MOJOLABAN	15	31.026	30.782	57	151
9	GROGOL	14	39.579	37.802	416	416
10	BAKI	14	23.758	18.026	61	81
11	GATAK	14	17.882	17.362	187	234
12	KARTASURA	12	35.051	30.286	0	37
Jumlah		167	279.693	254.484	2.077	2.837

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data diatas maka dasar perhitungan untuk indikator kinerja cakupan pelayanan sanitasi adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah jamban sehat + jamban semi permanen/cubluk}}{\text{Jumlah KK}} \times 100\%$$

$$= 91,73\%$$

Sedangkan pada indikator kedua, yaitu cakupan layanan persampahan capaian kinerjanya sangat baik, yakni dari target yang ditetapkan yakni 40% tercapai sebesar 44,38% atau dengan prosentase sebesar 110,95%.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian untuk masing-masing indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel II.A.5.3.4
Capaian Kinerja Sasaran 5.3
Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan)

No.	Indikator	Satuan	2020		2021		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cakupan pelayanan sanitasi	%	97,91	103,63%	100	91,73	91,73%
2.	Cakupan layanan persampahan	%	47,01	134%	40	44,38	110,95%

Berdasarkan tabel di atas, terjadi penurunan realisasi kinerja dari tahun sebelumnya, pada indikator cakupan layanan persampahan yang menurun dari 47,01% pada tahun 2020 menjadi 44,38% pada tahun 2021. Untuk indikator cakupan layanan sanitasi juga terdapat penurunan realisasi kinerja dari 97,91% pada tahun 2020 menjadi 91,73% pada tahun 2021. Meskipun demikian realisasi untuk indikator Cakupan layanan persampahan sudah melampaui target yang ditetapkan.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2021 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.A.5.3.5
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 5.3 Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan)

No.	Tujuan	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2021	Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan pelayanan sanitasi	%	91,73	100	91,73%
2	Cakupan Layanan Persampahan	%	44,38	40	110,95%
Rata-rata Capaian Sasaran 5.3					101,34%

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD rata-rata capaian kinerjanya sudah mencapai 101,34%. Untuk indikator yang pertama, yakni cakupan pelayanan sanitasi, prosentase capaian sebesar 91,73%. Untuk indikator cakupan layanan persampahan realisasinya 110,95% melampaui target akhir RPJMD sebesar 40%.

Untuk melihat perbandingan cakupan pelayanan sanitasi Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan nasional maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IIIA.5.3.6
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2021 dengan Kabupaten/Kota
sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

No	Indikator	Satuan	Sukoharjo	Surakarta	Wonogiri	Karanganyar	Klaten	Boyolali	Sragen	Prov. Jawa Tengah	Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cakupan pelayanan sanitasi	%	91,73	88,73	92,97	95,38	95,37	87,72	89,89	83,28	80,29

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian Kabupaten Sukoharjo pada indikator cakupan pelayanan sanitasi lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah yang memiliki capaian 83,28%. Jika dibandingkan dengan nasional, capaian Kabupaten Sukoharjo juga lebih tinggi dari capaian nasional yang tercapai sebanyak 80,29%.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, capaian Kabupaten Sukoharjo pada indikator cakupan pelayanan sanitasi lebih rendah dari Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Klaten. Meskipun demikian, capaian Kabupaten Sukoharjo masih lebih tinggi dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen.

Adapun program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 5.3 ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.872.949.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.786.008.000,- (tingkat capaian 95,36%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 86.941.000,- atau 4,64%.
2. Program Pengelolaan Pengolahan Persampahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.079.238.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.907.263.000,- (tingkat capaian 92,23%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.171.975.000,- atau 7,77%.

Pencapaian indikator kinerja cakupan pelayanan persampahan yang melampaui 100% secara operasional dijabarkan dalam prosentase timbunan sampah yang tertangani atau telah diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah. Cakupan area timbunan sampah yang diangkut ke TPA meliputi 12 Kecamatan (Kota Kecamatan) dan belum menjangkau seluruh desa di Kabupaten Sukoharjo. Hal yang mendukung dalam pencapaian cakupan pelayanan persampahan tersebut di atas adalah armada truk pengangkut sampah yang berfungsi maksimal dalam mendukung pelayanan kebersihan. Jumlah armada sebanyak 33 unit truk sampah (terdiri 26 dump truk dan 7 armroll truk) dengan rotasi 2 kali sehari dan ada lembur di hari Sabtu dan Minggu. Rata-rata kapasitas truk adalah 10 kubik untuk dump truk dan 6 kubik untuk armroll truk.

Kendala yang ditemui dalam pengangkutan sampah adalah lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di desa Mojorejo semakin berkurang karena jumlah sampah yang masuk ke TPA semakin banyak. Selain itu sekarang banyak desa di Kabupaten Sukoharjo yang melakukan pengangkutan mandiri di TPA.

Dalam rangka peningkatan layanan persampahan diharapkan adanya pembuatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala kawasan sehingga sampah dapat diolah di dekat sumber sampah dan yang dibuang ke TPA tinggal residu saja.

6. Tujuan keenam : Meningkatkan dan memperkuat ketahanan pangan

Dalam mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2021, maka pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

a. Sasaran 6.1 Meningkatnya ketersediaan pangan dan tingkat konsumsi pangan masyarakat

Secara rinci pencapaian kinerja pada sasaran 6.1 Meningkatnya ketersediaan pangan dan tingkat konsumsi pangan masyarakat tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.A.6.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 6.1 Meningkatnya ketersediaan pangan dan tingkat konsumsi pangan masyarakat

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Capaian 2020	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat ketersediaan Pangan	%	200	217,68	108,84%	240,13	108,84%
2	Tingkat konsumsi Pangan (kalori)	%	100	100	100,00%	97,67	100,00%
Rata-rata Capaian Sasaran 6.1					104,42%		104,42%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **Sasaran 6.1**, yaitu Meningkatnya ketersediaan pangan dan tingkat konsumsi pangan masyarakat , dari 2 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya terlihat 1 (satu) indikator telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja kedua indikator dapat dikategorikan **Sangat Baik**, dengan rata-rata capaian sebesar **104,42%**.

Adapun perbandingan realisasi target untuk masing-masing indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel II.A.6.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021
Sasaran 6.1 Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Tingkat
Konsumsi Masyarakat

No.	Indikator	Satuan	2020		2021		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat ketersediaan Pangan	%	240,13	121,28%	200	217,68	108,84%
2	Tingkat Konsumsi pangan (kalori)	%	97,67	98,89%	100	100	100,00%

Berdasarkan perbandingan pada tabel diatas, terdapat realisasi indikator pada sasaran 6.1 yang melampaui target yaitu tingkat ketersediaan pangan utama. Walaupun capaian pada tahun 2021 lebih rendah daripada capaian pada tahun 2020, tetapi capaian pada 2 (dua) tahun terakhir tersebut masih lebih dari 200 %. Realisasi Indikator tersebut dipengaruhi jumlah ketersediaan pangan dan jumlah penduduk. Dari hasil capaian menunjukkan bahwa jumlah ketersediaan pangan di Kabupaten Sukoharjo melampaui jumlah kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Laju kenaikan jumlah penduduk masih bisa diimbangi oleh jumlah ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan realisasi indikator tingkat konsumsi pangan pada tahun 2021 sudah mencapai target yang ditetapkan dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target tersebut adalah pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Pola Konsumsi yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan yang semakin meningkat.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2021 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.A.6.1.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2021 dengan Target Akhir
RPJMD Sasaran 6.1 Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Tingkat
Konsumsi Masyarakat

No.	Tujuan	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2021	Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat ketersediaan pangan	%	217,68	200	108,84%
2	Tingkat Konsumsi Pangan (kalori)	%	100	100	100,00%
Rata-rata Capaian Sasaran 6.1					104,42%

Dalam tabel dimaksud untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD menunjukkan indikator tingkat ketersediaan pangan utama melampaui target akhir RPJMD dengan pencapaian 108,84% sedangkan realisasi indikator Tingkat Konsumsi Pangan dengan tingkat capaian 100,00% sudah mencapai target akhir RPJMD yang ditetapkan.

Adapun program untuk mendukung realisasi pencapaian Sasaran 6.1 antara lain :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (APBD), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 775.775.000,- dan realisasi sebesar Rp. 756.538.000,- (tingkat capaian 97,52%) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 19.237.000,- atau 2,48% dari total anggaran.
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (APBD dan DAK), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.652.776.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.620.774.800,- (tingkat capaian 98,06%) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 32.001.200,- atau 1,94% dari total anggaran.

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan (APBD), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 63.704.000,- dan realisasi sebesar Rp. 63.704.000,- (tingkat capaian 100,00%) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0,00% dari total anggaran.
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan (APBD), dengan alokasi Rp. 102.419.000,- dan realisasi sebesar Rp. 99.486.453,- (tingkat capaian 97,14%) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.933.547,- atau 2,86% dari total anggaran.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (APBD), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.801.707.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.642.594.810,- (tingkat capaian 94,32%) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 159.112.190,- atau 5,68% dari total anggaran.
6. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (APBN/Dana Dekonsentrasi), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 287.680.000,- dan realisasi sebesar Rp. 287.650.000,- (tingkat capaian 99,99%) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 30.000,- atau 0,01% dari total anggaran.

7. Tujuan ketujuh : Mewujudkan pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2021, pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

a. Sasaran 7.1 Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Pencapaian kinerja pada sasaran 7.1 Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup, pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.A.7.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 7.1
Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup

No.	Tujuan / Sasaran / Indikator	Satuan	Tahun 2021			Capaian 2020	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		50,75	63,83	125,77%	59,05	125,77%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **Sasaran-7.1**, yaitu: Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup, pada tahun 2021 realisasi melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kegiatan pendukung pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan baik dan saling mendukung.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian untuk masing-masing indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel II.A.7.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021
Sasaran 7.1 Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup

No.	Indikator	Satuan	2020		2021		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	59,05	117,5%	50,75	63,83	125,77

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2021 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.A.7.1.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2021 dengan Target Akhir
RPJMD Sasaran 7.1 Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan
hidup

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d 2021	Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	63,83	50,75	125,77%

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka pencapaian kinerja sasaranannya tercapai 125,77% dari target.

Namun pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) pada tahun 2021 masih dibawah target IKLH Provinsi Jawa Tengah yakni 67,02 dan juga dibawah target IKLH Nasional sebesar 71,41. Terdapat perubahan metode pengukuran Indeks Kualitas Air sebagai bagian dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup .

Sedangkan program yang mendukung realisasi pencapaian sasaran 7.1 ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran Rp. 284.930.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 260.539.000,- atau 91,44% atau terdapat efisiensi Rp. 24.391.000,- (8,56%).

b. Sasaran 7.2 Penanggulangan bencana dan resiko bencana.

Pencapaian kinerja pelayanan dengan sasaran 7.2. Penanggulangan bencana dan resiko bencana ini dapat dilihat sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.A.7.2.1
Capaian Kinerja Sasaran 7.2
Penanggulangan bencana dan resiko bencana

No.	Tujuan / Sasaran / Indikator	Satuan	Tahun 2021			Capaian 2020	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Resiko Bencana		92	93	98,91%	92	98,91%
2	Tingkat Kecepatan Penanganan Bencana (respon time)	menit	15	16	93,33%	18	93,33%
Rata-rata Capaian Sasaran 7.2					96,12%		96,12%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran 7.2**, yaitu : Indeks Resiko Bencana dan Tingkat Kecepatan Penanganan Bencana (respon time), dari 2 indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa rata-rata capaian kinerjanya tercapai 96,12% sehingga dikategorikan **Baik**. Mengacu hasil pengukuran tersebut di atas bahwa Indeks Resiko Bencana terealisasi 93 dari target 92, atau 98,91% dari target. Untuk indikator Tingkat Kecepatan Penanganan Bencana (respon time) juga sudah tercapai 16 menit dari target 15 menit (93,33%), respon time dalam hal ini yang dimaksud adalah **penanganan bencana kebakaran**.

Adapun realisasi dan capaian untuk masing-masing indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel II.A.7.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan 2021
Sasaran 7.2 Penanggulangan bencana dan resiko bencana

No.	Indikator	Satuan	2020		2021		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Resiko Bencana	Indeks	92	101,07%	92	93	98,91%
2.	Tingkat Kecepatan Penanganan Bencana (respon time)	menit	18	100,00%	15	16	93,33%

Berdasarkan perbandingan data realisasi pada tabel di atas, untuk indikator kinerja tingkat kecepatan penanganan bencana pada tahun 2020 realisasinya 18 menit sedangkan 2021 realisasinya 16 menit. Sedangkan untuk Indeks Resiko Bencana realisasi dari 92 pada tahun 2020 menjadi 93 pada tahun 2021.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2021 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

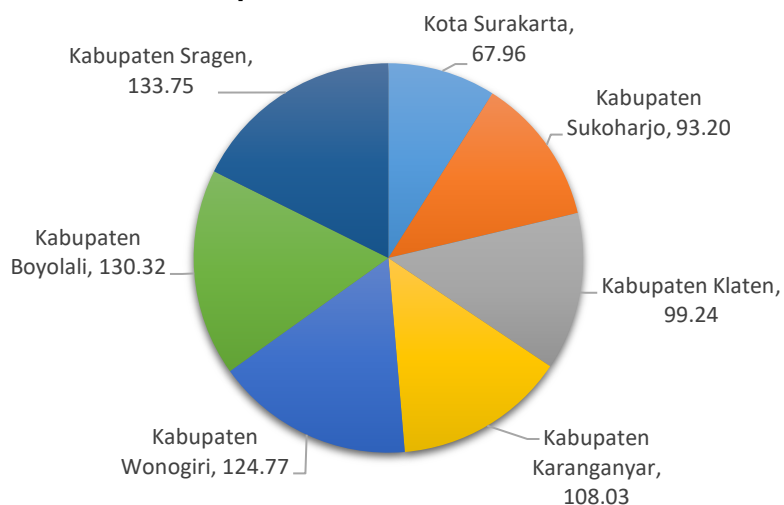
Tabel II.A.7.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD
Sasaran 7.2 Penanggulangan bencana dan resiko bencana

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2021	Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Resiko Bencana	Indeks	93	92	98,91%
2	Tingkat Kecepatan Penanganan Bencana (respon time)	Menit	16	15	93,33%
Rata-rata Capaian Sasaran 7.2					96,12%

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka rata – rata capaian kinerja sasarnya mencapai 96,12% dari target. Pencapaian target ini tidak terlepas dari realisasi indikator Indeks Resiko Bencana yang mencapai 98,91%, sedangkan untuk indikator tingkat kecepatan Penanganan bencana (respon time) belum mencapai target selama 15 menit, realisasi sampai dengan tahun 2021 adalah 16 menit (93,33%).

Untuk melihat perbandingan Indeks Resiko Bencana pada Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota sekitar, maka dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar D.8
Perbandingan Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sukoharjo dengan
Kabupaten/Kota sekitar



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sukoharjo sebesar 93,20 lebih tinggi dari dari Kota Surakarta sebesar 67,96. Namun demikian Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sukoharjo masih di bawah Kabupaten Klaten sebesar 99,24; Kabupaten Karanganyar sebesar 108,03; Kabupaten Wonogiri sebesar 124,77; Kabupaten Boyolali sebesar 130,32; dan kabupaten Sragen sebesar 133,75.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian **sasaran 7.2**, diantaranya adalah masih kurangnya kesadaran dari para masyarakat untuk penanggulangan bencana dan kegiatan sosialisasi telah rutin dilaksanakan, namun masyarakat belum menyadari pentingnya pengetahuan penanggulangan bencana. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas informasi potensi bencana dan peluang penanggulangan bencana.
2. Meningkatkan penyebaran informasi potensi bencana dan peluang penanggulangan bencana melalui berbagai media antara

lain melalui media cetak (*booklet, leaflet*), website dan pameran promosi investasi.

Untuk respon *time* bencana kebakaran dipengaruhi faktor jarak tempuh penanganan kebakaran yang melebihi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan belum terbentuknya Pos Layanan Damkar di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Pencapaian Sasaran Strategis 7.2 didukung melalui pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.441.500.000,-, dan terealisasi sebesar Rp. 1.268.892.999,- atau (88,03%), dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp. 172.607.001,- atau sebesar (11,97%) dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapun pencapaian tingkat kecepatan penanganan bencana kebakaran didukung oleh program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan kegiatan/subkegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Sub kegiatan Pemadaman ndan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan alokasi anggaran Rp. 1.189.920.000,- dengan realisasi Rp. 1.108.229.000,- atau 93,14%.
2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000,- dengan realisasi Rp. 95.095.000,- atau 95,10%.

8. Tujuan kedelapan : Peningkatan daya saing.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2021, maka pencapaian kinerja untuk setiap sasaraannya dapat didiskripsikan sebagai berikut :

a. Sasaran 8.1 Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing.

Pencapaian kinerja pada sasaran 8.1. Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.A.8.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 8.1
Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Capaian 2020	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Realisasi investasi PMA / PMDN (Jutaan)	Juta Rupiah	6.746.956	9.561.655	141,72%	9.045.557	141,72%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran 8.1**, yaitu: Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, dengan indikator realisasi investasi PMA/PMDN capaian kinerja sudah melampaui target yakni sebesar **141,72%**, dengan kategori **Sangat Baik**. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp.6.746.956.000.000,- dapat terealisasi Rp.9.561.654.680.139,-.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) maka pelaku usaha melakukan pendaftaran, urusan penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Pemberlakuan OSS menyebabkan perusahaan baru maupun yang lama harus mendaftarkan izinnya melalui OSS. Peran sistem OSS secara

administratif membantu keberhasilan pencapaian realisasi investasi PMA/PMDN tahun 2021 di Kabupaten Sukoharjo yang melampaui target. OSS memberi kemudahan pelaku usaha dalam investasi dan instrumen data / angka investasi yang lengkap untuk pemerintah daerah. Hal tersebut menyebabkan pencapaian di tahun 2021 realisasi investasi mengalami kenaikan.

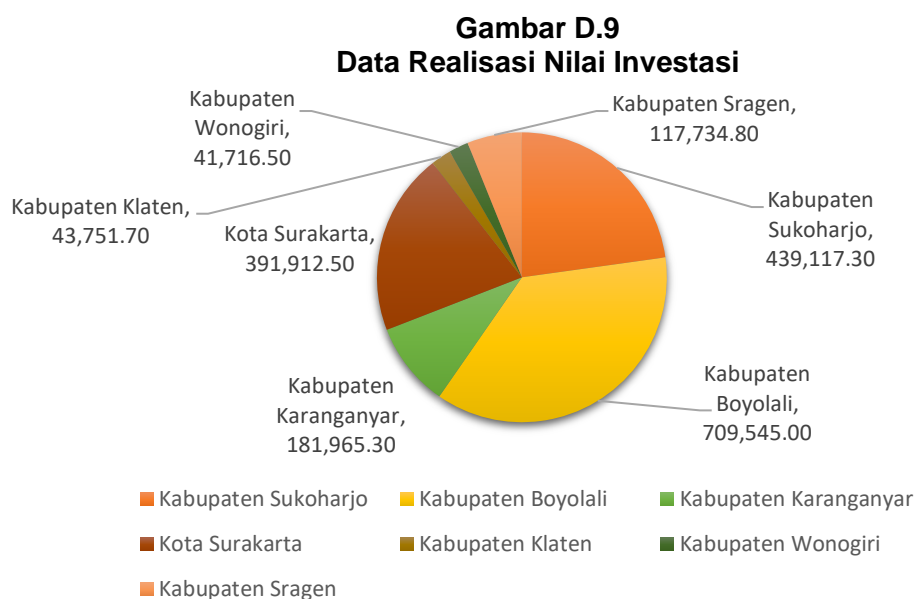
Adapun perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel II.A.8.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021
Sasaran 8.1 Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih
berdaya saing

No	Indikator	Satuan	2020		2021		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Realisasi investasi PMA/PMDN (juta rupiah)	Juta	9.045.557	144,13%	6.746.956	9.561.655	141,72%

Jika melihat perbandingan data realisasi pada tabel di atas, maka realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, yaitu dari Rp. 9.045.557.869.330,- menjadi Rp. 9.561.564.680.139,-.

Merujuk data dalam data BPS Provinsi Jawa Tengah sebagai perbandingan realisasi nilai investasi (juta rupiah) PMDN Tahun 2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk wilayah Kabupaten Sukoharjo dan wilayah sekitarnya:



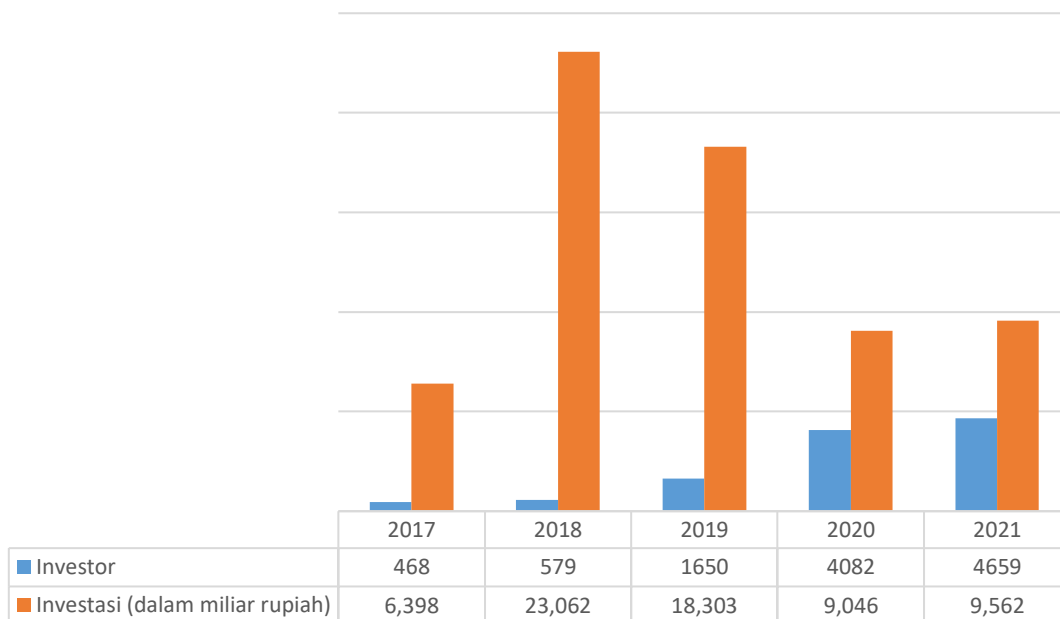
Gambar diagram di atas menunjukkan bahwa realisasi nilai investasi Kabupaten Sukoharjo senilai 439.117,30. Dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, realisasi investasi yang dimiliki Kabupaten Sukoharjo terletak pada peringkat kedua setelah Kabupaten Boyolali, meskipun demikian Kabupaten Sukoharjo masih mengungguli lima Kabupaten/Kota lain seperti Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2021 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.A.8.1.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD Sasaran 8.1 Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d 2021	Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
1	2	3	4	5	6
1.	Realisasi investasi PMA/PMDN	Juta rupiah	9.561.655	6.746.956	141,72%

Gambar D.10
Jumlah Investor dan Investasi



Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka pencapaian kinerja Sasaran 8.1 ini sudah melampaui target, yakni mencapai 141,72%. Realisasi investasi PMA/PMDN yang ditarget sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp. 6.746.956.000.000,- (Rp. 6,75 trilyun) dan sampai dengan tahun 2021 ini telah tercapai Rp. 9.561.654.680.139,-.(Rp. 9,56 trilyun).

Anggaran pendukung pencapaian Sasaran Strategis 8.1 bersumber dari pelaksanaan :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 302.086.000,- dan realisasi sebesar Rp. 288.660.700,- (tingkat capaian 95,56%) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 13.425.300,- atau 4,44% dari total anggaran;

2. Program Promosi Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 86.591.500,- (tingkat capaian 91,15%) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 8.408.500,- atau 8,85%;
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 466.860.000,- dan realisasi sebesar RP. 429.233.000,- (tingkat capaian 91,94%) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 37.627.000,- atau 8,06% dari total anggaran;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 170.450.000,- dan realisasi sebesar RP. 157.567.900,- (tingkat capaian 92,44%) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 12.882.100,- atau 7,56% dari total anggaran;
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.000.000,- dan realisasi sebesar RP. 102.780.900,- (tingkat capaian 93,44%) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 7.219.200,- atau 6,56% dari total anggaran;

9. Tujuan kesembilan : Mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2021, maka pencapaian kinerja untuk masing-masing sasarannya adalah sebagai berikut :

a. Sasaran 9.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.

Capaian kinerja pada sasaran 9.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk masing-masing indikatornya tercermin pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.A.9.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 9.1
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Capaian 2020	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase kontribusi Sektor industri pengolahan, makanan dan minuman dalam PDRB	%	41,76	38,98	93,34%	39,14	94,55%
2.	Prosentase kontribusi Sektor pertanian dalam PDRB	%	9,94	8,65	87,02%	8,75	
3.	Prosentase kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	%	-	17,28		17	
Rata—rata Capaian Sasaran 9,1					90,18%		

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **Sasaran-9.1**, yaitu: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, dengan 3 (tiga) indikator kinerja yakni *Prosentase Kontribusi sektor industri pengolahan, makanan dan minuman dalam PDRB*, *Prosentase kontribusi sektor pertanian dalam PDRB* dan *Prosentase kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB*. *Prosentase kontribusi sektor industri pengolahan, makanan dan minuman* pada tahun 2021 ini capaian kinerjanya sebesar 93,34% berkategori **Baik**. Mengacu pada hasil pengukuran di atas terlihat bahwa kontribusi PDRB industri pengolahan makanan dan minuman dalam PDRB berdasar harga berlaku, terealisasi 38,98% dari target sebesar 41,76%. Penurunan capaian ini disebabkan masih belum pulihnya dampak dari pandemi COVID-19 sehingga berdampak pada hasil pemasaran dari hasil sentra IKM. Sedangkan untuk indikator *Prosentase kontribusi sektor pertanian dalam PDRB* memiliki realisasi 8,65% dengan capaian 87,02% dan indikator *Prosentase kontribusi sektor perdagangan* realisasinya 17,28%. Data ketiga indikator tersebut dari menggunakan **data BPS tahun 2021**.

Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel II.A.9.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan 2021
Sasaran 9.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan

No.	Indikator	Satuan	2020		2021		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prosentase kontribusi sektor industri pengolahan, makanan dan minuman dalam PDRB	%	39,14	93,72%	41,76	38,98	93,34%
2	Prosentase kontribusi sektor pertanian dalam PDRB	%	8,75	88,02%	9,94	8,65	87,02%
3.	Prosentase kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	%	17			17,28	

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indikator prosentase kontribusi sektor industri pengolahan, makanan dan minuman dalam PDRB berdasar harga yang berlaku tahun 2021 turun dari tahun sebelumnya, dari 39,14% menjadi 38,98% atau turun sebesar 0,16%. Kontribusi sektor pertanian juga turun dari 8,75% menjadi 8,65% dan sektor perdagangan dalam PDRB yang meningkat dari 17% menjadi 17,28%.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2021 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.A.9.1.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD
Sasaran 9.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2021	Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
1	2	3	4	5	6
1.	Prosentase kontribusi sektor industri Pengolahan, makanan dan Minuman dalam PDRB	%	38,98	42,43	91,86%
2	Prosentase kontribusi sektor Pertanian dalam PDRB	%	8,65	-	
3	Prosentase kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB	%	17,28	-	

Untuk realisasi sampai dengan tahun 2021 indikator prosentase kontribusi sektor industri pengolahan makanan dan minuman dalam PDRB sebesar 38,98% belum mencapai target akhir dalam RPJMD yaitu 42,43% sehingga diperlukan peningkatan sektor pendapatan dalam industri pengolahan, hal ini dapat difasilitasi dengan keberlanjutan pembinaan, pendampingan dan pelatihan pada pelaku IKM dan industri Kreatif. Sedangkan Prosentase kontribusi sektor pertanian dan sektor perdagangan belum terumuskan dalam RMPJMD disebabkan perubahan dalam indikator kinerja utama sehingga tidak dapat diperbandingkan. (Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten).

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten/Kota sekitar, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.A.9.1.4
Perbandingan Capaian Kinerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021
dengan Kabupaten/Kota lain dan Provinsi Jawa Tengah

No.	Indikator	Satuan	Sukoharjo	Surakarta	Wonogiri	Karanganyar	Klaten	Boyolali	Sragen	Prov. Jawa Tengah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Prosentase kontribusi sektor industri Pengolahan, makanan dan Minuman dalam PDRB	%	38,98	8,66	18,13	46,86	37,70	30,63	38,35	34,31
2	Prosentase kontribusi sektor Pertanian dalam PDRB	%	8,65	0,50	29,38	13,05	10,45	22,15	14,61	13,86
3	Prosentase kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB	%	17,28	21,96	16,39	11,25	15,55	12,84	18,07	13,75

Berdasarkan tabel di atas, capaian Kabupaten Sukoharjo untuk indikator prosentase kontribusi sektor industri pengolahan, makanan dan minuman dalam PDRB lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dengan capaian 34,31%. Untuk indikator prosentase kontribusi sektor pertanian dalam PDRB, capaian Kabupaten Sukoharjo lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah yang telah tercapai sebanyak 13,86%. Pada

indikator prosentase kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB, capaian Kabupaten Sukoharjo memiliki tingkat prosentase yang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah yang memiliki capaian 13,75%.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, tingkat capaian Kabupaten Sukoharjo pada indikator prosentasi kontribusi sektor industri pengolahan, makanan dan minuman dalam PDRB berada pada posisi kedua setelah Kabupaten Karanganyar dan lebih tinggi dari Kota Surakarta, kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali serta Kabupaten Sragen.

Untuk indikator prosentase kontribusi sektor pertanian dalam PDRB, capaian Kabupaten Sukoharjo lebih rendah dari lima Kabupaten sekitar yakni Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sragen. Meskipun demikian, capaian Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi dari Kota Surakarta yang hanya tercapai 0,50 %. Pada indikator prosentase kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB, tingkat capaian Kabupaten Sukoharjo terletak pada posisi ketiga setelah Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen. Meskipun demikian, tingkat capaian Kabupaten Sukoharjo masih lebih tinggi dari empat Kabupaten sekitar yaitu Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali.

Sedangkan program yang mendukung pencapaian Sasaran 9.1 ini antara lain adalah program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 538.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 454.775.000,- dengan capaian 84,53% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 83.225.000,- atau 15,47%.

10. Tujuan kesepuluh : Mewujudkan penguatan pembangunan infrastruktur

Dalam mewujudkan tujuan tersebut terdapat 1 (satu) sasaran strategis, yang berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2021, pencapaian kinerja pada masing-masing sasarnya adalah sebagai berikut :

a. Sasaran 10.1 Meningkatnya sarana dan prasara transportasi

Capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran 10.1 Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi, tercermin pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.A.10.1.1
Capaian Kinerja Sasaran 10.1
Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi

No.	Tujuan / Sasaran / Indikator	Satuan	Tahun 2021			Capaian 2020	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	80	88,80	111,00%	88,37	104,47%
2	Prosentase jembatan dalam kondisi baik	%	97	98,78	101,84%	80	101,84%
3	Angka fatalitas korban Kecelakaan	(kasus /tahun)	140	94	132,86%	65	132,86%
Rata-rata Capaian Sasaran 10.1					115,23%		113,06%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran 10.1**, yaitu Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi, dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa rata-rata capaian kinerjanya dapat dikategorikan **Sangat Baik** dengan rata-rata capaian kinerja indikator sebesar **115,23%**. Jika dilihat capaian kinerja per indikator, untuk prosentase jalan dalam kondisi baik dari target 80% dapat terealisasi 88,80%, prosentase jembatan dalam kondisi baik dari target 97% tercapai 98,78% sedangkan untuk indikator angka fatalitas

korban kecelakaan dari target sebanyak 140 kasus/tahun realisasinya dapat ditekan menjadi sebanyak 94 kasus per tahun atau 132,86%.

Sedangkan perbandingan realisasi dan capaian untuk masing-masing indikator tahun 2021 dengan tahun sebelumnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel II.A.10.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021
Sasaran 10.1 Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi

No.	Indikator	Satuan	2020		2021		
			Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prosentase ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	88,37	110,46%	80	88,80	111,00%
2.	Prosentase jembatan dalam kondisi baik	%	80	82,47%	97	98,78	101,83%
3.	Angka fatalitas korban kecelakaan	Kasus/tahun	65	150%	140	94	132,86%

Jika mengacu pada data yang tersaji pada tabel dimaksud, realisasi pencapaian target pada indikator prosentase jalan dalam kondisi baik mengalami sedikit kenaikan, yaitu dari 88,37% menjadi 88,80%, dan telah melampaui target 80%. Untuk prosentase jembatan dalam kondisi baik juga telah memenuhi dari target 97% dengan realisasi 98,78%. Sedangkan pada indikator angka fatalitas korban kecelakaan pada tahun 2021 ini meningkat dari tahun sebelumnya, yakni dari 65 kasus/tahun menjadi 94 kasus/tahun.

Jalan di Kabupaten Sukoharjo dibagi menjadi tiga kewenangan yaitu Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Jalan Provinsi 55,59 km, Jalan Kabupaten 605,12 km. Panjang jalan di Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan sepanjang 675,27 km. Data mengenai kondisi jalan Kabupaten Sukoharjo akan disajikan sebagai berikut:

Tabel II.A.10.1.3
Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2016-2021

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)											
		2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1	Baik	219,01	36,19	220,92	36,51	121,281	20,04	103,59	17,12	185,02	30,58	142,37	23,53
2	Sedang	163,04	26,94	170,81	28,22	407,223	67,30	429,13	70,91	346,28	57,23	394,971	65,27
3	Rusak Ringan	132,68	21,93	154,47	25,53	56,616	9,36	67,39	11,14	71,10	11,75	65,819	10,88
4	Rusak Berat	90,39	14,94	58,92	9,74	20	3,305	5,01	0,83	2,72	0,45	1,96	0,32
Jumlah		605,12	100	605,12	100	605,12	100	605,12	100	605,12	100	605,12	100

Sumber: DPUPR Kabupaten Sukoharjo

Indikator prosentase ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2021, secara teknis disebut kondisi Mantap dimana cakupannya merupakan jalan kondisi baik dan kondisi sedang. Panjang jalan dalam kondisi Mantap tahun 2021 yaitu 88,80% diperoleh dari panjang jalan kondisi baik (142,37 km) ditambah panjang jalan kondisi sedang (394,971 km) dibagi panjang jalan kabupaten (605,12km) dikali 100%. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jalan antara lain dengan melakukan pembangunan jalan, Rekonstruksi jalan, Pelebaran Jalan menuju standar, dan Rehabilitasi Jalan.

Jumlah jembatan di Kabupaten Sukoharjo sampai dengan 2021 sejumlah 164 jembatan. Untuk dapat mengetahui kondisi jembatan maka digunakan analisa *Bridge Management System* (BMS) seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.A.10.1.4
Tabel Analisa *Bridge Management System* (BMS)

Nilai Kondisi Jembatan				
Skala	Bridge Management System (BMS)			Keterangan
	Kode	Kondisi	Kode	
0	Baik	Jembatan / elemen dalam kondisi baik sekali (baru)	Baik	kondisi jembatan baik sekali
1	Rusak Ringan	Kondisi baik	Rusak Ringan	memerlukan pemeliharaan secara rutin
2	Rusak	Kondisi sedang dan masih dapat dipertanggungjawabkan	Rusak	memerlukan perbaikan secara berkala
3	Rusak Berat	Kondisi Rusak	Rusak Berat	memerlukan perbaikan secepatnya dalam kurun waktu 1 tahun
4	Kritis	Kondisi Kritis	Kritis	memerlukan penanganan segera
5	Runtuh	Kondisi Runtuh	Runtuh	

Dari hasil analisa BMS yang dikategorikan jembatan baik yaitu jembatan/elemen dalam kondisi baik sekali/baru. Kondisi jembatan baik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebesar 0% dikarenakan pembangunan jembatan baru belum selesai pengerjaannya. Sementara indikator prosentase jembatan dalam kondisi baik berdasarkan analisa BMS secara teknis memiliki kode rusak ringan dengan kondisi baik yang realisasinya sebesar 98,78%.

Peningkatan jumlah angka fatalitas kecelakaan dari 65 kasus pada tahun 2020 menjadi 94 kasus pada tahun 2021 dipengaruhi beberapa hal diantaranya tidak terealisasinya sosialisasi kepada masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas baik itu melalui sosialisasi di lingkungan pendidikan / sekolah ataupun sarana edukasi umum berupa taman lalu lintas di wilayah Kabupaten Sukoharjo serta adanya faktor eksternal yaitu masih minimnya kedisiplinan masyarakat mengakibatkan adanya pelanggaran mobilitas masyarakat baik skala kabupaten, regional maupun nasional . Hal ini dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja tercapai dikarenakan jumlah angka fatalitas korban kecelakaan di tahun 2021 sebesar 94 kasus lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 140 kasus.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2021 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.A.10.1.5
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD
Sasaran 10.1 Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi

No.	Indikator	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2021	Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian thd. Target Akhir RPJMD (2021)
1	2	3	4	5	6
1	Prosentase ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	88,80	85	104,47%
2.	Prosentase jembatan dalam kondisi baik	%	98,78	97	101,84%
3.	Angka Fatalitas korban kecelakaan	Kasus / tahun	94	140	132,86%
Rata-rata Capaian Sasaran 10.1					113,06%

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian sasaran telah tercapai, yang diindikasikan dari prosentase rata-rata capaian kerjanya sudah mencapai **113,06%**. Jika dilihat realisasi target per indikator, maka pada indikator prosentase jalan dalam kondisi baik, dari target akhir RPJMD sebanyak 85% realisasinya mencapai 88,80% atau dengan capaian 104,47%. Realisasi pada indikator prosentase jembatan dalam kondisi baik, dari target akhir RPJMD sebanyak 97% realisasinya mencapai 98,78% atau dengan capaian 101,84%. Sedangkan untuk indikator angka fatalitas korban kecelakaan sudah dapat dibawah target yakni dari 140 kasus/tahun sudah dapat ditekan menjadi 94 kasus per tahun atau dengan capaian sebesar 132,86%.

Jika dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Jawa Tengah maka capaian indikator prosentase jalan dalam kondisi baik ini sudah lebih tinggi, yaitu 88,80% dibanding 81,98%, sebagaimana tergambar dari tabel berikut ini :

Tabel II.A.10.1.6
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Provinsi Jawa Tengah

No.	Indikator	Satuan	Kabupaten Sukoharjo	Prov. Jateng	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Prosentase jalan dalam kondisi baik	%	88,80	81,98	Lebih tinggi dari capaian Jawa Tengah

Guna mendukung pencapaian Sasaran Strategis 10.1 program yang dilaksanakan antara lain: program Penyelenggaraan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 167.623.794.600,- dan terealisasi 117.691.641.066,- (tingkat capaian 70,21%) dengan sisa anggaran Rp. 49.932.153.534,- atau 29,79%.

Di samping itu juga didukung dengan pelaksanaan program di Dinas Perhubungan yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.948.617.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.161.883.294,- (tingkat capaian 97,46%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 786.733.706,- atau 2,54%.
2. Program Pengelolaan Pelayaran dengan alokasi anggaran Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.770.000,- (tingkat capaian 98,47%) dengan sisa anggaran Rp. 230.000,- atau 1,53%.
3. Program Pengelolaan Perkeretaapian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.219.000,- terealisasi Rp. 67.999.000,- (tingkat capaian 91,62%) dengan sisa anggaran Rp. 6.220.000,- atau 8,38%.

2.3.2. Capaian IKU, Anggaran dan Realisasi

Tabel II.B.1
Capaian IKU, Anggaran dan Realisasi

No.	IKU	Capaian IKU (%)	Anggaran	Realisasi
1.1.a	Nilai Laporan Evaluasi SAKIP Pemda	100,12	2.381.314.300	2.155.487.849
1.1.b	Nilai EKPPD	93,18	1.365.000.000	1.279.274.100
1.1.c	Opini BPK terhadap LKPD	100	353.698.856.768	186.709.448.613
1.2.a	Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	N/A	31.665.000	31.665.000
1.2.b	Jumlah Pelanggaran dalam Pemilu dan Pilkada	N/A		
2.1.a	Indeks keterbukaan informasi publik	73,25	1.914.650.000	1.856.215.000
2.2.a	Prosentase Aspirasi masyarakat yang diakomodir	100	160.000.000	158.540.000
2.2.b	Prosentase Pengaduan Masyarakat (yang difasilitasi)	125	50.000.000	48.964.000
3.1.a	Angka Melek Huruf	99,36	81.505.362.500	76.113.711.164
3.1.b	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	118,67		
3.2.a	Angka Usia Harapan Hidup	100,16	457.295.927.502	393.446.890.319
3.2.b	Angka Kematian Ibu	30,78		
3.2.c	Angka Kematian Bayi	140,77		
4.1.a	Penurunan Angka Kemiskinan	-375	9.330.365.600	8.962.880.700
4.2.a	Indeks Pembangunan Gender	99,4	740.000.000	618.094.000
4.2.b	Prosentase cakupan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak	100	721.830.000	409.535.200
4.3.a	Tingkat pengangguran terbuka	108,54	727.193.700	670.558.900
4.3.b	Tingkat partisipasi angkatan kerja	99,61	490.000.000	433.116.500
5.1.a	Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	206,67	41.064.000.000	41.064.000.000
5.2.a	Cakupan pelayanan air minum	95,09	2.800.184.700	2.758.453.976
5.3.a	Cakupan pelayanan sanitasi	91,73	1.872.949.000	1.786.008.000
5.3.b	Cakupan layanan persampahan	110,95	15.079.238.000	13.907.263.000
6.1.a	Tingkat ketersediaan pangan	108,84	2.882.354.000	2.828.153.253
6.1.b	Tingkat konsumsi pangan (kalori)	100		
7.1.a	Indeks kualitas lingkungan hidup	125,77	284.930.000	260.539.000
7.2.a	Indeks Resiko Bencana	98,91	1.441.500.000	1.268.892.999
7.2.b	Tingkat Kecepatan Penanganan Bencana (respon time)	93,33	1.289.920.000	1.203.324.000
8.1.a	Realisasi investasi PMA/ PMDN	141,72	1.144.396.000	1.064.834.000
9.1.a	Prosentasi kontribusi sektor industri pengolahan, makanan dan minuman dalam PDRB	93,34	538.000.000	454.775.000
9.1.b	Prosentase kontribusi sektor pertanian dalam PDRB	87,02	14.024.759.000	13.897.462.778
9.1.c	Prosentase kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB		20.569.804.000	10.018.136.992
10.1.a	Prosentase ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik	111	72.763.423.400	44.019.952.200
10.1.b	Prosentase jembatan dalam kondisi baik	101,84	16.674.898.200	9.203.260.140
10.1.c	Angka fatalitas korban kecelakaan	132,86	31.037.836.000	30.244.652.294

*Anggaran yang berorientasi langsung pada pencapaian indikator kinerja utama

2.3.3. Akuntabilitas Keuangan

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan analisis capaian kinerja dan penggunaan sumber daya sebagaimana telah diuraikan pada subbab terdahulu, maka simpulan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran untuk masing-masing sasaran strategis adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.B.2
Perbandingan Capaian Indikator dan Prosentase Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator	Rata-rata % Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran
1.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintahan Daerah 2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKKPD) 3. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	97,77%	79,01%
1.2 Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif	4. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada 5. Jumlah pelanggaran Pemilu dan Pilkada	NA	100%
2.1 Meningkatnya aksesibilitas terhadap informasi publik dan pemanfaatannya	6. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	91,56%	96,79%
2.2 Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan	7. Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir (Musrembang) 8. Prosentase Pengaduan Masyarakat	112,5%	98,52%
3.1 Meningkatkan kualitas pendidikan	9. Angka Melek Huruf 10. Angka Rata-rata Lama Sekolah	109,02%	93,38%
3.2 Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	11. Angka Usia Harapan Hidup 12. Angka Kematian Ibu 13. Angka Kematian Bayi	90,57%	80,17%
4.1 Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif	14. Penurunan Angka Kemiskinan	-375%	90,54%
4.2 Meningkatnya pemberdayaan	15. Indeks Pembangunan Gender	99,72%	78,63%

Sasaran Strategis	Indikator	Rata-rata % Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran
perempuan dan perlindungan anak	16. Persentase cakupan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak		
4.3 Meningkatnya kesempatan kerja	17. Tingkat Pengangguran Terbuka 18. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	104,08%	91,75%
5.1 Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah	19. Prosentase penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	206,67%	100%
5.2 Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk	20. Cakupan pelayanan air minum	95,09%	98,55%
5.3 Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan)	21. Cakupan pelayanan sanitasi 22. Cakupan Layanan Persampahan	101,34%	93,78%
6.2 Meningkatnya persediaan pangan dan tingkat konsumsi pangan	23. Tingkat ketersediaan pangan 24. Tingkat konsumsi pangan (kalori)	104,42%	97,84%
7.1 Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	25. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	125,77%	91,44%
7.2 Penanggulangan bencana dan resiko bencana	26. Indeks resiko bencana 27. Tingkat kecepatan penanganan bencana	96,12%	94,12%
8.1 Meningkatnya iklim investasi usaha yang lebih berdaya saing	28. Realisasi investasi PMA/PMDN (Jutaan)	141,72%	92,91%
9.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	29. Prosentase kontribusi sektor industri pengolahan, makanan dan minuman dalam PDRB 30. Prosentase kontribusi sektor pertanian dalam PDRB 31. Prosentase kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	90,18%	84,53%
10.1 Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	32. Prosentase ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik 33. Prosentase jembatan dalam kondisi baik 34. Angka fatalitas korban kecelakaan (kasus/tahun)	115,23%	95,85%

2. Realisasi Anggaran

Kebijakan umum pengelolaan keuangan Kabupaten Sukoharjo dalam Tahun Anggaran 2021 meliputi Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah dan Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah. Kebijakan tersebut dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel II.B.3
Ringkasan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2021 (unaudited)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
I.	Pendapatan	2.023.068.760.600,00	2.119.543.415.538,00	104.77
	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	420.628.098.600,00	528.264.139.902,00	125.59
	2. Pendapatan Transfer	1.531.289.862.000,00	1.520.527.625.636,00	99.30
	3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	71.150.800.000,00	70.751.650.000,00	99.44
II.	Belanja	2.356.534.359.600,00	2.089.455.558.854,00	88.67
	1. Belanja Operasi	1.597.968.424.191,00	1.472.694.410.236,00	92.16
	2. Belanja Modal	408.337.387.505,00	283.872.873.485,00	69.52
	3. Belanja Tak Terduga	16.047.746.304,00	405.163.533,00	2.52
	4. Belanja Transfer	334.180.801.600,00	332.483.111.600,00	99.49
	Surplus/(defisit)	333.465.599.000,00	30.087.856.684,00	9.02
III.	Pembiayaan			
	1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	358.453.599.000,00	358.453.599.194,00	100.00
	2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24.988.000.000,00	26.836.457.124,00	107,40
	Pembiayaan Netto	333.465.599.000,00	331.617.142.070,00	99,45
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	361.704.998.754,00	

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo

Uraian rinci kebijakan umum pengelolaan keuangan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah di dikelompokkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Arah kebijakan umum pendapatan daerah adalah upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dari berbagai sumber keuangan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan wujud dari partisipasi langsung masyarakat dalam mendukung proses pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. Intensifikasi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sistem pengelolaan pendapatan daerah, melalui pemasangan alat pemantauan transaksi secara elektronik dan sosialisasi pajak dan retribusi daerah kepada wajib pajak dan retribusi daerah.

Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan pengembangan jenis pajak dan retribusi dengan cara penggalan dan pendataan obyek pajak dan retribusi yang belum terjaring/digali dan dimungkinkan dapat dikenai pajak atau retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta didukung dengan Peraturan Daerah. Namun dalam perjalanannya target pendapatan yang telah ditetapkan harus dievaluasi dikarenakan munculnya wabah *corona virus disease* 2019 (covid-19), yang berdampak pada penurunan kegiatan disemua sektor kehidupan masyarakat termasuk sektor ekonomi, pariwisata dan hiburan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target Pendapatan Daerah antara lain:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan para wajib pajak dan para wajib retribusi daerah.
3. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
4. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui penyertaan modal atau investasi.
5. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan Pendapatan Daerah baik intensifikasi maupun ekstensifikasi tersebut diprioritaskan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan kebijakan pendapatan daerah untuk Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan atau provinsi.

Target Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2021 yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Sukoharjo sebelum dan setelah perubahan APBD adalah sebagai berikut :

Tabel II.B.4
Kebijakan Pendapatan – Target Pendapatan
Tahun 2021

Uraian	Target PAD (Rp)	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Sebelum Perubahan APBD	343.113.739.000,00	1.539.320.209.000,00	71.695.199.000,00
Setelah Perubahan APBD	420.628.098.600,00	1.531.289.862.000,00	71.150.800.000,00
Kenaikan(Penurunan)	77.514.359.600,00	8.030.347.000,00	544.399.000,00
% Kenaikan (Penurunan)	22,59%	0,52%	0,76%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo

Penetapan target Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sukoharjo tersebut berdasarkan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Sedangkan penetapan target dari lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan : Perjanjian Hibah Daerah (PHD) untuk Hibah Air Minum dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

B. Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, target pendapatan ditetapkan sebesar Rp.2.023.068.760.600,00,- realisasi atas target pendapatan tersebut adalah Rp.2.119.543.415.538,00 dan realisasi untuk pendapatan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel III.B.5
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah (*unaudited*)
Tahun Anggaran 2021

Uraian	Target	Realisasi	% Realisasi
I Pendapatan	2.023.068.760.600,00	2.119.543.415.538,00	104,77%
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	420.628.098.600,00	528.264.139.902,00	125,59%
a. Pendapatan Pajak Daerah (PPD)	194.150.000.000,00	234.425.731.615,00	120,74%
b. Pendapatan Retribusi Daerah	20.686.733.600,00	18.274.725.507,00	88,34%
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.782.213.000,00	34.782.214.740,00	100%
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	171.009.152.000,00	240.781.468.040,00	140,80%
2 Pendapatan Transfer	1.531.289.862.000,00	1.520.527.625.636,00	99,30%
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.155.240.882.000,00	1.151.058.014.075,00	99,64%
b. Pendapatan Transfer	194.552.625.000,00	194.552.625.000,00	100%

Uraian	Target	Realisasi	% Realisasi
Pemerintah Pusat – Lainnya			
c. Pendapatan Transfer Antar Daerah	181.496.355.000,00	174.916.986.561,00	96,37%
3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	71.150.800.000,00	70.751.650.000,00	99,44%
a. Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	2.997.000.000,00	99,90%
b. Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
c. Pendapatan Lainnya	68.150.800.000,00	67.754.650.000,00	99,42%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo

Keberhasilan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 ditunjukkan oleh realisasi yang mencapai 125,59% atau sebesar Rp.528.264.139.902,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi PAD pada tahun 2020 sebesar Rp.469.540.567.890,00 maka terdapat kenaikan penerimaan PAD sebesar 12,51% atau Rp.58.723.572.012,00. Berdasarkan tabel 3.3 Pajak daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan penyumbang terbesar PAD. Rincian dari pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel II.B.6
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2021

No	Uraian	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Pajak Hotel	2.500.000.000,00	4.197.283.687,00	167,89%
2	Pajak Restoran	12.000.000.000,00	14.130.061.442,00	117,75%
3	Pajak Hiburan	650.000.000,00	1.044.441.593,00	160,68%
4	Pajak Reklame	5.000.000.000,00	5.288.263.315,00	105,77%
5	Pajak Penerangan Jalan	79.000.000.000,00	83.425.654.471,00	105,60%
6	Pajak Parkir	1.200.000.000,00	1.554.792.173,00	129,57%
7	Pajak Air Tanah	2.200.000.000,00	2.879.202.403,00	130,87%
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000.000,00	687.644.850,00	114,61%
9	PBBP2	33.000.000.000,00	36.636.735.633,00	111,02%
10	BPHTB	58.000.000.000,00	84.581.652.048,00	145,83%
Jumlah		194.150.000.000,00	234.425.731.615,00	120,74%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo

Realisasi pajak daerah sebesar Rp.234.425.731.615,00 atau 120,74% tersebut diperoleh dari 10 jenis pajak daerah yang seluruhnya telah melampaui target.

C. Permasalahan dan Solusi

Meskipun penerimaan PAD telah dapat melampaui target, namun berdasarkan Tabel 3.3 dan 3.4 tersebut diatas masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. PAD sebagai wujud partisipasi langsung masyarakat Sukoharjo dalam pembangunan daerah belum mampu mendominasi pendapatan daerah. Porsi PAD dalam pendapatan daerah baru mencapai 24,92% dari realisasi pendapatan daerah tahun 2021 sebesar Rp.2.119.543.415.538,00. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak / retribusi serta adanya tarif pungutan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
2. Penetapan target PAD belum sepenuhnya mempertimbangkan seluruh potensi pendapatan yang ada, hanya berdasarkan trend realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya.

D. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

- a. Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran.
- b. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- c. Belanja Administrasi Umum Non Gaji dianggarkan sesuai dengan kebutuhan agar satuan kerja dapat beroperasi dan belanja pegawai / personalia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Target, Realisasi Belanja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Anggaran belanja daerah ditetapkan sebesar Rp.2.356.534.359.600,00. Realisasi belanja pada tahun 2021 adalah Rp. 2.089.455.558.854,00 atau 88,67%. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel II.B.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
I. Belanja	2.356.534.359.600,00	2.089.455.558.854,00	88,67%
1. Belanja Operasi	1.597.968.424.191,00	1.472.694.410.236,00	92,16%
a. Belanja Pegawai	866.264.566.623,00	830.659.026.029,00	95,89%
b. Belanja Barang dan Jasa	657.600.849.904,00	575.798.113.836,00	87,56%
c. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
d. Belanja Subsidi	1.478.510.864,00	624.509.495,00	42,24%
e. Belanja Hibah	53.163.101.000,00	48.541.701.076,00	91,31%
f. Belanja bantuan Sosial	19.461.395.800,00	17.071.059.800,00	87,72%
2. Belanja Modal	408.337.387.505,00	283.872.873.485,00	69,52%
a. Belanja Modal Tanah	69.976.000.000,00	57.390.168.126,00	82,01%

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.021.224.362,00	66.022.615.391,00	79,52%
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.609.886.790,00	68.356.082.100,00	55,30%
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	128.013.113.400,00	88.714.959.040,00	69,30%
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.701.162.953,00	3.389.048.828,00	91,57%
f. Belanja Modal Aset Lainnya	16.000.000,00	0,00	0,00
3. Belanja Tak Terduga	16.047.746.304,00	405.163.533,00	2,52%
4. Belanja Transfer	334.180.801.600,00	332.483.111.600,00	99,49%
a. Belanja Bagi Hasil	21.575.087.000,00	20.319.837.000,00	94,18%
b. Belanja Bantuan Keuangan	312.605.714.600,00	312.163.274.600,00	99,86%
II. Pembiayaan			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	358.453.599.000,00	358.453.599.194,00	100%
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24.988.000.000,00	26.836.457.124,00	107,40%

E. Penghargaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Selama tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang berhasil diraih, diantaranya:

1. Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berhasil mendapatkan penghargaan predikat "Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021" dengan nilai 84,93 dan termasuk kedalam Zona Hijau. Pencapaian tersebut merupakan progres yang patut untuk diapresiasi karena pada tahun 2019 Kabupaten Sukoharjo masuk ke dalam Zona Kuning dengan nilai 56,41 (Kepatuhan Sedang).

Gambar D.11
Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi
Standar Pelayanan Publik Tahun 2021



Sumber: Bagian Organisasi

2. Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Menerima Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik II Tahun 2021 Kategori Kabupaten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Gambar D.12

Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)



Sumber : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

3. Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra

Penghargaan Nirwasita Tantra atau Penghargaan Green Leadership adalah penghargaan Pemerintah kepada Kepala Daerah dan Ketua DPRD yang dalam kepemimpinannya berhasil merumuskan dan menerapkan kebijakan sesuai prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan sehingga mampu memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Dalam penghargaan ini, Bupati Sukoharjo menerima penghargaan Peringkat I "Nirwasitra Tantra" Tahun 2020 kategori Kabupaten Sedang. Sedangkan Pimpinan DPRD Kab. Sukoharjo menerima penghargaan Penghargaan Green Leadership "Nirwasitra Tantra" Tahun 2020 kategori Kabupaten Sedang.

Gambar D.13
Penghargaan Green Leadership



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

4. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kembali memperoleh Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendapatkan penghargaan Opini WTP 6 kali berturut-turut, dari tahun 2015.

Gambar D.14
Penyerahan Penghargaan WTP



Sumber: [instagram.com/pemkabsukoharjo](https://www.instagram.com/pemkabsukoharjo)

5. Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA)

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menerima Penghargaan Innovative Government Awards (IGA) 2020 sebagai salah satu Kabupaten Sangat Inovatif se Indonesia. Adapun Kabupaten di seluruh Indonesia yang berhasil mendapat kategori Sangat Inovatif berjumlah 90 Kabupaten.

Gambar D.15
Penyerahan Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA)



Sumber: [instagram.com/pemkabsukoharjo](https://www.instagram.com/pemkabsukoharjo)

Adapun daftar penghargaan dan prestasi yang berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel II.B.8
Penghargaan dan Prestasi yang diraih Tahun 2021

No.	NAMA PENGHARGAAN	INSTANSI PENERIMA	INSTANSI PEMBERI	TINGKAT
1.	Juara 1 Nasional Desa Wisata Kategori Kreatif	Desa Wisata Ngrombo	BCA dan Kemenparekraf RI	Nasional
2.	Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran dan Protokol Kesehatan Kategori OPD Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Nasional
3.	Kabupaten Dengan Ketahanan Pangan Terbaik Periode 2018-2020	Kabupaten Sukoharjo	Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian	Nasional
4.	Sertifikat Kapabilitas APIP Level 3	Inspektorat Daerah	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Nasional
5.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Madya
6.	Kabupaten Terbaik Dimensi Smart Branding Gerakan Menuju Smart City	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Nasional

No.	NAMA PENGHARGAAN	INSTANSI PENERIMA	INSTANSI PEMBERI	TINGKAT
7.	Top Leader On Digital Implementation 2021	Bupati Sukoharjo	It Works dan Dewan TIK Nasional	Nasional
8.	Top Digital Implementation 2021 #Level Star 4	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	It Works dan Dewan TIK Nasional	Nasional
9.	Kedisiplinan dan Keaktifan Pelaporan Dalam penegakan Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Nasional
10.	Juara 1 Bank Sampah Tingkat Provinsi	Bank Sampah Kopen SAE, Kopen, Ngadirejo, Kartasura, Sukoharjo	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Provinsi

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disebutkan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah, kepala daerah melakukan: a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; b. penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan; dan c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan. Kepala daerah memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah.

Dalam Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak mendapatkan penugasan dari pemerintah pusat.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Urusan Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

Penerapan SPM untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Jenis Pelayanan Dasar pendidikan terdiri dari :

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang – kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas dan / atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar di tingkat Kabupaten dengan ketentuan usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini, usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar, usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

2. Target Pencapaian SPM

Target Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memberikan pelayanan Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan sebagai berikut :

a. Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian = (5) : (4) X 100%	APBD Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini	82.312	30.226	36.72%	23.688.773.000
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan Pendidikan Dasar	69.891	67.861	97.10%	31.775.329.000
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan Pendidikan Kesetaraan	146.440	1.047	0.71%	2.470.300.000
4	Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan Pendidikan Menengah Pertama	35.204	27.948	79.39%	23.290.960.500

b. Penghitungan Mutu Pembiayaan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target Indikator	Target (Jumlah Orang Yang Akan Terlayani)	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan anak usia dini	Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Perlengkapan peserta didik	6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik per semester	30.226	23.688.773.000
				1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester.	30.226	
		Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik/ Guru	Minimal ijazah D-IV atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi	1.411	
				Memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.		
			Kepala Sekolah	Minimal ijazah D-IV atau Sarjana (S1)	410	
				Memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah untuk PAUD formal, atau Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepala Satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.		
2	Pendidikan Dasar (SD/SMP)	Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa	Perlengkapan peserta didik	1 paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per peserta didik per semester.	95.809	55.066.289.500

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target Indikator	Target (Jumlah Orang Yang Akan Terlayani)	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7
				1 set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru.	95.809	
		Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik/ Guru	Guru kelas memiliki minimal ijazah D-IV atau Sarjana (S1) dan memiliki sertifikat pendidik.	7.694	
				Guru mata pelajaran memiliki minimal ijazah D-IV atau Sarjana (S1) dan memiliki sertifikat pendidik.		
				Jumlah tenaga pendidik <i>disesuaikan dengan jumlah rombongan belajar, kewajiban pemenuhan jam mengajar, dan jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum.</i>		
			Kepala Sekolah	Minimal memiliki ijazah D-IV atau Sarjana (S1); memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.	495	
				1 Kepala sekolah per satuan pendidikan SD/SMP	608	
			Tenaga Penunjang	Minimal memiliki ijazah SMA/ sederajat.	813	
		Minimal 1 tenaga penunjang per satuan Pendidikan SD/SMP.		813		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target Indikator	Target (Jumlah Orang Yang Akan Terlayani)	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7
3	Pendidikan Kesetaraan (Paket A/B/C)	Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa	Perlengkapan peserta didik	1 paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per peserta didik per tahun	1.047	2.470.300.000
				1 set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester.	1.047	
		Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik/Tutor	Minimal memiliki ijazah D-IV atau Sarjana (S1).		
				Jumlah tutor disesuaikan dengan jumlah rombongan belajar, kewajiban pemenuhan jam mengajar tutor, dan jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum/program.		
			Kepala Sekolah	Minimal memiliki ijazah D-IV atau Sarjana (S1).		
				1 orang kepala satuan pendidikan per satuan pendidikan kesetaraan		
			Tenaga Penunjang	Minimal memiliki ijazah SMA/ sederajat.		
				Minimal 1 orang tenaga penunjang per satuan pendidikan kesetaraan		

3. Realisasi Capaian

a. Realisasi pencapaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Realisasi Capaian = (6) : (4) X100%
			Jumlah Orang yang Akan Terlayani	RAPBD 2021	Jumlah Orang Yang Terlayani	APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini	82.312	23.688.773.000	30.226	23.688.773.000	36.72%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan Pendidikan Dasar	69.891	31.775.329.000	67.861	31.775.329.000	97.10%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan Pendidikan Kesetaraan	146.440	2.470.300.000	1.047	2.470.300.000	0.71%
4	Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan Pendidikan Menengah Pertama	35.204	23.290.960.500	27.948	23.290.960.500	79.39%

b. Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar		
						Jumlah orang yang terlayani	(%)	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1	Pendidikan anak usia dini	Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Perlengkapan peserta didik	6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik per semester	30.226	30.226	36.72 %	23.688.773.000
				1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester.	30.226	30.226		
		Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik/ Guru	Minimal ijazah D-IV atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi	1.411	1.411		
				Memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.				
				Kepala Sekolah	Minimal ijazah D-IV atau Sarjana (S1)	410	410	

No	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar		
						Jumlah orang yang terlayani	(%)	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	5	6	7	8
				Memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah untuk PAUD formal, atau Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepala Satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.				
2	Pendidikan Dasar	Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa	Perlengkapan peserta didik	1 paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per peserta didik per semester..	95.809	95.809	SD : 97.10 % SMP : 79.39 %	55.066.289.500
	(SD/SMP)			1 set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru.	95.809	95.809		
		Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik/ Guru	Guru kelas memiliki minimal ijazah D-IV atau Sarjana (S1) dan memiliki sertifikat pendidik.	7.694	7.694		
				Guru mata pelajaran memiliki minimal ijazah D-IV atau				

No	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar		
						Jumlah orang yang terlayani	(%)	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	5	6	7	8
				Sarjana (S1) dan memiliki sertifikat pendidik.				
				Jumlah tenaga pendidik <i>disesuaikan dengan jumlah rombongan belajar, kewajiban pemenuhan jam mengajar, dan jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum.</i>				
			Kepala Sekolah	Minimal memiliki ijazah D-IV atau Sarjana (S1); memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.	495	495		
				1 Kepala sekolah per satuan pendidikan SD/SMP	608	608		
			Tenaga Penunjang	Minimal memiliki ijazah SMA/ sederajat	813	813		
				Minimal 1 tenaga penunjang per satuan Pendidikan SD/SMP.	813	813		

No	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar		
						Jumlah orang yang terlayani	(%)	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	5	6	7	8
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa	Perlengkapan peserta didik	1 paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per peserta didik per tahun	1.047	1.047	0.71 %	2.470.300.000
	(Paket A/B/C)			1 set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester.	1.047	1.047		
		Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik/Tutor	Minimal memiliki ijazah D-IV atau Sarjana (S1).	30	30		
				Jumlah tutor disesuaikan dengan jumlah rombongan belajar, kewajiban pemenuhan jam mengajar tutor, dan jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum/program.				
			Kepala Sekolah	Minimal memiliki ijazah D-IV atau Sarjana (S1).				
				1 orang kepala satuan pendidikan per satuan pendidikan kesetaraan				

No	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar		
						Jumlah orang yang terlayani	(%)	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	5	6	7	8
			Tenaga Penunjang	Minimal memiliki ijazah SMA/ sederajat				
				Minimal 1 orang tenaga penunjang per satuan pendidikan kesetaraan				

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan sebesar Rp. 81.225.362.500,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran
1	2	3
1	Pendidikan anak usia dini	23.688.773.000
2	Pendidikan Dasar	31.775.329.000
3	Pendidikan Kesetaraan	23.290.960.500
	Jumlah	2.470.300.000

5. Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Terlayani	Dukungan Personil
1	2	3	4	5
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini	30.226	2.338

2	Pendidikan Dasar	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan Pendidikan Dasar	67.861	9.412
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan Pendidikan Kesetaraan	1.047	105
4	Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan Pendidikan Menengah Pertama	27.948	

6. Program dan Kegiatan

NO	Jenis Pelayanan Dasar pada SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2		3	4	5
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	473.044.000
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	464.542.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	300.019.000
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	60.000.000
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	167.000.000
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	45.000.000
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	7.655.724.000
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	279.749.000
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	262.000.000
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	101.400.000
2	Pendidikan Dasar		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	817.000.000
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.170.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	7.552.880.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	949.120.000
				Pengadaan Mebel Sekolah	570.000.000

NO	Jenis Pelayanan Dasar pada SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2		3	4	5
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.450.000.000
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	799.200.000
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500.000.000
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	14.433.586.000
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.272.743.000
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	748.800.000
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	270.000.000
3	Pendidikan Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15.000.000
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	15.000.000
				Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.000.000
				Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	185.000.000
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	109.000.000
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	103.000.000
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	424.800.000
4	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.301.965.000
				Pembangunan Laboratorium	285.025.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	484.203.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.331.672.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	739.600.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	501.050.000

NO	Jenis Pelayanan Dasar pada SPM	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2		3	4	5
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2.224.102.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.359.140.000
				Pengadaan Mebel Sekolah	655.100.000
				Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	25.000.000
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.761.990.000
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	450.000.000
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	838.068.000
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	811.447.000
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.467.061.000
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	297.037.500
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	553.000.000
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	145.500.000
JUMLAH					65.444.567.500

B. Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, adalah :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM);
- j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat;
- k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB); dan
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko terinfeksi HIV.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

a. Target Capaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian = $(5) : (4) \times 100\%$	Rapbd Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yg diberikan pelayanan kesehatan dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun		12.514		44.982.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yg diberikan pelayanan kesehatan dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun		11.589		13.055.000 1.118.466.122

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian = $(5) : (4) \times 100\%$	Rapbd Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir diberikan paket pelayanan kesehatan dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun		11.587		26.683.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita usia 0-59 bulan diberikan pelayanan kesehatan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun		48.684		67.101.000
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar diberikan pelayanan dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran		63.731		33.055.000
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun		590.228		73.918.000
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai		126.176		44.493.800

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian = $(5) : (4) \times 100\%$	Rapbd Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
		standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.				
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar. dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun		269.296		32.260.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah penderita DM diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun		17.910		34.240.000
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ Berat diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun		2.280		38.940.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Jumlah orang dengan terduga TBC diberikan pelayanan sesuai standar dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun		10.689		59.223.000 971.906.250

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian = $(5) : (4) \times 100\%$	Rapbd Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV diberikan pelayanan sesuai standar dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun		14.689		192.305.000 334.687.000

b. Penghitungan pembiayaan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan

No	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu, Buku KIA,	Jumlah ibu hamil yg diberikan pelayanan kesehatan dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100%	12.514	31.930.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu, Buku KIA, Formulir Fotograf	Jumlah ibu bersalin yg diberikan pelayanan kesehatan dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100%	11.589	1.152.721.946
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Formulir Bayi Baru Lahir, Formulir MTBM, Buku KIA	Jumlah bayi baru lahir diberikan paket pelayanan kesehatan dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai	100%	11.587	39.238.000

No	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun			
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Kuisiner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku, Formulir DDTK, Buku KIA	Jumlah balita usia 0-59 bulan diberikan pelayanan kesehatan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100%	48.684	60.816.000
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Buku Raport Kesehatanku, Buku Pemantauan Kesehatan, Kuesioner Skrining Kesehatan, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	Jumlah anak usia pendidikan dasar diberikan pelayanan kesehatan dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran	100%	63.731	96.421.000
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Jumlah pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100%	590.228	40.450.000

No	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Buku Kesehatan lansia	Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100%	126.176	13.855.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE, Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	Jumlah penderita hipertensi diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar. dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100%	269.296	9.700.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM, Pedoman dan Media KIE	Jumlah penderita DM diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100%	17.910	14.500.000
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia), Penyediaan	Jumlah ODGJ Berat diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100%	2.280	64.990.000

No	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		Formulir Pencatatan dan Pelaporan, Media KIE				
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner), Formulir Pencatatan dan Pelaporan, Pedoman/Standar Operasional Prosedur	Jumlah orang dengan terduga TBC diberikan pelayanan sesuai standar dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100%	10.689	1.011.039.250
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV diberikan pelayanan sesuai standar dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100%	14.689	380.703.000

3. Realisasi Capaian

- a. Realisasi pencapaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Realisasi Capaian = (6) : (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	RAPBD 2021	Jumlah Orang Yang Terlayani	APBD Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Kesehatan	Jumlah ibu hamil yg diberikan pelayanan kesehatan dinilai	12.514	44.982.000	12.010	31.930.000	95,97

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Realisasi Capaian = (6) : (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	RAPBD 2021	Jumlah Orang Yang Terlayani	APBD Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ibu Hamil	dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun					
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yg diberikan pelayanan kesehatan dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	11.589	13.055.000 1.118.466.122	11.589	1.152.721.946	100,00
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir diberikan paket pelayanan kesehatan dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	11.587	26.683.000	11.587	39.238.000	100,00
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita usia 0-59 bulan diberikan pelayanan kesehatan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	48.684	67.101.000	42.319	60.816.000	86,93

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Realisasi Capaian = (6) : (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	RAPBD 2021	Jumlah Orang Yang Terlayani	APBD Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar diberikan pelayanan dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran	63.731	33.055.000	58.805	96.421.000	92,27
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	590.228	73.918.000	466.714	40.450.000	79,07
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	126.176	44.493.800	97.790	13.855.000 9.700.000 14.500.000	77,50
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar. dinilai dari persentase jumlah	269.296	32.260.000	115.801		43,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Realisasi Capaian = (6) : (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	RAPBD 2021	Jumlah Orang Yang Terlayani	APBD Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
		penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun					
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah penderita DM diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	17.910	34.240.000	17.349		96,87
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ Berat diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	2.280	38.940.000	1.326	64.990.000	58,16
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Jumlah orang dengan terduga TBC diberikan pelayanan sesuai standar dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	10.689	59.223.000 971.906.250	2.174	1.011.039.250	20,34

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Realisasi Capaian = (6) : (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	RAPBD 2021	Jumlah Orang Yang Terlayani	APBD Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV diberikan pelayanan sesuai standar dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	14.689	192.305.000 334.687.000	10.347	380.703.000	70,44

b. Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar		
					Jumlah orang yang terlayani	(%)	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu, Buku KIA,	Jumlah ibu hamil yg diberikan pelayanan kesehatan dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	12.514	12.010	95,97	31.930.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu, Buku KIA, Formulir Fotograf	Jumlah ibu bersalin yg diberikan pelayanan kesehatan dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	11.589	11.589	100,00	1.152.721.946

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar		
					Jumlah orang yang terlayani	(%)	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Formulir Bayi Baru Lahir, Formulir MTBM, Buku KIA	Jumlah bayi baru lahir diberikan paket pelayanan kesehatan dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	11.587	11.587	100,00	39.238.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku, Formulir DDTK, Buku KIA	Jumlah balita usia 0-59 bulan diberikan pelayanan kesehatan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	48.684	42.319	86,93	60.816.000
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Buku Raport Kesehatanku, Buku Pemantauan Kesehatan, Kuesioner Skrining Kesehatan, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah,	Jumlah anak usia pendidikan dasar diberikan pelayanan dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran	63.731	58.805	92,27	96.421.000

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar		
					Jumlah orang yang terlayani	(%)	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah					
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Jumlah pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	590.228	466.714	79,07	40.450.000
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Buku Kesehatan lansia	Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	126.176	97.790	77,50	13.855.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE, Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	Jumlah penderita hipertensi diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar. dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	269.296	115.801	43,00	9.700.000

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar		
					Jumlah orang yang terlayani	(%)	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM, Pedoman dan Media KIE	Jumlah penderita DM diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	17.910	17.349	96,87	14.500.000
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia), Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan, Media KIE	Jumlah ODGJ Berat diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	2.280	1.326	58,16	64.990.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner), Formulir Pencatatan dan Pelaporan, Pedoman/Standar Operasional Prosedur	Jumlah orang dengan terduga TBC diberikan pelayanan sesuai standar dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	10.689	2.174	20,34	1.011.039.250

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar		
					Jumlah orang yang terlayani	(%)	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV diberikan pelayanan sesuai standar dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	14.689	10.347	70,44	380.703.000

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Tahun 2021 untuk mendukung pencapaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp 2.916.364.200

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			Jumlah
		APBN	APBD	Sumber lain yang sah	
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	31.930.000	-	31.930.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	1.152.721.946	-	1.152.721.946
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	39.238.000	-	39.238.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	-	60.816.000	-	60.816.000
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	96.421.000	-	96.421.000
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	-	40.450.000	-	40.450.000
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	13.855.000	-	13.855.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	9.700.000	-	9.700.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	-	14.500.000	-	14.500.000
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	-	64.990.000	-	64.990.000

	Berat				
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	-	1.011.039.250	-	1.011.039.250
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	-	380.703.000	-	380.703.000
	Jumlah	-	2.916.364.200	-	2.916.364.200

5. Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Terlayani	Dukungan Personil
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yg diberikan pelayanan kesehatan dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	12.010	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter - Bidan - Perawat
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yg diberikan pelayanan kesehatan dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	11.589	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter - Bidan - Perawat
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir diberikan paket pelayanan kesehatan dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	11.587	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter - Bidan - Perawat
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita usia 0-59 bulan diberikan pelayanan kesehatan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	42.319	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter - Bidan - Perawat - Petugas Gizi - Guru PAUD - Kader kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Terlayani	Dukungan Personil
1	2	3	4	5
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar diberikan pelayanan dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran	58.805	<ul style="list-style-type: none"> – Dokter – Bidan – Perawat – Petugas Gizi – Tenaga Kesmas – Guru – Kader kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	466.714	<ul style="list-style-type: none"> – Dokter – Bidan – Perawat – Petugas Gizi – Tenaga Kesmas – Kader kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	97.790	<ul style="list-style-type: none"> – Dokter – Bidan – Perawat – Petugas Gizi – Tenaga Kesmas – Kader kesehatan
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar. dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	115.801	<ul style="list-style-type: none"> – Dokter – Bidan – Perawat – Tenaga Kesmas
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah penderita DM diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	17.349	<ul style="list-style-type: none"> – Dokter – Bidan – Perawat – Petugas Gizi – Tenaga Kesmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Terlayani	Dukungan Personil
1	2	3	4	5
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ Berat diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	1.326	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter. - Perawat. - Tenaga Kesehatan yang terlatih jiwa
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Jumlah orang dengan terduga TBC diberikan pelayanan sesuai standar dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	2.174	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter - Perawat - Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) - Penata Rontgen - Tenaga Kesmas
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV diberikan pelayanan sesuai standar dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	10.347	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter - Perawat - Bidan - Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) - Tenaga Kesmas

6. Permasalahan dan Solusi

Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya informasi mengenai pelayanan antenatal b. akses ke fasyankes sulit c. pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskesmas d. ibu hamil mendapatkan pelayanan di fasyankes luar wilayah kerja kabupaten/kota e. kendala biaya f. Sosial budaya g. Ibu hamil sudah memenuhi Pelayanan ANC minimal 3 kali, capaian belum 100% karena ada ibu hamil yang belum masuk TM Akhir pada pemeriksaannya jadi belum terhitung 4 kali.

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya informasi mengenai pelayanan persalinan b. akses ke fasyankes sulit c. pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskesmas d. ibu bersalin mendapatkan pelayanan bukan oleh nakes dan atau tidak difasyankes e. ibu bersalin mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja kab/kota f. kendala biaya g. Sosial budaya
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya Informasi mengenai pelayanan bayi baru lahir b. akses ke fasyankes sulit c. pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskesmas d. bayi baru lahir mendapatkan pelayanan dil luar wilayah kerja kab/kota e. kendala biaya f. Sosial budaya
Pelayanan Kesehatan Balita	<ul style="list-style-type: none"> a. kurangnya informasi mengenai pelayanan balita b. akses ke fasyankes sulit c. pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskesmas d. balita mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja kab/kota e. kendala biaya f. sosial budaya g. Sudah memenuhi Pelayanan Balita namun belum mencapai target karena ada pelayanan yang baru akan dilaksanakan pada tahun berikutnya mengikuti jadwal pelayanan. Sehingga belum bisa dimasukkan sebagai data pelayanan tahun ini.
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> a. faktor sarana prasarana b. keterbatasan tenaga kesehatan puskesmas c. dan/atau kurangnya koordinasi lintas sektor dan sebagainya d. Keterbatasan waktu dikarenakan ada kegiatan lain dan jadwal penyerapan anggaran dibatasi sampai bulan November sementara kegiatan ini dilakukan di akhir tahun.
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<ul style="list-style-type: none"> a. Hambatan manajemen (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan , Pemantauan dan Evaluasi), sistem informasi (Pencatatan dan Pelaporan SPM), dan regulasi kesehatan b. Hambatan pada pemberdayaan masyarakat c. Hambatan Sediaan alat kesehatan d. Hambatan pada sumber daya manusia kesehatan e. Hambatan Pembiayaan dan Penganggaran SPM Kesehatan
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya informasi mengenai pelayanan kesehatan usia lanjut b. Sulitnya akses ke fasilitas pelayanan kesehatan c. Pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan jejaring puskesmas ke puskesmas d. Adanya usia lanjut yang mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja kabupaten/kota e. Terbatasnya biaya

	<ul style="list-style-type: none"> f. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat yang salah satunya disebabkan oleh faktor sosial budaya g. Ketersediaan sumber daya terbatas h. Adanya kematian/mortalitas usia lanjut i. Perpindahan penduduk/migrasi
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Hambatan manajemen (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi), sistem informasi (Pencatatan dan Pelaporan SPM), dan regulasi kesehatan b. Hambatan pada pemberdayaan masyarakat c. Hambatan Sediaan farmasi dan alat kesehatan d. Hambatan pada sumber daya manusia kesehatan e. Hambatan Pembiayaan dan Penganggaran SPM Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	<ul style="list-style-type: none"> a. Hambatan manajemen (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi), sistem informasi (Pencatatan dan Pelaporan SPM), dan regulasi kesehatan b. Hambatan pada pemberdayaan masyarakat c. Hambatan Sediaan farmasi dan alat kesehatan d. Hambatan pada sumber daya manusia kesehatan e. Hambatan Pembiayaan dan Penganggaran SPM Kesehatan f. Hambatan manajemen (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi), sistem informasi (Pencatatan dan Pelaporan SPM), dan regulasi kesehatan g. Hambatan pada pemberdayaan masyarakat h. Hambatan Sediaan farmasi dan alat kesehatan i. Hambatan pada sumber daya manusia kesehatan j. Hambatan Pembiayaan dan Penganggaran SPM Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum ada rumah singgah b. Keterbatasan SDM untuk pasca perawatan dari RSJ
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya informasi tentang pelayanan orang terduga Tuberkulosis b. Jejaring internal dan eksternal pelayanan kesehatan yang kurang optimal c. Pelayanan kesehatan yang tidak melaporkan orang terduga tuberkulosis d. Orang terduga tuberkulosis yang mencari pelayanan di luar wilayah e. Ketersediaan sumber daya daerah yang terbatas f. Reward dan punishment yang inkonsisten
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	<ul style="list-style-type: none"> a. Hambatan manajemen informasi dan regulasi kesehatan b. Hambatan pada pemberdayaan masyarakat c. Sediaan farmasi dan alat kesehatan d. Hambatan pada sumber daya kesehatan e. Pembiayaan kesehatan f. Upaya layanan kesehatan g. Tidak ada kajian di daerah

7. Program dan Kegiatan

No.	Jenis Pelayanan dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Anggaran (Rp)
1	2	3			4
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				31.930.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		A	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		31.930.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				1.152.721.946
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		A	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		1.152.721.946
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				39.238.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		A	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		39.238.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita				60.816.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		A	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		60.816.000
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				96.421.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		A	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		96.421.000
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				40.450.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

No.	Jenis Pelayanan dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	2	3		4
		1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		A	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	40.450.000
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			13.855.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
		1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		A	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	13.855.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			9.700.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
		1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		A	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	9.700.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)			14.500.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
		1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		A	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	14.500.000
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		64.990.000
		1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		A	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)			1.011.039.250
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
		1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		A	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	39.133.000

No.	Jenis Pelayanan dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	2	3		4
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
		1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	
		A	Pengadaan Bahan Habis Pakai	971.906.250
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV			380.703.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
		1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		A	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	36.016.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	
		A	Pengadaan Bahan Habis Pakai	344.687.000

C. Urusan Pekerjaan Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo

Penerapan SPM untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Jenis Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestic

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal urusan pekerjaan umum di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian = (5) : (4) X 100%	APBD Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	907.587	907.587	100%	2.800.184.700
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestic	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan pokok air limbah domestic	907.587	907.587	100%	1.872.949.000

b. Target Mutu Layanan

No	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah	60 liter/orang/hari diperuntukan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Untuk daerah kabupaten / kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut.	907587	2.800.184,700
		Kualitas	Parameter fisik kualitas air yang tidak	Antara lain : a. Keruh b. Berwarna	907587	

No	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7
			langsung berhubungan dengan kesehatan.	c. Berasa d. Berbusa e. Berbau Yang disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan, serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.		
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Kuantitas	Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah Domestik.	Jumlah rumah yang akan terlayani	907587	1.872.949.000
		Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik	Pelayanan penyediaan prasarana dan/ atau jasa melalui SPALD-S dan SPALD-T	Prasarana dan/ atau jasa melalui SPALD-S dan SPALD-T		
			Pelayanan penyediaan prasarana dan/ atau jasa melalui SPALD-S	Prasarana dan/ atau jasa melalui SPALD-S		
			Pelayanan penyediaan prasarana dan/ atau jasa melalui SPALD-T	Prasarana dan/ atau jasa melalui SPALD-T		

3. Realisasi Capaian

Relisasi pencapaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Realisasi Capaian = (6) : (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	RAPBD 2020	Jumlah Orang Yang Terlayani	APBD TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	*907587	2.800.184.700	*842831	2.759.453.976	92,24%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan pokok air limbah domestik	*907587	1.872.949.000	*798721	1.786.008.000	88,00%

c. Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar		
					Jumlah orang yang terlayani	(%)	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut.	*907587	*842831	*92,87%	2.759.453.976

N o.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar		
					Jumlah orang yang terlayani	(%)	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.		Kualitas	Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan : a. Keruh b. Berwarna c. Berasa d. Berbusa e. Berbau disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan, disesuaikan Pedoman dan Definisi Susenas.	*907587	*842831	*92,87%	
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Kuantitas	Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah Domestic.	*907587 **897916	*798721 **790210	*88,00% **88,00 %	1.786.008.000
		Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik	Pelayanan penyediaan prasarana dan/ atau jasa melalui SPALD-S dan SPALD-T	*907587 **897916	*20714 **20714	*2,28% **2,31%	
			Pelayanan penyediaan prasarana dan/ atau jasa melalui SPALD-S	*907587 **897916	*17570 **17570	*1,94% **1,96%	
			Pelayanan penyediaan prasarana dan/ atau jasa melalui SPALD-T	*907587 **897916	*3144 **3144	*0,35% **0,35%	

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk menunjang pencapaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo, adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Nomenkatur Program	Jumlah Anggaran
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	2.800.184.700
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1.872.949.000

5. Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Terlayani	Dukungan Personil
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	*842831 **836648	3 (Kasi dan Staf AMPL)
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan pokok air limbah domestic	*798721 **790210	12 (Kasi dan Staf AMPL, Tim IPAL dan IPLT)

6. Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Permasalahan	Solusi
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1. Adanya perbedaan antara perencanaan dan kondisi di lapangan, sehingga pengaruh pada konstruksi. 2. Perencanaan dilaksanakan oleh banyak instansi.	1. Survei perencanaan dilakukan lebih detail dan mendekati eksisting. 2. Perlu koordinasi antar instansi yang berkaitan.
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		

7. Program dan Kegiatan

No.	Jenis Pelayanan dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Anggaran (Rp.000)
1	2	3		4
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		2.800.184,700
		1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.800.184,700
		A	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	55.000,000
		B	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.745.184,700
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		1.872.949,000
		1	Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.872.949,000
		A	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kot	55.000,000

No.	Jenis Pelayanan dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Anggaran (Rp.000)
		B	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		201.600,000
		C	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		1.616.349.000

D. Urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan adalah :

- a. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota.
- b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

2. Target Pencapaian SPM

- a. Target pencapaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal urusan pekerjaan umum di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian = (5) : (4) X 100%	APBD Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Presentas jumlah unit rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten /kota	NA	NA	NA	NA

2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Presentase jumlah unit rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	8	8	100	40.000.000
---	--	---	---	---	-----	------------

- b. Perhitungan Pembiayaan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat sesuai Permen PU dan PR Nomor : 29/PRT/2018 tentang Standar Teknis SPM PU dan PR yang berada pada Dinas PKP Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target Indikator	Target (Jumlah Orang Yang Akan Terlayani)	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota					
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Pemenuhan Kualitas Rumah Layak Huni bagi korban bencana	Kebutuhan akan rumah tangga yang layak huni	Keamanan struktur bangunan dan kenyamanan penghuni rumah	8 unit	40.000.000

3. Realisasi Capaian

Target pencapaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian SPM		Realisasi Capaian Spm		Realisasi Capaian = (6) : (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	APBD 2021	Jumlah Orang Yang Terlayani	APBD Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Presentase jumlah unit rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten /kota	NA	NA	NA	NA	NA
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Presentase jumlah unit rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	8	40.000.000	8	40.000.000	100

4. Alokasi Anggaran

Target pencapaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran
1	2	3
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota	NA
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	40.000.000

5. Dukungan Personil

Jumlah personil/pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo sebanyak 48 personil, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pegawai	48	Orang
1 Kualifikasi Pendidikan		
S3	-	Orang
S2	9	Orang
S1	18	Orang
Diploma	1	Orang
SLTA	16	Orang
SLTP	3	Orang
SD	1	Orang
2 Pangkat dan Golongan		
PNS		
Golongan IV	6	Orang
Golongan III	26	Orang
Golongan II	14	Orang
Golongan I	2	Orang
CPNS		
Golongan IV	-	Orang
Golongan III	6	Orang
Golongan II	-	Orang
Golongan I	-	Orang

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dengan jenis pelayanan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota belum dilaksanakan dan dianggarkan pada Tahun 2021.

Solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menunggu dari OPD Teknis dalam dalam penyelenggaraan pelayanan SPM Urusan Perumahan Rakyat jenis Fasilitas penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah hal ini BPBD.

7. Program dan Kegiatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar pada SPM	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	
				Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota	NA	NA	NA	NA
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Pengembangan Perumahan	Kegiatan Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/kota Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kab/Kota	50.000.000	49.990.000

E. Urusan Trantibumlinmas

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pelayanan Standar Pelayanan Minimal urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan adalah :

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Pelayanan informasi rawan bencana.
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

2. Target Pencapaian SPM

- a. Target pencapaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian = (5) : (4) X 100%	APBD Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara Yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkara	99 orang	99 orang	100%	8.950.000
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	115 orang	115 orang	100%	1.189.820.000
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	75.200	75.200	100 %	238.000.000
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	75.200	75.200	100 %	402.000.000
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	911.966	911.966	100 %	776.500.000

b. Penghitungan pembiayaan mutu pelayanan dasar bidang
Trantibumlinmas

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Satpol PP - Standar Sarana Prasana Satpol PP - Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat - Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Perkada 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Jumlah dan kualitas sarana prasarana Jumlah dan kualitas personil/ SDM Kerugian Materiil Pengobatan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Dokumen 5 unit 115 orang 99 orang 	<ul style="list-style-type: none"> 99 orang 99 orang 99 orang 99 orang 	<ul style="list-style-type: none"> 10.000.000 76.500.000 40.000.000 8.950.000
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> - Respon Time - Prosedur Operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi - Standar Sarana Prasana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi - Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan penyelamatan/ sumber daya manusia - Pelayanan Pemadaman, penyelamatan dan 	<ul style="list-style-type: none"> menit Jumlah Dokumen Jumlah dan kualitas sarana prasarana Jumlah dan kualitas personil/ SDM Jumlah dan jenis 	<ul style="list-style-type: none"> 15 menit 1 Dokumen 9 unit 77 orang Layanan 	<ul style="list-style-type: none"> 155 orang 155 orang 155 orang 155 orang 155 orang 	<ul style="list-style-type: none"> 1.189.820.000 10.000.000 74.985.000 15.000.000

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7
		evakuasi bagi warga Negara yang menjadi korban kebakaran Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang terdampak kebakaran	Jumlah dan jenis	Layanan	155 orang	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Dokumen KRB Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Dokumen Kajian Pembentukan Destana	Prosentase penyelesaian Dokumen sampai dengan dinyatakan sah/Legal. Prosentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	911.966 75.200	150.000.000 88.000.000
	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Pengendalian Operasi dan Penyediaan sarana dan prasarana	Pelatihan Destana Penggandaan/ ATK/ Jumlah	Prosentase jumlah Aparatur dan warga negara yang ikut Pelatihan. Prosentase Jumlah warga	60 911.966	60.000.000 180.000.000

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7
		kesiapsiagaan terhadap bencana - Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Petugas /Honor Petugas dan laporan Pengadaan Leaf jaket/ pelampung	yang mendapatkan layanan pisdalosp PB dan sarana prasarana PB bencana Prosentase Jumlah warga yang mendapatkan Peralatan Perlindungan	75.200	12.000.000
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	- Koordinasi pembagian wilayah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Operasional tim Rescue	Prosentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana .	911.966	106.500.000

3. Realisasi Capaian

- a. Target pencapaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Realisasi Capaian = (6) : (4) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	RAPBD 2020	Jumlah Orang Yang Terlayani	APBD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara Yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkara	99 orang	8.950.000	0	0	NA
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	155 orang	1.189.820.000	155 orang	1.108.229.000	100 %
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	75.200	238.000.000	75.200	238.000.000	100 %
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	75.200	402.000.000	75.200	402.000.000	100 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	911.966	776.500.000	911.966	776.500.000	100 %

b. Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar Bidang Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar		
					Jumlah orang yang terlayani	(%)	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- SOP Satpol PP	Jumlah Dokumen	99 orang	0	0	10.000.000
		- Standar Sarana Prasana Satpol PP	Jumlah dan kualitas sarana prasarana	99 orang	0	0	76.500.000
		- Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	Jumlah dan kualitas personil/ SDM	99 orang	0	0	40.000.000
		- Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Perkada	- Kerugian Materiil - Pengobatan	99 orang	0	0	0
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	- Respon Time	menit	155 orang	155 orang	100	1.189.820.000
		- Prosedur Operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Dokumen	155 orang	155 orang	100	10.000.000
		- Standar Sarana Prasana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Jumlah dan kualitas sarana prasarana	155 orang	155 orang	100	74.985.000
		- Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan penyelamatan/	Jumlah dan kualitas personil/ SDM	155 orang	155 orang	100	15.000.000

No	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar		
					Jumlah orang yang terlayani	(%)	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8
		sumber daya manusia - Pelayanan Pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang menjadi korban kebakaran - Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang terdampak kebakaran	Jumlah dan jenis Jumlah dan jenis	155 orang 155 orang	155 orang 155 orang	100 100	
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Dokumen KRB - Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Dokumen Kajian Pembentukan Destana	Prosentase penyelesaian Dokumen sampai dengan dinyatakan sah/Legal. Prosentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	911.966 75.200	100 100	238.000.000 252.000.000
4	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	Pelatihan Destana	Prosentase jumlah Aparatur dan warga negara yang ikut Pelatihan.	60	100	252.000.000

No	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar		
					Jumlah orang yang terlayani	(%)	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Penggunaan/ ATK/ Jumlah Petugas /Honor Petugas dan laporan	Prosentase Jumlah warga yang mendapatkan layanan pisdalosp PB dan sarana prasarana PB bencana	911.966		
		- Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengadaan Leaf jaket/ pelampung	Prosentase Jumlah warga yang mendapatkan Peralatan Perlindungan	50		
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	- Koordinasi pembagian wilayah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana - A	Jumlah Operasional tim Rescue	Prosentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana .	911.966	100	106.500.000

4. Alokasi Anggaran

Dalam upaya penerapan dan pencapaian SPM pelayanan ketenteraman dan keteriban umum, Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan Badan Penggulangan Bencana Daerah telah menyusun program dan kegiatan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			Jumlah
		APBN	APBD	Sumber lain yang sah	
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	8.950.000	-	8.950.000
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	1.189.820.000	-	1.189.820.000
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-	238.000.000	-	238.000.000
4	Pelayanan pencegahan Terhadap bencana	-	402.000.000	-	402.000.000
5	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	-	776.500.000	-	776.500.000
	Jumlah	-		-	2.615.270.000

5. Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Terlayani	Dukungan Personil
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara Yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada	0	Staf Satpol PP Kab. Sukoharjo
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	155 orang	Anggota Bidang Pemadam Kebakaran

3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	75.200	Petugas BPBD Sosmed dan media cetak
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	75.200	Petugas BPBD, Relawan kebencanaan Se Kab SKh dan TNI. Polri
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	911.966	Petugas BPBD, Relawan kebencanaan Se Kab SKh dan TNI. Polri

6. Permasalahan dan Solusi

PERMASALAHAN	SOLUSI	RECANA TINDAK LANJUT
1	2	3
Indikator Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan ketentraman dan ketertiban tidak mendorong/ mendukung kinerja Satpol PP sesuai tugas dan fungsinya.	Indikator SPM pelayanan ketentraman dan ketertiban perlu diadakan kajian ulang sehingga dapat mendorong/ mendukung kinerja Satpol PP sesuai Tugas dan Fungsinya. Dengan adanya penyesuaian pelaksanaan dengan kondisi lapangan eksisting.	Perlu review untuk mendukung kinerja Satpol PP dalam melaksanakan Tugasnya
Masih kurangnya kesadaran daerah untuk menerapkan SPM sebagai prioritas pembangunan sehingga Program dan Kegiatan yang secara spesifik belum direncanakan	SPM merupakan kebijakan publik yang menjadi prioritas pembangunan harus masuk dalam dokumen perencanaan daerah dan OPD sehingga bisa di anggarkan untuk penerapannya	Mengingatkan Pemerintah Daerah untuk secara konsisten mengimplementasikan tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal
Regulasi Multi tafsir terutama dalam menargetkan indikator pelaksanaan sesuai Permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 121	Upaya menyamakan persepsi tentang indikator pelaksanaan SPM melalui sosialisasi dan bintek untuk penerapannya	Perlu adanya Sosialisasi dan Bintek tentang Penerapan SPM

Tahun 2018 tentang Standar Teknis mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota		
Kurang Aktifnya Masyarakat dalam penanggulangan Bencana	Sosialisasi tentang Penanggulangan Bencana menjadi Tanggung Bersama antara Aparat , Masyarakat dan Dunia Usaha	Mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat dan Aparat Desa

7. Program dan Kegiatan

No.	Jenis Pelayanan dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Anggaran (Rp.000)
1	2	3		4
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		8.950.000
		1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	8.950.000
		A	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	8.950.000
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
		2	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/ Kota	
		A	Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah	1.189.820.000
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	PROGRAM		
		3	Kegiatan Pelayanan Informasi Bencana kabupaten/Kota	238.000.000
		A	Sub Kegiatan Penyusunan kajian Resiko Bencana kabupaten/Kota	150.000.000
		B	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE rawan Bencana Kabupaten/Kota	88.000.000
4	Pelayanan pencegahan Terhadap bencana	4	Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	402.000.000
		A	Sub Kegiatan pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana kabupaten/Kota	60.000.000
		B	Sub Kegiatan pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana kabupaten/Kota	180.000.000

No.	Jenis Pelayanan dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			Anggaran (Rp.000)
1	2	3			4
			C	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	12.000.000
			D	Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana kabupaten/Kota	75.000.000
			E	Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana kabupaten/Kota	75.000.000
5	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	5		Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana	776.500.000
			A	Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	15.000.000
			B	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota	40.000.000
			C	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Kabupaten/Kota	116.500.000
			D	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	605.000.000

F. Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pelayanan Standar Pelayanan Minimal urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan adalah :

- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial.
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial.
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial.
- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial.

2. Target Pencapaian SPM

a. Rencana Target Pencapaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapat Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian = (5) : (4) X 100%	Rancangan Rapbd Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasnTerlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	4177	4177	100%	180.356.900
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Anak yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1.138	1.138	100%	69.999.800
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	352	352	100%	121.637.600
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	195	195	100%	36.999.800
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1525	99	15.4%	115.000.000

b. Penghitungan pembiayaan mutu pelayanan dasar bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Sarana dan Prasarana Pelayanan kepada Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	4177 jiwa penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	4177	180.356.900
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Anak yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Sarana dan Prasarana pelayanan kepada Anak yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1.138 jiwa Anak Terlantar yang akan terlayani	1.138	69.999.800
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Sarana dan Prasarana pelayanan kepada Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	352 jiwa Tuna Sosial Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan layanan rehabilitasi	352	121.637.600
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Sarana dan Prasarana pelayanan kepada gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	195 jiwa Tuna Sosial Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang mendapatkan layanan rehabilitasi	195	36.999.800
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Sarana dan Prasarana pelayanan kepada Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1525 jiwa penduduk yang menjadi korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana.	99	115.000.000

3. Realisasi Capaian

a. Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Realisasi Capaian = (4): (6) X 100%
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	RAPBD 2021	Jumlah Orang Yang Terlayani	APBD TAHUN 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	4177	180.356.900	4177	180.356.900	100%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Anak yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1.138	69.999.800	1.138	69.999.800	100%
	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	352	121.637.600	352	121.637.600	5.4%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	195	36.999.800	195	36.999.800	100%
	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1525	115.000.000	99	31.877.500	3.6 %

b. Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar		
					Jumlah orang yang terlayani	(%)	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Sarana dan Prasarana Pelayanan kepada Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	4177	4177	100	180.356.900
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Anak yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Sarana dan Prasarana pelayanan kepada Anak yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1.138	1.138	100	69.999.800
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Sarana dan Prasarana pelayanan kepada Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	352	352	100	24.131.000
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Sarana dan Prasarana pelayanan kepada gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	195	195	100	36.999.800

No	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar		
					Jumlah orang yang terlayani	(%)	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Sarana dan Prasarana pelayanan kepada Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1525	99	15.4	31.877.500

4. Alokasi Anggaran

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			Jumlah
		APBN	APBD	Sumber lain yang sah	
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	361.203.000	180.356.900	-	180.356.900
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	49.800.000	69.999.800	-	69.999.800
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	-	121.637.600	-	121.637.600
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	-	36.999.800	-	36.999.800
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	-	115.000.000	-	115.000.000
	Jumlah	411.003.000	523.994.100		523.994.100

5. Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Terlayani	Dukungan Personil
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	4177	874
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Anak yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1.138	874
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	352	874
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	195	874
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	99	874

6) Permasalahan dan Solusi

N0	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak lanjut
1	Data PPKS yang berubah setiap tahun	Harus diadakan verval data terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pendataan setiap tahun terhadap PPKS
2	Sarana dan Prasarana Pelayanan terhadap PPKS	Perbaikan terhadap sarana dan prasarana pelayanan PPKS	Penyusunan pendanaan sarana dan prasarana untuk memenuhi pelayanan terhadap PPKS yang memadai

7. Program dan Kegiatan

No.	Jenis Pelayanan dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Anggaran (Rp.000)
1	2	3		4
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	PROGRAM : Rehabilitasi Sosial		180.356.900
		1	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	
		A	Penyediaan Permakanan	
		B	Penyediaan Sandang	
		C	Penyediaan Alat Bantu	
		D	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
		E	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
		F	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
		G	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
		H	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
		I	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
		J	Pemberian Layanan Kedaruratan	
		K	Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	
		L	Pemberian Layanan Rujukan	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	2	PROGRAM: Rehabilitasi Sosial	69.999.800
			Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	
		A	Penyediaan Permakanan	
		B	Penyediaan Sandang	
		C	Penyediaan Alat Bantu	
		D	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
		E	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
		F	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
		G	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk	

No.	Jenis Pelayanan dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Anggaran (Rp.000)
1	2	3		4
			Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
		H	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
		I	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
		J	Pemberian Layanan Kedaruratan	
		K	Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	
		L	Pemberian Layanan Rujukan	
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlanter di luar panti sosial	3	PROGRAM: Rehabilitasi Sosial	121.637.600
			Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlanter di Luar Panti Sosial	
		A	Penyediaan Permakanan	
		B	Penyediaan Sandang	
		C	Penyediaan Alat Bantu	
		D	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
		E	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
		F	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
		G	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
		H	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
		I	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
		J	Pemberian Layanan Kedaruratan	
		K	Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	
		L	Pemberian Layanan Rujukan	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	4	PROGRAM: Rehabilitasi Sosial	36.999.800
			Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Terlanter di Luar Panti Sosial	
		A	Penyediaan Permakanan	
		B	Penyediaan Sandang	
		C	Penyediaan Alat Bantu	
		D	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	

No.	Jenis Pelayanan dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan		Anggaran (Rp.000)
1	2	3		4
		E	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
		F	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
		G	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
		H	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
		I	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
		J	Pemberian Layanan Kedaruratan	
		K	Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	
		L	Pemberian Layanan Rujukan	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	5	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial	115.000.000
			Kegiatan: Pengelolaan Fakir Miskin	
		A	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
		B	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
		C	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
		D	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
		6	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial	
			Kegiatan: Pengelolaan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
		A	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
		B	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	

BAB V

PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah otonom telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, sekaligus dalam rangka upaya pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 -2021 dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai media pertanggungjawaban Bupati merupakan wujud dari akuntabilitas dan transparansi dari penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk dievaluasi dan dikritik oleh rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, diharapkan upaya terciptanya *good governance* sebagai tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan. Sukoharjo yang Makmur dan Mandiri, masyarakat yang bertakwa, sejahtera, berdaya dan berdaulat, partisipatif dan berkeadilan dengan pemerintahan yang bersih (bebas KKN) dan berwibawa, dan secara khusus strategi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dapat berhasil sebagai komitmen yang telah ditetapkan bersama.

